

MASA DEPAN MESIR PASCA PEMERINTAHAN HOSNI MUBARAK



SKRIPSI

*Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin*

Oleh :

**ULIL AMRI
E 131 07 022**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : MASA DEPAN MESIR PASCA PEMERINTAHAN HUSNI
MUBARAK

NAMA : ULIL AMRI

NIM : E 131 07 022

JURUSAN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



Makassar, Oktober 2014

Mengetahui :

Pembimbing I,

Drs. Patrice Lumumba, MA
NIP. 19611012 1987 1 001

Pembimbing II,

Burhanuddin, S.P., M.Si
NIP. 19760207 200801 1 009

Mengesahkan :
Ketua Jurusan,



Dr. H. Adi Suryadi B., MA
NIP. 19630217 199202 1 001

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : MASA DEPAN MESIR PASCA PEMERINTAHAN HUSNI
MUBARAK

N A M A : ULIL AMRI

N I M : E 131 07 022

JURUSAN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional pada hari Kamis,
30 Oktober 2014

TIM EVALUASI

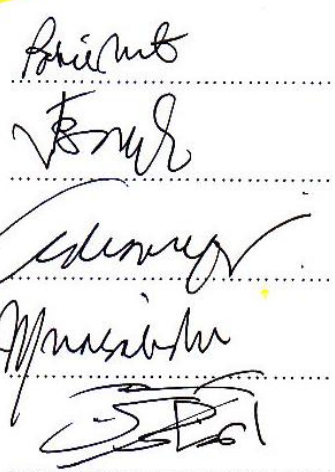
Ketua : Drs. Patrice Lumumba, MA

Sekretaris : Burhanuddin, S.IP, M.Si

Anggota : 1. Dr. H. Adi Suryadi B., MA

2. Muhammad Nasir Badu, Ph.D

3. Agussalim, S.IP, MIRAP



ABSTRAKSI

Ulil Amri, E131 07 022, “Masa Depan Mesir Pasca Pemerintahan Hosni Mubarak”, dibawah bimbingan Drs. Patrice Lumumba, M.A sebagai Pembimbing I dan Burhanuddin, S.IP., M.Si sebagai Pembimbing II, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah kebijakan dalam proses transisi politik di Mesir, serta masa depan demokrasi Mesir pasca pemerintahan Hosni Mubarak. Metode penelitian yang digunakan adalah preskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah berupa telaah pustaka (*library research*) yaitu mengumpulkan data-data dan informasi dari sejumlah literatur yang relevan dengan pokok permasalahan objek penelitaian berupa buku, dokumen, jurnal, artikel, dan surat kabar. Hasil penelitian ini menunjukkan keberhasilan demokratisasi Mesir sangat ditentukan dua faktor, yaitu konsolidasi demokrasi antar pelaku politik dan penyelamatan perekonomian Mesir dari krisis. Namun tidak mudah mencapai hal tersebut karena begitu besarnya tantangan yang dihadapi disamping secara objektif terlihat semakin kecilnya peluang yang diperoleh Mesir dari waktu ke waktu.

Kata Kunci : Mesir, Hosni Mubarak, dan Demokrasi

Ulil Amri, E131 07 022, *"The Future of Egypt's post- Hosni Mubarak Presidency", under the guidance of Drs. Patrice Lumumba, MA as a first Supervisor and Burhanuddin, S.IP., M.Si as second Supervisor, Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. This study aims to determine the policy measures in the process of political transition in Egypt, and the future democratic Egypt after Hosni Mubarak's rule. The method used is prescriptive. Data collection techniques used by the author is in the form of literature review (library research) is to collect data and information from a number of relevant literature on the subject matter related to the object of the research in the form of books, documents, journals, articles, and newspapers. These results demonstrate the success of the democratization of Egypt is determined two factors, namely the consolidation of democracy among political actors and rescue the Egyptian economy from the crisis. But it is not easy to achieved, owing to massive challenges faced besides objectively seems like there is little opportunity for Egypt acquired from time to time.*

Keyword : Egypt, Hosni Mubarak, and Democraton

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menghargai untuk Dihargai - (2008)

Mengucap rasa syukur yang teramat besar dan mendalam kepada Allah SWT, Sang Maha Menguasai seluruh alam semesta dan ciptaan-ciptaan kehidupan yang tiada henti dibuat takjub oleh-Nya. Luasnya waktu, ruang, dan kesempatan yang disediakan untuk merangkai tulisan yang tidak seberapa ini menjadi sebuah karya yang akan dikenang sebagaimana semestinya berada. Perjalanan ini tidak mudah meskipun juga tidak layak untuk dilebih-lebihkan, terlebih *istiqomah*-nya yang lebih sering terjun bebas dibandingkan grafik menanjaknya. Hingga pada akhirnya, siapa lagi yang harus membanggakan karya ini selain diri penulis dengan harapan bahwa selemah-lemahnya kebermanfaatannya, semoga menjadi amalan baik yang In Shaa Allah diterima oleh-Nya, *Aamiin ya Rabbal Alamiin*.

Terima kasih untuk keluarga selagi terjaga sekalipun tidak, untuk hati yang selalu saling mendoakan satu sama lain. Semoga Allah SWT menjaga rahmat dan memberikan hidayah untuk kedua orang tua, sumber ilmu, inspirasi, serta kasih sayang, sang pekerja keras, Ayah H. Husain Umar dan yang terlembut hatinya, Ibu H. Andi Astuty. Penulis memohon maaf atas banyaknya kesalahan dalam menjalankan amanah menjaga hati kalian. Begitupun hal nya untuk Saudara Teguh Hilmansyah dan Saudari Nurul Amaliah hingga satu-satunya ponakan hingga tulisan ini selesai, Andi Ashilah Humairah. Tidak ada suasana yang paling hangat ketika dimasa-masa sekarang ini kita masih sempat berkumpul, menciptakan intensitas dan memberikan kualitas.

Mengingat peristiwa-peristiwa yang sudah terlalui didalam lingkungan kampus, penulis wajib menyampaikan rasa terima kasih ini juga kepada segala pihak yang terus menemani dan memberi dukungan dalam kerangka positif sehingga karya tulis skripsi ini bisa dirampungkan. Seluasnya penghargaan ini penulis berikan kepada:

1. Ibu Rektor Universitas Hasanuddin sekaligus jajarannya.
2. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin serta jajarannya.
3. Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing I Drs. Patrice Lumumba, MA serta Pembimbing II Burhanuddin S.IP, M.Si atas segala kemurahan hatinya terhadap karya tulis skripsi ini.
4. Jajaran Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang selama masa pengajaran selalu berhasil memberi kesan, Bapak Dr. H. Adi Suryadi B., MA; Bapak Drs. Aspiannor Masrie; Bapak Muhammad Nasir Badu, Ph.D; Ibu Pusparida Syahdan, SoS., M.Si; Kak Agussalim, S.IP, MIRAP; dan Kak Ashry Sallatu, S.IP., M.Si
5. Staf Jurusan Akademik Ilmu Hubungan Internasional yang selalu mendengar, mengerti dan memudahkan, Bunda dan Kak Rahma.
6. Lembaga Mahasiswa Hubungan Internasional HIMAH FISIP UNHAS sebagai wadah pendewasaan keorganisasian dan keilmuan yang kritis menyenangkan.

7. Mereka yang tergabung dalam keluarga generasi-generasi hebat dalam lingkungan HIMAHI FISIP UNHAS, Dictator 2003; Heckers 2004; Regime 2005; dan Ambassador 2006.
8. Kawan-kawan sejawat di Empire 2007 yang banyak menghadirkan banyak cerita tentang solidnya sebuah pertemanan.
9. Adik-adik mahasiswa HI yang menamai diri Hegemony 2008; Militia 2009 (mengacu kepada perkataan kordinator perkaderannya); Keluarga HITEN 2010; sampai pada adik-adik 2011 dan 2012.
10. Keluarga besar D'B3 Voice UNHAS, sekumpulan mereka yang secara sederhana konsisten mati-matian untuk bernyanyi demi sambutan penikmatnya.
11. Para pejuang seni musik dan paduan suara Makassar Choral Society, semoga visi misi dan gerak tetap terjaga untuk terus memperluas dan mengembangkan niat baik yang dicita-citakan.
12. Penggiat seni budaya tari daerah UKM Seni Tari UNHAS; dan para penyaji pantun dalam UKM Pantun UNHAS.

Makassar, Oktober 2014

Ulil Amri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iii
ABSTRAKSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A . Latar Belakang Masalah	1
B . Batasan dan Rumusan Masalah	8
C . Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D . Kerangka Konseptual	10
E . Metode Penelitian	14
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 17
A . Konsep Kekuasaan	17
B . Konsep Demokrasi	26
C . Konsep Masa Depan	35
 BAB III REPUTASI KEKUASAAN HOSNI MUBARAK DAN MASA TRANSISI POLITIK MESIR	 46
A . Reputasi Kekuasaan Hosni Mubarak	52
B . Masa Transisi Politik Mesir	82
 BAB IV MASA DEPAN DEMOKRASI MESIR PASCA PEMERINTAHAN HOSNI MUBARAK	 105
A . Pembangunan Demokrasi dalam Aspek Politik Pemerintahan dan Sosial Ekonomi.....	105
B . Arah Kebijakan Luar Negeri Pasca Transisi Politik	122
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	 127
A . Kesimpulan	127
B . Saran-saran	128
 DAFTAR PUSTAKA	 129
LAMPIRAN-LAMPIRAN	133

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kegiatan Masyarakat Sipil	36
Tabel 2.	Daftar Nama Kota dan Provinsi di Mesir	49
Tabel 3.	Riwayat Karir Hosni Mubarak	55
Tabel 4.	Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Mesir	80
Tabel 5.	Bantuan Luar Negeri Langsung Amerika Serikat-NGO Mesir.....	82
Table 6.	Kronologi Revolusi 25 Januari Mesir	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	133
------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara menjadi istilah yang digunakan untuk merujuk kepada sebuah pemerintahan, rakyat, wilayah, serta kedaulatannya. Unsur-unsur pembentuk negara tersebut berjalan sinergis dan seimbang dalam upaya mencapai tujuan kolektif dan mendukung eksistensinya dalam dunia internasional. Sebuah pemerintahan yang memperoleh kekuasaan dan wewenang tertinggi oleh rakyat harus memiliki kapabilitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka menjamin kehidupan rakyatnya melalui pemaksimalan potensi wilayah dan sumber daya alam lainnya. Disamping itu, kedaulatan negara serta pengakuan dunia internasional terhadapnya akan memudahkan sebuah negara menjalankan peranannya.

Pemerintahan negara dewasa ini dituntut untuk menjalankan peranannya melalui proses-proses yang demokratis. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan amanat dan aspirasi rakyatnya. Amanat dan aspirasi, keseluruhan harus menjadi bahan pertimbangan dari sebuah kebijakan yang akan diambil dan ditempuh dari mekanisme pelaksanaan pemerintah. Pemerintah harus menyediakan pelayanan dan akses yang terjangkau terhadap aspek-aspek kehidupan seperti akses dibidang politik, ekonomi, serta informasi dan kebebasan berekspresi. Disamping itu, yang terpenting adalah menjamin rasa aman terhadap rakyat dalam mengakses aspek-aspek tersebut.

Negara melalui pemerintah yang tidak dapat menjalankan peranan sebagaimana mestinya akan menjadi salah satu potensi sumber utama konflik

internal. Pemerintahan yang cenderung tidak aspiratif, marginalisasi hak-hak politik rakyat, kesejahteraan yang cenderung menurun, serta pengekangan terhadap kebebasan berekspresi menjadi alasan-alasan pemicu instabilitas politik dalam negeri. Kondisi instabilitas yang terus-menerus terjadi dapat membawa negara dalam kondisi krisis hingga terjadi pergolakan politik. Pada awal tahun 2011, pergolakan politik yang diakibatkan kelemahan pemerintah negara terjadi di sebagian besar kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah.

Fenomena pergolakan politik di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah membawa nasib setiap negara yang mengalaminya menuju suatu kondisi revolusi. Pergolakan politik tersebut dikenal dengan istilah Revolusi Melati yang bertujuan untuk menumbangkan penguasa mereka yang dimulai dari Tunisia menyusul Mesir, Aljazair, Yaman, Bharain, dan negara-negara lainnya.¹ Hingga saat ini, baru tiga pemimpin negara yang harus meninggalkan jabatannya, yakni mantan Presiden Tunisia Zine Abidin Ben Ali dan mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak. Sedangkan mantan Presiden Libya Moammar Khaddafi harus melepaskan jabatannya sekaligus terbunuh oleh pasukan pemberontak di negaranya. Selain itu, pemimpin negara lainnya belum bisa dipastikan karena mengingat kondisi politik di negaranya masih bergolak.

Revolusi yang timbul dipicu oleh kasus aksi bakar diri seorang pemuda bernama Muhamed Bouazizi di Tunisia. Aksi *self immolation* sebagai bentuk ekspresi keputusasaan yang tidak menemukan jalan keluar atas kondisi ekonomi yang dihadapi. Sejak aksi bakar diri ini terjadi, memicu aksi demonstrasi yang kemudian meluas di seluruh negeri dan mengarah pada tuntutan pengunduran diri

¹ Apriadi Tamburak, 2011, *Revolusi Timur Tengah Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-Negara Timur Tengah*, Yogyakarta, NARASI, hal. 10

Presiden Tunisia Zine Abidin Ben Ali. Aksi ini diikuti oleh beberapa orang di negara lainnya seperti Mohsen Bouterfif di Aljazair dan Abdou Abdel-Moneim Jaafar di Mesir.²

Mencermati gerakan revolusi rakyat di kawasan Timur Tengah, terdapat beberapa faktor yang menjadi semangat dan mendasari kejadian tersebut. Pertama, rakyat di kawasan Timur Tengah memiliki kultur budaya yang hampir sama yaitu bangsa Arab dimana kaum muslim mendominasi sehingga meskipun terpecah dalam batasan negara namun mereka tetap merasa senasib dan sepenanggungan. Kedua, rakyat Timur Tengah pernah merasakan pahitnya penjajahan kolonialisme selama beberapa dekade meskipun pewaris selanjutnya adalah generasi muda namun mereka tetap merasakan penderitaan yang diwariskan pendahulu di masa lampau dan menyebabkan keterbelakangan mereka dalam segala hal. Ketiga, pasca kemerdekaan dari kolonialisme mereka belum merasakan kemerdekaan dalam arti sebenarnya baik secara ekonomi dan politik termasuk merasakan demokrasi dimana para penguasa justru terkesan menjadi diktator dan otoritarian.

Keberhasilan aksi demonstrasi rakyat Tunisia dalam menjatuhkan Zine Abidin Ben Ali pada awal tahun 2011 mengilhami aksi serupa di dunia Arab. Di Mesir, kemarahan rakyat ditunjukkan melalui aksi demonstrasi yang dimulai pada Januari 2011 guna mendesak Hosni Mubarak melepaskan jabatannya dan menuntut diadakannya proses transisi politik sesegera mungkin. Aksi demonstrasi selama 18 hari dengan jumlah massa yang semakin banyak dan terjadi diberbagai kota-kota besar Mesir seperti Alexandria dan Suez akhirnya memperoleh hasil sesuai harapan rakyat. Presiden Hosni Mubarak menyatakan pengunduran dirinya yang

² *Ibid.*, h. 12

disampaikan melalui wakil Presiden Omar Sulaiman dan kemudian menyerahkan kekuasaan kepada Dewan Militer Mesir dibawah pimpinan Mohammed Husain Tantawi untuk memegang kendali terhadap Mesir selama proses transisi politik berlangsung.³

Tinjauan hubungan sebab akibat, kemarahan rakyat Mesir yang menjatuhkan kepemimpinan Hosni Mubarak disebabkan oleh beberapa faktor. Mesir mencatat peningkatan angka pengangguran serta minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia, kasus dugaan korupsi, dan sistem politik otokrasi yang didominasi oleh sebuah keluarga dalam hal ini keluarga Mubarak dan para aliansi elit politik selama 30 tahun.⁴ Selain itu, peningkatan tensi politik terjadi didorong semakin kuatnya konflik dalam pemilihan parlemen, konflik antara Kristen Koptik dan Muslim, serta semakin meluasnya publikasi terhadap penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara.⁵

Kondisi ekonomi yang semakin buruk diikuti dengan dugaan kasus tindakan korupsi oleh para elit politik juga menjadi faktor utama dari peristiwa ini. Menurut laporan *World Bank*, 16.7% rakyat Mesir hidup dibawah garis kemiskinan, berjuang hidup dengan upah yang rendah dan sekitar 30% dari total buruh adalah petani yang berupah kecil. Angka inflasi yang tinggi sekitar 9%-12% memupuskan harapan beberapa rakyat Mesir mendapatkan jaminan kehidupan lebih baik

³ David D. Kirkpatrick, 2011, "Egypts Erupts in Jubilation as Mubarak Steps Down", diakses melalui <http://www.nytimes.com/2011/02/12/world/middleeast/12egypt.html> pada tanggal 25 Februari 2011 pukul 19.00 WITA

⁴ Jeremy M. Sharp, Januari 2011, "Egypt: Background and U.S. Relations", Congressional Research Services, h. 3

⁵ David A. Ricardo, 2011, *Catatan Harian Revolusi Mesir Revolusi Rakyat*, Jakarta, Buku Kita, h. 44

terutama masyarakat kelas menengah.⁶ Pada akhir 2010, sekitar 40% dari total jumlah penduduk Mesir di bawah 80 juta jiwa tinggal dengan pendapatan perkapita sekitar US\$ 2 per hari. Selain itu, dampak kondisi perekonomian tersebut juga mengarah kepada pengangguran yang tinggi. Menurut *Peterson Institute For International Economics*, masalah dasar Mesir adalah pengangguran kaum muda dengan jumlah angkatan kerja yang terserap hanya sekitar 4% per tahun, pengangguran di Mesir hampir sepuluh kali lebih tinggi untuk lulusan perguruan tinggi.⁷

Korupsi dikalangan para penguasa dan elit politik menunjukkan angka yang sangat memprihatinkan. Hosni Mubarak dan keluarga diduga mengumpulkan kekayaan selama menjabat menjadi presiden sekitar US\$50-US\$70 miliar, belum termasuk korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara lainnya. Tahun 2010, *Transparency International* mengeluarkan laporan Indeks Persepsi Korupsi terhadap Mesir dengan skor IHK 3.1, berdasarkan tingkat korupsi dari pelaku bisnis dan analis negara (dengan 10 yang bersih dan 0 secara total korup). Masyarakat menilai bahwa persoalan korupsi hanya memberi manfaat terbatas pada penerima dalam hal ini para pengusaha yang memiliki ikatan dengan partai penguasa NDP dengan suatu istilah “kekayaan sebagai bahan bakar kekuasaan politik dan kekuasaan politik membeli kekayaan”.⁸

Perselisihan besar terjadi dalam pemilu parlemen Mesir pada bulan November dan Desember 2010. Partai berkuasa pimpinan Hosni Mubarak yaitu *National Democratic Party* memenangi 96% suara diparlemen yaitu sebanyak 420

⁶ “Egypt Economy: Demographic Profile,” *EIU ViewsWire*, July 7, 2010. Dikutip dalam Jeremy M. Sharp, *Op. Cit.*, h. 10

⁷ Apriadi Tamburaka, *Op.Cit.*, h. 71

⁸ Jeremy M. Sharp, *Op.Cit.*, h. 5

kursi dari 504 kursi parlemen yang tersedia. Kelompok oposisi Ikhwanul Muslimin yang semulanya menduduki 88 kursi diparlemen, tidak memperoleh satu kursi pun dan akhirnya berupaya memboikot pemilihan umum putaran kedua karena menurut konstitusi Mesir, Ikhwanul Muslimin tidak dapat ikut berpartisipasi dalam pemilihan presiden berikutnya.⁹ Ikhwanul Muslimin akhirnya melakukan aksi demonstrasi menyusul dugaan kecurangan dalam pemilu sekaligus pembebasan atas penangkapan anggotanya dimana diperkirakan 1000 anggota termasuk delapan kandidat parlemen berdasarkan bukti dan tuduhan *Amnesty Internasional* sebagai tindakan pembungkaman terhadap kelompok oposisi.¹⁰

Pengekangan dan penganiayaan terutama oleh para kaum muda kelas menengah terdidik yang secara intelektual kontra terhadap kebijakan-kebijakan Mubarak. Pada tahun 2007, *Amnesty International* dan Dewan Nasional HAM Mesir kembali merilis laporan mengkritik pemerintah Mesir untuk penyiksaan dan penahanan ilegal sebanyak 567 kasus yang terdiri dari 167 kasus berdampak kematian dalam kurun waktu 1993 hingga 2007. Kasus terakhir yaitu pada Juni 2010, seorang pria bernama Khaled Mohamed Said meninggal dalam kekerasan fisik aparat di Sidi Gaber daerah Alexandria. Kematian Said menjadi salah satu inspirator para kaum muda bagi gerakan pro demokrasi dan kemudian membentuk sebuah kelompok perlawanan yang menamakan diri mereka “Kita Semua untuk Said Khaled” melalui situs jejaring social *Facebook* dan *Twitter*.¹¹

Konflik antara kelompok agamawan juga menjadi salah satu pemicu instabilitas politik di Mesir. Salah satunya yang terjadi pada bulan Januari 2011,

⁹ David A. Ricardo, *Op.Cit.*, h. 44

¹⁰ *Ibid.*, h. 45

¹¹ Apriadi Tamburaka, *Op.Cit.*, h. 73-74 dan 112

terjadi aksi bom bunuh diri di depan Gereja *Al-Qiddissin (Two Saints)* di kota Alexandria. Aksi bom bunuh diri ini menewaskan sekitar 21 orang dan melukai beberapa jemaat. Pemerintah kemudian mengumumkan kepada publik bahwa aksi ini dilakukan oleh kelompok militan Palestina di Gaza yang dikenal dengan Pasukan Islam. Kelompok tersebut membantah tuduhan pemerintah atas peristiwa yang terjadi.¹²

Mundurnya Hosni Mubarak secara resmi yang dilatar belakangi dari permasalahan-permasalahan diatas melalui revolusi rakyat Mesir merupakan langkah awal dari perubahan Mesir. Pasca pemerintahan Hosni Mubarak, Mesir harus sesegera mungkin mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk membangun kembali stabilitas negaranya terutama dalam proses transisi politik yang lebih terbuka dan demokratis serta upaya menyelamatkan perekonomian yang semakin terpuruk pasca revolusi. Mengingat dari kejadian ini, pihak yang tersingkir hanyalah Mubarak dan keluarganya, elit bisnis yang berada dekat dengan penguasa, pimpinan pemerintahan sekaligus pimpinan partai NDP, dan para pimpinan militer yang tunduk pada Hosni Mubarak. Basis struktur pemerintahan sepeninggalan Hosni Mubarak merupakan peninggalan yang harus segera diubah dimana Dewan Militer dan bentukan birokrasi negara masih berjalan dan posisinya berpotensi untuk mendikte jalannya transisi politik yang stagnan. Sekitar 6 juta orang masih menduduki posisi dalam pemerintahan yang diduga merupakan orang-orang yang masih menuruti perintah penguasa sebelumnya.¹³

Mesir yang secara historis merupakan negara yang kuat dengan kapabilitasnya di mata dunia internasional mengalami serangkaian proses revolusi.

¹² Jeremy M. Sharp, *Op. Cit.*, h. 6

¹³ Dina Shehata, 2011, "The Fall of The Pharaoh. How Hosni Mubarak's Reign Came to an End", dalam Lisa Anderson dkk., *The New Arab Revolt, Foreign Affairs*, Vol. 90, No. 3, h. 32

Revolusi dengan massa terbesar sepanjang sejarah revolusi Mesir menunjukkan keinginan dan semangat rakyat yang ingin merubah suasana politik yang lebih terbuka dan akses ekonomi yang lebih mudah. Menarik melihat upaya-upaya akomodasi aspirasi dari pemegang kekuasaan selama proses transisi dalam upaya menyelamatkan kondisi krisis pasca revolusi. Fenomena tersebut menjadi asumsi dasar penulis sebagai tantangan untuk mengkaji lebih jauh khususnya masa depan negara Mesir pasca mundurnya Hosni Mubarak. Untuk itu penulis menuangkan keinginan tersebut dengan judul **MASA DEPAN MESIR PASCA PEMERINTAHAN HOSNI MUBARAK.**

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Dimensi permasalahan yang melingkupi Mesir saat ini bisa dikatakan sangat kompleks. Rezim Hosni Mubarak yang telah berkuasa selama 30 tahun telah membentuk sebuah sistem politik dan pemerintahan otokrasi yang olehnya didengungkan sebagai jalan demokrasi. Namun pada kenyataannya apa yang telah dilakukan ternyata tidak membawa dampak positif terhadap rakyat Mesir secara keseluruhan. Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang politik, peningkatan angka korupsi dan kegagalan terhadap kebijakan-kebijakan reformasi ekonomi, serta pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi dan pers/media massa.

Aksi demonstrasi massa yang berhasil memaksa mundur Hosni Mubarak dari kursi kepresidenan Mesir merupakan langkah awal perubahan di Mesir. Rakyat Mesir kini dihadapkan pada tantangan dalam proses transisi politik yang diperkirakan tidak akan berjalan dengan mudah meskipun rakyat tetap menuntut pengalihan kekuasaan sepenuhnya terhadap warga sipil. Rakyat Mesir percaya bahwa sistem politik dan pemerintahan akan berjalan baik dengan mengutamakan

kepentingan rakyat akan memberikan hal-hal yang baik pula terutama pada penegakan keadilan dan kesejahteraan warga negara.

Transisi politik Mesir menekankan pada pembangunan demokrasi secara menyeluruh terutama dibidang politik pemerintahan, ekonomi, hingga manifestasinya terhadap arah kebijakan luar negeri Mesir itu sendiri. Dari berbagai aspek demokrasi yang memiliki cakupan yang luas, penulis memberikan batasan pembahasan terhadap perilaku para elit politik dalam upaya membangun dan menegakkan asas dan prinsip demokrasi secara substansial yang terkait langsung terhadap penguatan institusi pemilu, partai politik, komunikasi politik, identitas politik, *civil society*, budaya politik, dan lain-lain. Setelah itu, kebijakan politik luar negeri Mesir akan sangat berpengaruh terhadap proses transisi politik sehingga penulis juga akan membahas aspek penting ini mengingat Mesir memiliki peran yang strategis dalam konstelasi politik internasional dikawasan terutama di mata negara-negara Barat.

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka penulis menyusun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pembangunan demokrasi Mesir dalam aspek politik pemerintahan dan sosial ekonomi?
2. Bagaimana arah kebijakan luar negeri Mesir pasca transisi politik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Ketertarikan penulis untuk membahas judul di atas dan melakukan penelitian memiliki tujuan yakni:

- 1) Untuk mengetahui upaya pembangunan demokrasi Mesir dalam aspek politik pemerintahan dan sosial ekonomi.
- 2) Untuk mengetahui arah kebijakan luar negeri Mesir pasca transisi politik.

2. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap melalui penelitian ini akan berguna yakni:

- 1) Sebagai bahan referensi informatif bagi pihak-pihak akademisi yang memiliki fokus terhadap kajian Timur Tengah khususnya negara Mesir.
- 2) Sebagai masukan kepada praktisi/lembaga-lembaga terkait sebagai sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan.

D. Kerangka Konseptual

Eksistensi kekuasaan cenderung tergantung dari interaksi hubungan antara dua pihak. Pihak pertama yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dengan pihak lainnya yang menerima pengaruh baik rela atau karena terpaksa. Apabila merujuk pada diri seseorang, biasanya pihak itu dinamakan pemimpin dan mereka yang menerima pengaruhnya adalah pengikut.

Selo Soemardjan¹⁴ membedakan antara kekuasaan dan wewenang serta memberikan batasan definisinya yaitu:

Kekuasaan adalah setiap kemampuan untuk mempengaruhi hingga memaksakan kehendak terhadap pihak lain. Sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Karena memerlukan pengakuan masyarakat, maka di dalam suatu masyarakat yang sudah kompleks susunannya dan sudah mengenal pembagian kerja yang terinci, wewenang biasanya terbatas pada hal-hal yang diliputinya, waktunya, dan cara menggunakan kekuasaan itu.

Merujuk pada pengertian diatas, kekuasaan terdapat di semua bidang kehidupan yang dijalankan. Cakupan kekuasaan meliputi kemampuan untuk

¹⁴ Selo Soemardjan, dikutip dalam buku Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, h. 266

memerintah agar yang diperintah patuh dan juga untuk memberi keputusan-keputusan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan pihak-pihak lainnya. Selain itu, kekuasaan membutuhkan legitimasi oleh yang diperintah sebagai bentuk pelimpahan wewenang untuk mempermudah jalannya pelaksanaan kekuasaan.

Kekuasaan tertinggi pada umumnya berada pada unit negara. Tidak hanya menjalankan hak atas kekuasaan, melainkan membagikan kekuasaan dan wewenangnya pada tingkat derajat yang lebih rendah. Kekuasaan ini dijalankan oleh sekelompok orang sebagai representasi dari masyarakat yang dikenal dengan istilah pemerintah. Pemerintah tersebut harus senantiasa berusaha untuk membenarkan kekuasaannya terhadap rakyat, dengan maksud agar kekuasaannya dapat diterima masyarakat sebagai kekuasaan yang legal dan baik untuk masyarakat yang bersangkutan. Oleh karenanya, pemerintah harus berusaha menanamkan kekuasaannya dengan jalan menghubungkannya dengan kepercayaan dan perasaan-perasaan yang kuat didalam masyarakat bersangkutan, yang pada dasarnya terwujud dalam nilai dan norma.

Dimensi permasalahan negara dewasa ini semakin hari semakin kompleks dan berhubungan satu sama lain. Sebagai unsur yang paling bertanggung jawab dalam pengaplikasiannya, pemerintah dituntut untuk memiliki formulasi tepat yang merujuk pada proses penyelesaian masalah tersebut. Namun sebaliknya, pemegang kekuasaan dalam hal ini pemerintah sering melanggar hak, tidak memperhatikan aspirasi, serta kepentingan rakyat sebagai bentuk kontrak sosial dan hukum antara keduanya. Bahkan demi menjaga kepentingannya, tidak jarang pemerintah bertransformasi ke dalam bentuk rezim yang otoriter.

Carlton Clymer Rodee¹⁵ memberikan definisinya tentang rezim otoriter yaitu,

Rezim otoriter adalah pemerintahan oleh sekelompok elit yang secara formal tidak bertanggungjawab kepada warga negara. Secara umum mencirikan hubungan sosial yang bercirikan komando dan kepatuhan, dalam artian warga negara yang mematuhi tidak mempunyai pengaruh formal maupun langsung dengan pemerintah yang berkuasa.

Rezim otoriter melaksanakan kekuasaan yang bertujuan untuk mempertahankan otoritas bahkan dominasi yang telah dibangun dengan berbagai cara, tidak terkecuali kekerasan. Jika hal ini terjadi, akan berujung terhadap menurunnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah karena berdampak kepada penurunan kualitas kesejahteraan hingga pengekangan dan pembatasan hak-hak asasi warga negara. Krisis otoritas ini dapat mendorong rakyat untuk melakukan aktivitas revolusi yang meluas dalam negara.

Revolusi pada umumnya menuntut perubahan untuk perbaikan sistem kenegaraan yang lebih berpihak terhadap hak dan kepentingan rakyat. Sebagai bentuk ketidakpuasan dari rakyat, revolusi akan menentang struktur sosial dan hegemoni politik dari rezim otoriter tersebut yang bersifat eksploitatif. Hal ini sejalan dengan definisi yang dikutip dari **Kamus Dunia Ketiga** mengenai revolusi, yaitu:

Revolusi merupakan perubahan mendasar suatu sistem politik dan susunan tata masyarakat yang sifatnya intensif dan meluas yang dilakukan oleh sub-kelompok bawah dari struktur masyarakat kenegaraan (profesional, guru, mahasiswa, buruh, dan lain-lain).¹⁶

Perubahan-perubahan dari revolusi yang dilakukan oleh rakyat pada dasarnya menekankan kepada hasrat pengakuan terhadap eksistensinya. Eksistensi merujuk

¹⁵ Carlton Clymer Rodee dkk, 2002, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, h. 47

¹⁶ Dieter Nohlen, 1994, *Kamus Dunia Ketiga: Negara, Organisasi, Teori, Definisi, dan Tokoh*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, h. 656

kepada perlakuan yang adil terhadap dirinya yang baik dalam kehidupan politik dan sosialnya serta penjaminan terhadap berbagai akses ekonomi. Dari rangkaian sejarah revolusi, hampir sebagian besar mengharapkan adanya revolusi demokratis karena secara ideal demokrasi akan menghapus segala bentuk perbedaan dan ketidakadilan antara masyarakat yang diharapkan dapat terwujud dalam pengakuan yang bersifat universal dan timbal balik, dimana setiap warga negara mengakui martabat dan kemanusiaan dari setiap warga negara yang lain, dan martabat itu pada akhirnya diakui oleh negara melalui penjaminan akan hak-hak.

Demokrasi muncul sebagai nilai yang melawan semua bentuk-bentuk otoritarianisme. Demokrasi akan menghapus semua bentuk kediktatoran serta menghilangkan penghinaan terhadap umat manusia untuk mengedepankan nilai kehidupan bersama. Masyarakat yang demokratis berkonsekuensi terhadap tumbuhnya manusia dan masyarakat yang bebas, toleran, kreatif, serta berkeadilan. Meskipun pada dasarnya perjuangan demokrasi dan penegakkan kedaulatan rakyat bukanlah sekedar menumbangkan rezim otoriter apapun bentuknya, akan tetapi tantangan terberat adalah upaya mempertahankannya, memberikan daya hidup, dan makna terhadapnya.

Kondisi demokratis dalam sebuah negara juga dapat meningkatkan pengawasan terhadap kekuasaan politik, sosial, dan ekonomi oleh rezim penguasa. Pengawasan yang baik tentunya akan berdampak pada maksimalnya distribusi kemakmuran untuk rakyat juga. Dengan adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan oleh rakyat maka kepentingan mereka tidak dapat diabaikan oleh

penguasa. Mengutip pendapat tentang demokrasi dari **Prof. Dr. Thomas Meyer**¹⁷ yakni,

Demokrasi adalah sistem kekuasaan yang memiliki komitmen untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan penegakan hukum yang independen. Oleh karena itu demokrasi merupakan pelindung paling efektif terhadap penindasan negara atau kekuasaan rakyat yang terkendali. Memiliki rasa aman dari berbagai ancaman seperti penindasan, hilangnya kebebasan, pelanggaran terhadap keutuhan kondisi fisik seseorang serta hak untuk mengungkapkan dan mempertahankan kepentingan hidup individu bersama-sama dengan orang lain merupakan kebutuhan manusia paling mendasar. Perlindungan terhadap semua ancaman itu merupakan tujuan demokrasi sebagai negara hukum.

Penggambaran demokrasi diatas cukup menjelaskan bagaimana pentingnya dan baiknya penerapan demokrasi. Selain dapat mencegah muncul dan berkembangnya otoritanisme dalam lingkungan penguasa, juga menjamin perlakuan sama sebagai pemenuhan hak dasar individu serta distribusi kemakmuran yang merata. Melihat kondisi ini, korelasi aktivitas revolusi dan penerapan demokrasi sangat erat dan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pengaplikasiannya sebagai upaya menghilangkan tindakan-tindakan otoritanisme.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang bersifat deksripsi dan prediksi. Penelitian ini akan berupaya menjelaskan tentang reputasi kekuasaan Hosni Mubarak sebagai variabel berpengaruh selama memimpin Mesi. Setelah itu, menjelaskan tentang fenomena yang terjadi di negara Mesir sebagai variable terpengaruh mengenai faktor-faktor pendorong terjadinya revolusi. Kemudian, akan mengaitkan serta menganalisis fenomena tersebut dan dilanjutkan mermproyeksikan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi sebagai

¹⁷ Thomas Meyer, 2009, *Demokrasi Sebuah Pengantar Untuk Penerapan*, Jakarta, Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, h. 2

tantangan dalam peluang Mesir menuju sebuah negara yang stabil dan demokratis.

2. Jenis dan Sumber Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*) yakni mengumpulkan data-data dari sejumlah literatur yang relevan dengan pokok permasalahan dalam objek penelitian baik berupa buku-buku, jurnal, dan dokumen. Selain itu, artikel-artikel yang bersumber dari majalah, surat kabar, hingga situs-situs internet. Data tersebut diperoleh dari beberapa sumber yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan di perpustakaan dan lembaga lainnya, yakni :

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin di Makasaar;
- b. Perpustakaan FISIP Universitas Hasanuddin di Makassar;
- c. Perpustakaan Wilayah Sulawesi Selatan di Makassar;
- d. Situs-situs internet yang relevan, khususnya beberapa lembaga studi internasional yang fokus mengkaji kawasan Timur Tengah.

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang akan digunakan penulis adalah merupakan data sekunder. Data yang dimaksud adalah data-data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data-data yang menyangkut tentang profil serta kondisi terkini negara Mesir dan reputasi kekuasaan Hosni Mubarak yang kemudian akan dianalisis tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi setelahnya.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah bersifat kualitatif. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif yakni dengan menghubungkan antara fakta satu dengan fakta lainnya. Hasil analisis terhadap fenomena ataupun fakta tersebut akan ditarik sebuah kesimpulan akhir.

5. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah metode deduktif, dimana penulis terlebih dahulu akan menggambarkan permasalahan secara umum, lalu kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekuasaan

Kekuasaan menekankan pada upaya merebut dan mempertahankan kekuasaan itu sendiri. Perolehan kekuasaan berarti memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok yang berada dalam jangkauan kekuasaan tersebut sesuai keinginannya. Keinginan pemilik kekuasaan merupakan artikulasi dari perumusan kepentingan-kepentingan yang telah ditetapkan. Gejala kekuasaan ini adalah gejala yang lumrah dalam setiap masyarakat, dalam semua bentuk kehidupan bersama.

Manusia memiliki ragam keinginan dan tujuan yang ingin sekali dicapainya. Oleh karena itu dirasakan perlu untuk memaksakan keinginannya atas orang atau kelompok yang berada dalam lingkungan sosialnya. Hal ini menimbulkan perasaan pada dirinya bahwa mengendalikan orang lain adalah syarat mutlak untuk keselamatannya sendiri. Sehingga bagi banyak orang, kekuasaan merupakan suatu nilai yang harus dimiliki dan diperjuangkan. Hal inilah yang disebut sebagai kekuasaan sosial yang muncul dalam setiap interaksi setiap orang bahkan dalam kehidupan yang telah terstruktur seperti organisasi sosial.

Robert M. MacIver¹⁸ memberikan pandangannya tentang definisi kekuasaan sosial yaitu,

Social power is the capacity to control the behavior of others either directly by fiat or indirectly by the manipulation of available means. (Kekuasaan sosial adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik

¹⁸ Miriam Budiardjo, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, h. 36

secara langsung dengan jalan perintah, maupun secara tidak langsung dengan mempergunakan segala alat dan cara yang tersedia).

Definisi tersebut menjelaskan bahwa kekuasaan berbentuk hubungan (*relationship*) yaitu ada satu pihak yang memerintah dan ada pihak yang diperintah. Tidak ada persamaan derajat dan martabat, pihak yang memerintah selalu lebih tinggi daripada yang lain dalam hubungan kekuasaan. Paksaan tidak selalu perlu digunakan secara gamblang, meskipun selalu ada kemungkinan menggunakan cara paksaan cenderung kekerasan. Disamping itu, manusia sekaligus merupakan subjek dari kekuasaan dan objek dari kekuasaan dalam artian bahwa hubungan manusia yang cenderung hirarkis, tidak ada sama sekali yang tidak pernah memberi perintah dan tidak pernah memberi perintah.

Berhubungan erat dengan masalah kekuasaan adalah pengaruh (*influence*), sehingga sering dikatakan bahwa pengaruh adalah bentuk lunak dari kekuasaan. Dalam hal ini seseorang yang mempunyai kekuasaan cenderung juga memiliki pengaruh di dalam dan di luar bidang kekuasaannya. Tetapi tidak semua orang yang mempunyai kekuasaan yang sama, mempunyai pengaruh yang sama besarnya karena masalah pengaruh berkaitan dengan pribadi seseorang yang memegang kekuasaan.

Mengenai pengaruh tersebut, **Soerjono Soekamto**¹⁹ memberikan pembedaan sebagai berikut:

1. Pengaruh bebas yang didasarkan pada komunikasi dan bersifat persuasif.
2. Pengaruh tergantung atau tidak bebas menjadi efektif karena ciri tertentu yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berpengaruh. Pada jenis pengaruh ini, mungkin terjadi proses-proses sebagai berikut:
 - a. Pihak yang berpengaruh membantu pihak yang dipengaruhi untuk mencapai tujuannya, atau pihak yang berpengaruh mempunyai

¹⁹ Soerjono Soekamto, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, h. 265

- kekuatan untuk memaksakan kehendaknya (kemungkinan dengan melancarkan ancaman-ancaman mental dan/atau fisik).
- b. Pihak berpengaruh mempengaruhi ciri-ciri tertentu yang menyebabkan pihak lain terpengaruh, yaitu:
- Kelebihan di dalam kemampuan dan pengetahuan.
 - Sifat dan sikap yang dapat dijadikan pedoman perilaku yang pantas atau perilaku yang diharapkan.
 - Mempunyai kekuasaan resmi yang sah.

Berdasarkan penjelasan diatas, pengaruh juga tidak selalu harus dikaitkan dengan kekuasaan. Dalam hubungan kekuasaan, terdapat orang atau kelompok yang tidak mempunyai kedudukan, yang dengan sendirinya tidak mempunyai kekuasaan tetapi mempunyai pengaruh. Dengan kelebihan dalam kemampuan spesifik dan pengetahuan serta sifat dan sikap yang menginspirasi dan menjadi teladan dapat membangun keberpengaruhan dalam kekuasaan itu sendiri. Jadi arti pengaruh tidak sama dengan kekuasaan.

Zaman modern sekarang kekuasaan sangat berhubungan erat dengan negara. Negara merupakan salah satu organisasi kekuasaan utama yang menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban yang mengikat, oleh kesatuan-kesatuan dalam suatu sistem organisasi kolektif. Pemegang kekuasaan dalam sebuah negara adalah pemerintah yang merupakan representasi dari rakyat terpilih. Rakyat yang telah memberikan kepercayaannya kepada pemerintah wajib melaksanakan aturan yang tertuang dalam undang-undang, sementara pemerintah pun sepakat menghormati hak-hak mereka.

Logika seperti ini sangat berkenaan dengan konsep perjanjian atau kontrak sosial. **Jean-Jacques Rousseau** mengemukakan pendapat tentang kontrak sosial, bahwa tidak ada pemerintahan yang absah atau terlegitimasi tanpa memberikan pengakuan oleh rakyat terhadap otoritasnya. Konsep kontrak sosial dari Rousseau ini mencakup semua rakyat sejak kesepakatan awal untuk membentuk pemerintah

dimana semua rakyat memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menetapkan batas-batas yang layak bagi hukum dan ruang lingkup kegiatan pemerintahan. Partisipasi rakyat dalam membina kontrak sosial **Rousseau** juga berarti bahwa pemerintah hanya absah selama tetap bertindak menurut azas-azas kedaulatan rakyat.²⁰

Manusia yang sangat rasional dalam hal ini rakyat merasakan adanya manfaat dari penyusunan suatu pemerintahan. Pemerintah dapat menyelesaikan pertikaian di antara warga secara tidak memihak; pemerintah diperlukan untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pemerintah negara lain di dunia; pemerintah adalah penguasa utama yang merencanakan dan memelihara suatu sistem pertukaran moneter yang memungkinkan terjadinya akumulasi barang-barang modal.²¹

Berdasarkan penjelasan tersebut, pemerintah memegang kekuasaan yang paling penting dalam negara, yaitu kekuasaan politik. Mengutip definisi dari **Prof. Miriam Budiardjo**²² mengenai kekuasaan politik, yaitu:

Kekuasaan politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum pemerintah baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan itu sendiri.

Kekuasaan politik merupakan sebagian dari bentuk-bentuk kekuasaan sosial yang memfokuskan pada negara dalam hal ini pemerintah. Pemerintah sebagai satu-satunya pihak berwenang yang mempunyai hak untuk mengendalikan tingkah laku sosial dengan paksaan. Kekuasaan politik tidak hanya mencakup kekuasaan untuk memperoleh ketaatan dari warga masyarakat, tetapi juga menyangkut pengendalian orang lain dengan tujuan mempengaruhi tindakan dan aktivitas negara di bidang

33 ²⁰ Carlton Clymer Rodee dkk, 2002, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, h.

²¹ *Ibid.*, h. 34

²² Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, h. 38

legislatif (pembuatan dan pengawas undang-undang), *eksekutif* (pelaksana undang-undang), dan *yudikatif* (eksekusi undang-undang).

Kekuasaan politik tidaklah mungkin berjalan tanpa penggunaan kekuasaan. Apabila penggunaan kekuasaan itu berjalan dengan efektif, hal ini dapat disebut sebagai *kontrol* (penguasaan/pengendalian). Dengan sendirinya untuk menggunakan kekuasaan politik yang ada, harus ada penguasa yaitu *pelaku pemegang kekuasaan*, dan harus ada *alat/sarana kekuasaan* agar penggunaan kekuasaan itu dapat dilakukan dengan baik.²³

Beberapa kasus dalam negara-negara baru yang terbentuk lebih mengedepankan pada penggalangan legitimasi atau keabsahan. Hal ini sangat logis mengingat kondisi dimana kesetiaan lokal (*primordial attachment*) seperti suku, golongan, dan aliran tampak masih lebih kuat dibandingkan dengan kesetiaan nasional. Legitimasi adalah konsep bahwa kedudukan seseorang atau sekelompok penguasa diterima baik oleh masyarakat karena sesuai dengan azas-azas dan prosedur yang berlaku dan yang dianggap wajar.²⁴ Legitimasi ini akan menjadi kendali kontrol untuk menjalankan fungsi pengawasan langsung terhadap jalannya pemerintahan.

Pelaksanaan kekuasaan negara dalam konteks kekuasaan politik dan hubungannya dibedakan menjadi dua macam. **Ossip K. Flechtheim** memberikan perbedaannya yakni *pertama*, bagian kekuasaan sosial yang terwujud dalam negara seperti lembaga-lembaga pemerintahan, presiden, dan sebagainya. *Kedua*, bagian dari kekuasaan sosial yang ditujukan kepada negara.²⁵ Kekuasaan politik yang

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, h. 39

²⁵ *Ibid.*, h. 40

dimaksud berasal dari aliran-aliran dan asosiasi-asosiasi yang secara terbuka bersifat politik seperti partai politik, maupun yang pada dasarnya tidak menyelenggarakan kegiatan politik tetapi pada kondisi tertentu dapat mempengaruhi jalannya proses pemerintahan, seperti organisasi ekonomi, lembaga mahasiswa, organisasi keagamaan, organisasi minoritas, dan sebagainya.

Sumber kekuasaan terdapat di berbagai segi kehidupan. Apabila sumber-sumber kekuasaan tersebut dikaitkan dengan kegunaannya, maka akan tercipta stabilitas hubungan antara pemerintah dan rakyat. Sumber-sumber tersebut seperti: (1) Militer yang digunakan untuk pengendalian terhadap kekerasan; (2) Ekonomi yang digunakan untuk mengendalikan tanah, buruh, kekayaan material, dan produksi; (3) Politik yang digunakan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan; (4) Hukum yang digunakan untuk mempertahankan, mengubah, dan melancarkan interaksi; (5) Tradisi yang digunakan untuk sistem kepercayaan nilai-nilai; (6) Ideologi yang digunakan untuk pandangan hidup dalam upaya integrasi; (7) *Deversionary Power* digunakan untuk kepentingan rekreatif.²⁶

Terdapat beberapa unsur pokok dalam penerapan hubungan kekuasaan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan sumbernya. Unsur tersebut merupakan sarana yang biasanya digunakan oleh para penguasa untuk menjalankan kekuasaan yang ada ditangannya. Dalam masyarakat yang kompleks, hubungan antara penguasa dengan yang dikuasai, terpaksa dilaksanakan secara tidak langsung oleh karenanya membangun unsur-unsur dari kekuasaan ini sangat penting dilakukan.

William W. Lambert dan Wallace E. Lambert dalam bukunya **Sosiale Psychologie** mengemukakan beberapa unsur-unsur kekuasaan yaitu rasa takut,

²⁶ Carlton Clymer Rodee dkk, *Op.Cit.*, h. 37

rasa cinta, kepercayaan, dan pemujaan²⁷. *Pertama*, perasaan takut pada pemegang kekuasaan yang menyebabkan suatu kepatuhan yang terpaksa agar terhindar dari kesukaran dalam hidupnya. Rasa takut merupakan gejala universal dan biasanya digunakan oleh pemerintah otoriter. *Kedua*, perasaan cinta menghasilkan perbuatan yang positif dari yang diperintah terhadap kehendak pihak berkuasa. Rasa cinta yang efisien berdampak pada sistem kekuasaan yang akan berjalan dengan baik dan teratur.

Ketiga, rasa kepercayaan antara penguasa dan yang dikuasai akan menumbuhkan hubungan timbal balik yang bersifat asosiatif. Sistem pemerintahan yang mengedepankan rasa kepercayaan sangat penting demi kelanggengan suatu kekuasaan. *Keempat*, sistem pemerintahan yang dibangun dengan pemujaan lebih kuat dibanding dengan sistem kepercayaan, karena apapun dari segala tindakan dari penguasa merupakan suatu kebenaran atau setidaknya dianggap benar oleh pihak yang diperintah.

Berbagai unsur kekuasaan tersebut sedikit banyak digunakan oleh pemerintahan di seluruh dunia. Namun tidak jarang ditemukan suatu pemerintahan yang sangat mengedepankan penggunaan unsur rasa takut dalam pelaksanaan kekuasaannya. Pemerintah yang seperti ini secara perlahan akan membangun sebuah rezim otoriter yang tidak berpihak pada kepentingan dan hak rakyat, melainkan melakukan sentralisasi kekuasaan yang hanya didominasi oleh pemerintahan itu sendiri.

Hampir di seluruh negara berkembang saat ini masih diperintah secara otoriter. Bentuk dan corak rezim otoriter berbeda-beda berdasarkan pengalaman di

²⁷ Soerjono Soekamto, *Op.Cit*, h. 271

negara-negara tersebut. *Pertama*, rezim otoriter yang dibangun atas basis kekuasaan sosial dan politik; *kedua*, rezim otoriter yang dibangun dengan pola-pola legitimasi; *ketiga*, rezim otoriter yang berkaitan dengan struktur kekuasaan politik dan pembagian kekuasaan serta mekanisme yang mengikat pimpinan dan elit; *keempat*, rezim otoriter yang dibangun dalam satu kesatuan motif yaitu kekuasaan dari atas; *kelima*, rezim otoriter yang terbangun dalam konteks historis atau budaya politik²⁸; *keenam*, rezim otoriter yang terbangun dalam orientasi politiknya.²⁹

Karakter otoriter oleh rezim yang berkuasa tidak memihak kepada kepentingan rakyat melainkan kepentingan kelompok rezim tersebut. Rezim menghimpun kekuatan dari militer dan sipil kedalam sistem kekuasaannya, membangun sistem demokrasi dan mempertahankan kekuasaannya dengan bantuan represi, korupsi, dan manipulasi dalam pemilu. Dalam bentuk rezim otoriter seperti ini, pada umumnya peralihan dilakukan lebih mengedepankan kekerasan bersifat revolusioner. Meskipun negara tersebut menerapkan sistem demokrasi, namun pelaksanaannya jauh dari hal-hal demokrasi yang substantif tentang pengalaman dan peluang reformasi sehingga wajar metode kekerasan dilakukan sebagai awal mula perubahan yang diinginkan oleh seluruh rakyat negara tersebut.

Dewasa ini, rakyat memiliki gagasannya sendiri mengenai hak untuk menentang otoritas rezim otoriter berdasarkan penyangkalan terhadap hak asasi dan kontrak sosial. Hak untuk menolak bahkan mengadakan revolusi untuk membentuk pemerintahan baru. Ini akan menjadi bagian dari perjuangan rakyat terus-menerus

²⁸ Budaya politik mengacu pada keseluruhan pengetahuan, sikap emosional, dan penilaian etika-moral yang berkaitan dengan isu-isu politik yang benar-benar mempengaruhi kehidupan masyarakat. Budaya politik dalam negara demokrasi membutuhkan pengembangan kemampuan yaitu pengetahuan, keterikatan emosional dan dukungan etis, serta peranan warga negara dan tanggungjawab terhadap masyarakat. Lihat Thomas Meyer, *Op.Cit.*, h. 40

²⁹ Dieter Nohlen, *Op. Cit.*, h. 658-660

dan tidak selalu harus kalah agar pemerintah bersikap lebih manusiawi dan lebih peka terhadap kebutuhan rakyatnya.

Proses tersebut sejalan dengan definisi revolusi yang dikemukakan oleh **Michael Kimmel** bahwa,

*Revolution are attempts by subordinate groups to transform the social foundations of political power. It includes succesful and unsuccessful revolution; It embraces a large number of sequences over various amounts of time; and it includes both violent and peaceful modes of change.*³⁰

Berdasarkan pengertian tersebut, revolusi merupakan gerakan yang terkonsolidasi dari segala kelompok sosial disebuah negara. Gerakan yang mendambakan sebuah perubahan sosial terhadap kekuasaan politik yang di genggam oleh rezim pemerintah otoriter terlepas revolusi tersebut berhasil atau tidak. Revolusi merupakan akumulasi dari tahapan-tahapan seiring waktu berjalan dan menjadi momentum sebagai bentuk perlawanan baik menggunakan cara-cara damai maupun kekerasan demi perubahan yang dimaksud.

Kimmel selanjutnya merumuskan bahwa revolusi terjadi sebagai puncak atau akumulasi dari beberapa momentum yaitu,

*A revolution occurs as the culmination of three temporal moments: the first is the existence of pre-conditions, which include the long-term, structural shifts in the social foundations of the society, responsible for the creation of what can be defined as a "revolutionary moment." The second is the precipitants, which are the short-term historical events that "allow these deeply seated structural forces to emerge as politically potent and begin to mobilize potential discontents." The final moment includes the trigger(s) – the immediate historical events that set the revolutionary process in motion.*³¹

Kimmel menguraikan tiga momen temporal yang terdiri dari *pre-conditions*, *precipitants*, dan *triggers*. Pertama, *pre-conditions* yang dimaksud adalah rentetan

³⁰ Elie Podeh, "Farewell to an Age of Tyranny? Egypt as a Model of Arab Revolution", diakses melalui http://www.ifes.org/~media/Files/Publications/White%20PaperReport/2011/2011_egypt_briefing_paper_II.pdf pada tanggal 23 Mei 2011 pukul 17.00 WITA

³¹ *Ibid.*

peristiwa yang meliputi proses jangka panjang yang mendasari banyak perubahan struktural dari kehidupan sosial masyarakat akibat tindakan-tindakan rezim otoriter. Sikap kritis dan ketidakpuasan tersebut yang menjadi titik awal setiap gerakan revolusioner. Kedua, *precipitans* merupakan rentetan peristiwa mencakup proses jangka pendek yang memungkinkan kekuatan-kekuatan struktural sosial muncul sebagai kekuatan politik yang kuat dan berupaya memobilisasi potensi-potensi ketidakpuasan tersebut. Ketiga, *trigger* adalah peristiwa yang terjadi baik dilingkungan internal maupun eksternal sebagai momentum dan pemicu yang membawa revolusi dalam gerakan massa bersifat massif.

Meningkatnya jumlah penduduk di dunia yang memandang hidup bukan merupakan nasib atau sebagai sesuatu yang relatif pasti dan tertentu. Pemerintahan otoriter semakin dirasa tidak sejalan dengan pengalaman hidup sosial dan politik warga negara. Kekuasaan politik yang didasarkan pada kepemimpinan otoriter tidak lagi mungkin mendapatkan kekuatan dari sikap hormat atau respek. Revolusi pada akhirnya menjadi alternatif kunci dalam menghadapi rezim otoriter sebagai upaya menumbangkan praktik kekuasaan dominasi dan tidak kompromistis.

B. Demokrasi

Demokrasi telah didiskusikan selama lebih kurang dua ribu lima ratus tahun hanya untuk memberikan perangkat gagasan yang jelas tentang demokrasi yang dapat disepakati oleh semua orang, setidaknya hampir semua orang. Namun ternyata keadaannya tidak demikian, bahkan dalam kurun waktu tersebut demokrasi telah menimbulkan perbedaan pendapat karena demokrasi itu sendiri memiliki makna yang berbeda-beda bagi orang yang berbeda-beda, pada waktu dan tempat yang berbeda-beda pula. Kondisi ini disimpulkan oleh **Robert A. Dahl** dengan

mengemukakan pendapat bahwa "*there is no democratic theory, there are only democratic theories*" (tidak ada suatu teori demokrasi, hanya ada teori-teori demokrasi).³²

Teori demokrasi klasik mendefinisikan demokrasi dengan istilah-istilah "kehendak rakyat" yang merupakan sumber dan tujuan "kebaikan bersama". Istilah demokrasi juga digunakan secara beragam dalam penekanannya terhadap konteks kehidupan, seperti untuk menyebut bentuk suatu pemerintahan dan politik, terkadang dikonotasikan dengan kondisi suatu masyarakat, dan bahkan istilah tersebut diterapkan pada lembaga-lembaga yang jauh dari politik. Demokrasi juga diartikan sebagai suatu cita-cita yang tidak mungkin dicapai manusia.

Permasalahan lain yang juga belum sampai pada titik temu di sekitar perdebatan tentang demokrasi itu adalah bagaimana pengimplementasian demokrasi dalam praktik. Berbagai negara telah menentukan jalurnya yang tidak sedikit di antaranya justru mempraktikkan cara-cara yang sangat tidak demokratis meskipun menyebutkan demokrasi sebagai asas fundamentalnya. Oleh karena itu, dalam proses identifikasi terhadap fenomena demokrasi dapat dibedakan atas *demokrasi normatif* dan *demokrasi empirik*. Demokrasi normatif menyangkut rangkuman gagasan atau idealita tentang demokrasi yang terletak di dalam alam filsafat, sedangkan demokrasi empirik adalah pelaksanaannya di lapangan yang tidak selalu paralel dengan gagasan normatifnya.³³

Terlepas dari perdebatan tersebut, salah satu organisasi PBB yaitu **UNESCO** memberikan laporan studinya pada awal tahun 1950-an. Hasil studi tersebut

³² Robert A. Dahl, 2001, *Perihal Demokrasi Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, h. 3

³³ Efriza, 2009, *Ilmu Politik, Dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan*, Bandung, Alfabeta, h. 110

menyimpulkan bahwa tidak ada satupun tanggapan yang menolak demokrasi sebagai landasan dan sistem paling tepat dan ideal bagi manusia, kelompok, organisasi politik, bahkan organisasi modern.³⁴ Kesimpulan tersebut menempatkan demokrasi sebagai asas dan sistem yang paling baik didalam sistem politik dan ketatanegaraan. Khasanah pemikiran dan preformansi politik di berbagai negara juga sampai pada satu titik temu bahwa demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya.

Perkembangan yang beragam tentang demokrasi dewasa ini, bagaimanapun tidak bisa terlepas dari beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa lampau. **Henry B. Mayo** dalam bukunya **An Introduction to Democratic Theory** menguraikan beberapa asas dan nilai yang termuat dalam demokrasi, yaitu:

1. *Institutionalized peacefull settlement of conflict*. Menyelesaikan permasalahan dengan damai dan secara melembaga.
2. *Peacefull change ini a changing society*. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah.
3. *Orderly succession of rulers*. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
4. *Minimum of coercion*. Membatasi pemakaian kekerasan seminimal mungkin.
5. *Value of diversity*. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku.
6. Menjamin tegaknya keadilan.³⁵

Berdasarkan asas dan nilai tersebut, **World Forum on Democracy** dalam pembahasan tentang **Democracy in Transition** mengemukakan bahwa untuk mewujudkan sebuah negara demokrasi, negara harus membangun tiga pilar atau prasyarat pokok yang sangat esensial. *Pertama*, adanya negara yang kuat; *kedua*,

³⁴ Ni'matul Huda, 2011, *Ilmu Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, h. 196

³⁵ *Ibid.*, h. 218

civil society yang kuat; dan *ketiga*, ekonomi yang kuat.³⁶ Ketiga prasyarat tersebut harus berjalan secara selaras dan sinergis serta konsisten demi terwujudnya demokrasi yang diharapkan setiap elemen warga negara khususnya bagi negara yang berada dalam situasi transisi menuju demokrasi.

Pembangunan negara yang kuat dalam konteks demokrasi sebagai pilar pertama ditinjau dari bagaimana sebuah pemerintah terbentuk dan terorganisir. Berdasarkan asas dan nilai demokrasi tersebut **Diamond, Linz, dan Lipset**³⁷ memberikan rumusan definisinya tentang demokrasi sebagai sistem pemerintahan, yaitu:

Suatu sistem pemerintahan yang memenuhi tiga syarat pokok: kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas di antara individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi (terutama partai politik) untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang memiliki kekuasaan efektif, pada jangka waktu yang reguler dan tidak melibatkan penggunaan daya paksa; partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin atas kebijakan, paling tidak melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara adil dan reguler, sedemikian rupa sehingga tidak satupun kelompok sosial (warga negara dewasa) yang dikecualikan; tingkat kebebasan sipil dan politik, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung ke dalam organisasi, yang cukup untuk menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik.

Berdasarkan definisi diatas, ada tiga hal yang dibisa cermati yaitu akses kompetisi dalam pemerintahan, partisipasi politik yang aktif, dan kebebasan sipil politik untuk berpendapat serta berekspresi. Demokrasi dalam konteks ini merupakan suatu bentuk pemerintahan berlandaskan persamaan hak yang ditata dan diorganisasikan sesuai prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan kesamaan politik baik individu hingga pada tingkat komunitas politik. Prinsip tersebut memungkinkan

³⁶ Azyumardi Azra, 2002, *Konflik Baru Antar Peradaban Globalisasi, Radikalisme, dan Pluralitas*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, h. 51

³⁷ Mohtar Mas'oed, 2003, *Negara, Kapital, dan Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 15

individu atau kelompok untuk berpartisipasi dalam kompetisi untuk menempati kedudukan di pemerintahan pada jangka waktu yang telah disepakati.

Demokrasi menempatkan partisipasi politik yang aktif dari warga negara disamping situasi kompetisi sehat yang dibangun. Hal ini semakin melengkapi hak warga negara untuk memilih dan dipilih dalam suasana kebebasan berpolitik. Kebebasan politik tersebut terwujud dalam pemilu yang adil, jujur, regular tanpa ada pengecualian terhadap warga negara tertentu. Jadi pada dasarnya pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang kekuasaannya dalam pola pengambilan keputusan untuk suatu negara ditetapkan secara sah menurut anggota-anggota dari suatu komunitas politik secara keseluruhan dalam arti bahwa pemerintah memiliki sikap tanggap dalam dirinya terhadap preferensi atau keinginan warga negaranya.

Sejalan dengan pendapat **Joseph Schumpeter**³⁸ yang menekankan demokrasi pada persoalan penciptaan proses prosedural. Pendapatnya lebih dikenal dengan istilah “metode demokrasi” yaitu,

Pengaturan kelembagaan untuk mencapai keputusan-keputusan politik di dalam mana individu-individu, melalui perjuangan memperebutkan suara rakyat pemilih, memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan.

Gagasan Schumpeter ini mendominasi teorisasi demokrasi sejak 1970-an karena lebih bersifat empirik, dekskriptif, institusional, dan prosedural. Gagasan yang memandang bahwa demokrasi sebagai suatu sistem budaya politik untuk memproses konflik, misalnya dimana partai yang kalah dalam pemilihan umum tidak berusaha merusak rezim demi mencapai tujuannya. Namun tetap bersedia menerima kenyataan dan menunggu putaran pertarungan dalam pemilihan umum berikutnya.

³⁸ Efriza, *Op. Cit.*, h. 109

Negara demokrasi kuat sebagai pilar pertama dalam sistem pemerintahan dan kelembagaannya sangat mengedepankan pemisahan kekuasaan. Lembaga-lembaga politik yang paling banyak diketahui adalah badan-badan pemerintah yang terdiri dari badan *eksekutif*, badan *legislatif*, dan badan *yudikatif*. Badan eksekutif bertanggungjawab atas pembuatan dan pelaksanaan kebijakan; badan legislatif bertanggungjawab menelaah kebijakan, dan memperbaiki, menciptakan, serta mengawasi kekuasaan badan eksekutif; dan badan yudikatif bertanggungjawab menjamin bahwa konstitusi yang mengatur kewajiban timbal balik warganegara terhadap negara maupun sebaliknya tidak dilanggar.³⁹ Dalam masyarakat bebas, prinsip utama yang mendasari badan-badan kelembagaan pemerintah ini adalah penilaian badan pengadilan, tanggung jawab eksekutif, dan pelaksanaan kekuasaan berdaulat oleh legislatif atas nama rakyat.

Kekuasaan dalam demokrasi , pemakaiannya harus sesuai dengan patakon kewajaran dan keadilan. Hal ini sangat penting mengingat kekuasaan *legislatif*, *eksekutif*, dan *yudikatif* berada ada dalam satu tangan, penyalahgunaan akan cenderung terjadi. Dalam kasus seperti ini sangat sulit mengontrol kekuasaan karena kebebasan rakyat untuk berpartisipasi dalam urusan-urusan yang mempengaruhi kehidupan mereka akan terancam. Konsentrasi kekuasaan pada satu sumber, adalah sama dengan menciptakan peluang penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Oleh karenanya, tugas-tugas tersebut harus berjalan terpisah bersifat tranparan dan jelas.⁴⁰

³⁹ David. E. Apter, 1988, *Pengantar Analisa Politik*, terj. Setiawan Abadi, Jakarta, Kincir Buana, h. 136

⁴⁰ Efriza, *Op.Cit.*, h. 112

Pemisahan dan pelaksanaan kekuasaan dalam demokrasi diatur dalam sebuah konstitusi. Diungkapkan lebih luas tentang konstitusi oleh **A.V. Dicey** dalam bukunya **Introduction to the Study of the Law of the Constitution** yaitu,

Hukum konstitusional mencakup semua aturan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi distribusi kekuasaan tertinggi di sebuah negara. Demikianlah, ia mencakup (diantara lain) semua aturan yang menetapkan anggota dari kekuasaan tertinggi itu, semua aturan yang mengatur saling hubungan antara anggota-anggota itu, atau yang menetapkan cara kekuasaan tertinggi itu, atau para anggotanya dalam menjalankan wewenang mereka. Aturan-aturan itu menetapkan tata tertib pergantian kekuasaan, mengatur hak-hak istimewa dari hakim kepala, menetapkan bentuk-bentuk badan legislatif serta cara-cara pemilihannya.⁴¹

Tetapi konstitusi bertindak lebih dari sekedar menetapkan pembagian wewenang antara badan-badan pemerintahan. Konstitusi juga menunjukkan hubungan antara rakyat dan pemerintah, antara kebebasan, atau otonomi mereka, dan kondisi-kondisi pemerintah atas nama mereka.

Konstitusi selanjutnya dimanifestasikan ke dalam suatu bentuk hukum sebagai upaya mendukung penegakan demokrasi dengan segala prinsipnya. Hukum tersebut akan menjamin penegakan tidak hanya pada wilayah kontrol pengawasan atas kekuasaan dan pelaksanaan kebebasan politik, melainkan kebebasan hak yang lebih luas lagi yaitu hak asasi manusia dari segala bentuk potensi pelanggaran dan penindasan negara atau kekuasaan yang tidak terkendali khususnya ditujukan kepada kelompok minoritas oleh mayoritas. **Prof. Dr. Thomas Meyer** mengungkapkan pemikirannya mengenai korelasi tersebut, yaitu

Hak asasi manusia, pemberlakuan hukum independen, serta pelaksanaannya melalui pengadilan yang bebas dari pengaruh politik merupakan prasyarat, pembatasan, dan tujuan dari prosedural demokratis yang memusatkan perhatian pada konsep mayoritas dan minoritas.⁴²

⁴¹ David E. Apter, *Op.Cit.*, h. 141

⁴² Thomas Meyer, *Op.Cit.*, h. 18

Mengutip pendapat **Mahfud** dalam hubungan kausalitas antara hukum dan politik menyatakan bahwa,

Hukum dan politik sebagai sub-sistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lain, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik tetapi begitu hukum ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan hukum.⁴³

Pemikiran dasar ini menyebutkan kekuasaan politik tidak boleh mempengaruhi hukum yang berlaku dan pengaruh politik tidak boleh mencampuri penafsiran hukum. Karena itu interpretasi konstitusi tidak boleh menjadi bagian dari kewenangan para politisi tetapi menjadi kewenangan dari badan pengadilan tertinggi yang independen. Memang benar bahwa pembuatan hukum atau undang-undang merupakan bagian dari tanggungjawab proses politik, tetapi tanggungjawab tersebut harus selalu dilakukan dalam kerangka konstitusi. Undang-undang atau perilaku politik yang tidak sejalan dengan undang-undang harus dihentikan dan dihukum oleh Mahkamah Agung independen.

Kekuasaan politik dalam demokrasi tidak boleh sewenang-wenang menentukan apa yang sejalan dan tidak dengan hukum yang berlaku. Dalam era modern, legitimasi hukum ditentukan oleh sejauh mana hukum ditetapkan secara demokratis, menghormati hak asasi manusia dan diawasi oleh pengadilan yang independen. Akhirnya negara hukum dan demokrasi saling tergantung dan saling memperkuat, karena demokrasi akan kehilangan legitimasinya kalau tidak didasarkan pada hukum dan tidak dibatasi oleh hukum.

Diamond, Linz, dan Lipset menyebutkan pula tentang tingkat kebebasan sipil dan politik dalam definisinya. Tingkat kebebasan sipil dan politik tersebut meliputi kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan

⁴³ Efriza, *Op.Cit.*, h. 126

bergabung ke dalam organisasi. Oleh mereka, penjaminan terhadap tingkat kebebasan sipil cukup mampu menjamin integritas ditengah kompetisi dan partisipasi politik dalam proses demokrasi. Secara tidak langsung, kebebasan yang dimaksud mampu berperan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan negara. Hal ini sangat terkait dengan syarat atau pilar kedua hasil rumusan *World Forum On Democracy* yaitu adanya *civil society* yang kuat.

Mengutip definisi mengenai *civil society* yang dikemukakan oleh **Alfred Stepan**⁴⁴ yaitu sebagai berikut,

Civil society adalah arena tempat terdapat banyak sekali gerakan sosial (seperti persatuan atas dasar kekerabatan, perhimpunan wanita, kelompok-kelompok agama, dan organisasi cendekiawan) dan organisasi-organisasi kemasyarakatan dari berbagai golongan dan kelompok profesi (seperti persatuan sarjana, persatuan wartawan, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan lain-lain) yang mencoba membentuk diri mereka dalam suatu keteraturan supaya mereka dapat menyatakan dirinya dan menyalurkan kepentingan-kepentingannya.

Civil society yang kuat dapat memberikan banyak sumbangan bagi pertumbuhan demokrasi.⁴⁵ *Pertama* dan mendasar adalah tersedianya wahana sumber daya politik, ekonomi, kebudayaan, hingga moral untuk menjaga dan mengawasi keseimbangan pelaku fungsi eksekutif negara dalam hal ini pemerintah. *Kedua*, ragam serikat dan organisasi berbanding lurus dengan ragam artikulasi kepentingan sehingga hal ini sangat menguatkan dasar kompetisi yang kuat dalam sistem demokrasi. *Ketiga*, berkembangnya organisasi kemasyarakatan akan membantu peranan partai politik dalam hal partisipasi politik, peningkatan efektivitas politik dan keterampilan warga negara yang demokratis, serta

⁴⁴ Alfred Stepan, "Rethinking Military Politics: Brazil and Southern Cone" dalam Larry Diamond, 1993, *Revolusi Demokrasi: Perjuangan untuk Kebebasan dan Pluralisme di Negara Berkembang*, terj. Matheos Nalle, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, h. 9

⁴⁵ *Ibid.*, h. 10-16

memajukan penghargaan atas hak dan kewajiban kewarganegaraan yang demokratis.

Fungsi *keempat* bahwa *civil society* akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang tatanan sosial dimana akan mendorong masyarakat kedalam partisipasi yang kooperatif dan kompromistis sehingga akan menjaga stabilitas negara. *Kelima*, *civil society* yang demokratis menjadi wadah perekrutan dan pelatihan kepada calon pimpinan politik yang baru dari tingkat kekuasaan tertinggi hingga terendah. Fungsi *keenam* dan yang paling penting adalah menghalangi dan mempercepat berakhirnya rezim itu dari kekuasaannya. Mengingat bahwa *civil society* merupakan ancaman besar dalam kapasitasnya sebagai organisasi independen yang mampu menunjukkan semua hal tentang kebenaran kebijakan-kebijakan rezim otoriter tersebut.

Hal yang perlu ditekankan bahwa tidak setiap organisasi memberikan sumbangan kepada demokrasi hanya karena organisasi tersebut otonom. Di beberapa negara terdapat banyak organisasi dalam *civil society* dengan kecenderungan politik kiri atau kanan, yang tujuan politiknya bukan demokrasi tetapi dalam beberapa model bentuk justru bertentangan dengan demokrasi bahkan metode kepemimpinan organisasinya bersifat otoriter. Keanekaragaman serikat dan organisasi dalam *civil society* menurut sifat dan tujuannya harus memberikan sumbangan bagi demokrasi dalam berbagai cara. Menempuh upaya dengan tujuan-tujuan yang jelas dari kegiatan mempromosikan demokrasi maupun melalui prosedur demokratis yang menghasilkan mufakat, atau dengan keterlibatan secara internal.

Terlepas dari tujuan dan kepentingan mereka, organisasi atau serikat bebas akan dapat memberikan sumbangan kepada demokrasi bila penerapan mekanisme organisasi mereka bersifat demokratis. Mekanisme internal organisasi tersebut harus mengedepankan prosedur yang demokratis dan penghormatan serta promosi norma-norma, toleransi, kerjasama, tanggungjawab, keterbukaan, dan saling percaya. Setiap organisasi dapat menjadi sekolah bagi para anggotanya mengenai demokrasi dalam praktik apabila cirri-ciri tersebut diterapkan. Namun sebaliknya, organisasi tersebut tak dapat menjadi sarana demokrasi betapapun otonomnya bila menegasikan ciri-ciri demokrasi tersebut.

Aktivitas Politik <i>Civi Society</i>	
Konvensional	Un-Konvensional
<ol style="list-style-type: none"> 1. Membaca surat kabar politis 2. Diskusi politik 3. Kolaborasi proyek lokal 4. Partisipasi kegiatan kelompok warga 5. Keanggotaan dalam partai politik 6. Menjalin hubungan dengan politisi 7. Merubah pendirian sebelum pemilu 8. Partisipasi dalam kampanye 9. Partisipasi dalam kegiatan politik 10. Partisipasi dalam referendum publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Protes 2. Demonstrasi 3. Boikot 4. Pendudukan 5. Boikot pajak 6. Blokade 7. Pemogokan missal 8. Aksi pembangkangan masyarakat

Tabel 1. *Kegiatan Masyarakat Sipil* ⁴⁶

Ekonomi yang kuat menjadi pilar terakhir dari kedua pilar sebelumnya dalam upaya penegakan negara demokrasi kuat. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan faktor penentu dalam pelaksanaan dan keberlanjutan demokrasi di negara tertentu. Hal ini tidak berarti bahwa negara-negara miskin tidak dapat menerapkan demokrasi atau negara kaya akan selalu demokratis, kekayaan

⁴⁶ Samuel H. Barnes, "Mass Participation in Five Western Democracies" dalam Thomas Meyer, *Op.Cit.*, h. 36

bukanlah indikator suatu negara demokratis. Mengutip pendapat dari **Boediono** berdasarkan studinya menyimpulkan,

“...berdasarkan pengalaman empiris selama 1950-1990, rezim demokrasi dengan penghasilan per kapita 1.500 USD (dihitung berdasarkan *purchasing power parity* tahun 2001) mempunyai harapan hidup hanya delapan tahun. Pada penghasilan per kapita diatas 6.000 USD, daya hidup sistem demokrasi jauh lebih besar dan probabilitas kegagalannya hanya 1: 500.”⁴⁷

Kesejahteraan masyarakat pada umumnya menjadi faktor utama untuk menentukan suatu negara itu demokratis atau tidak. Dengan kata lain, apabila suatu negara ingin hidup demokratis, maka negara tersebut harus dapat melewati dari status negara miskin dalam pertumbuhan ekonomi. Alasan mengapa faktor ekonomi menjadi salah satu faktor utama bagi status suatu negara demokrasi yaitu *pertama*, bahwa pertumbuhan ekonomi akan dapat mencerdaskan masyarakat dan masyarakat yang cerdas merupakan salah satu kriteria bahkan syarat suatu masyarakat demokratis; *kedua*, pertumbuhan ekonomi juga dapat menimbulkan proses urbanisasi yang dianggap sebagai indikator pra-kondisi keberhasilan demokratisasi.⁴⁸

Demokrasi dipandang sebagai sebuah proses, merupakan peralihan atau transisi negara dari bentuk kekuasaan otoriter menjadi demokrasi. Pengalaman berbagai masyarakat yang melakukan demokratisasi di lingkungan otoriterisme menunjukkan bahwa umumnya transisi itu berlangsung dalam suasana mobilisasi dan ketidaksabaran. Bahkan cenderung dengan melakukan kekerasan bersifat revolusioner. **O'Donnel** dan **Schmitter** mengemukakan definisinya mengenai transisi politik demokrasi yaitu,

⁴⁷ Abdul Hadi Adnan. 2008. *Perkembangan Hubungan Internasional di Afrika*, Bandung, CV. Angkasa, h. 11

⁴⁸ Azyumardi Azra, *Op.Cit.*, h. 53

Transisi demokrasi berarti fase peralihan atau perubahan dari suatu fase tertentu ke fase yang lain yang tak sama dengan fase pertama. Konkritnya, transisi demokrasi diartikan sebagai fase peralihan rezim politik dari tipe otoriter menuju rezim politik pasca otoriter.⁴⁹

Untuk memahami pola-pola transisi berdasarkan pengalaman demokratisasi di dunia, **Samuel Huntington** mengajukan beberapa pendapatnya. Huntington mengemukakan empat pola transisi, yaitu (1) pola transformasi, dimana elit penguasa mengambil prakarsa memimpin upaya demokratisasi; (2) pola “*replacement*”, dimana kelompok oposisi memimpin perjuangan menuju demokrasi; (3) pola “*transplacement*” dimana demokratisasi berlangsung sebagai akibat negosiasi dan *bargaining* antara pemerintah dengan kelompok oposisi; (4) pola intervensi, pola yang jarang terjadi yaitu dimana lembaga-lembaga demokratis dibentuk dan dipaksakan berlakunya oleh aktor dari luar.⁵⁰

Beberapa sistem politik berhasil dalam proses transisi demokrasi, tapi ada pula beberapa di antaranya yang melaluinya (transisi demokrasi) dengan penuh gejolak bahkan berada dalam ancaman keruntuhan nasional. Beberapa negara Eropa Timur lebih berhasil melalui masa-masa transisi demokrasi dengan sukses yang ditandai dengan pelaksanaan pemilu bebas yang diikuti banyak partai. Tapi untuk kasus Uni Soviet, agaknya berjalan lain, yaitu transisi demokrasi yang dipelopori dengan munculnya ide-ide radikal tentang keterbukaan dan restrukturisasi politik dari presiden Michael Gorbachev menghasilkan Uni Soviet yang terpecah-pecah ke dalam ikatan-ikatan negara-negara etnik.

Terlepas dari berhasil tidaknya sebuah transisi politik, fase transisi yang paling menentukan adalah “konsolidasi demokrasi” setiap kelompok masyarakat

⁴⁹ Moechtar Mas’oed, *Op.Cit.*, h. 28

⁵⁰ *Ibid.*, h. 30

sipil di negara tersebut. **Kris Nugroho** dalam jurnalnya berjudul **Konsolidasi Demokrasi dan Masa Depan Politik Indonesia**⁵¹ memberikan pendapatnya tentang konsolidasi demokrasi yaitu,

Konsolidasi Demokrasi adalah proses penggabungan beberapa elemen demokrasi untuk bersama-sama secara padu memfasilitasi demokratisasi politik. Unsur yang terlibat dalam konsolidasi demokrasi adalah lembaga atau institusi politik, baik partai politik, elite, kelompok-kelompok kepentingan mau pun masyarakat politik.

Unsur penting lainnya dalam konsolidasi demokrasi adalah adanya kesepakatan bersama menyangkut nilai-nilai politik yang bisa mendekatkan dan mempertemukan berbagai elemen politik di atas menjadi suatu kekuatan yang relatif terpadu selama transisi menuju demokrasi.

Masa transisi sangatlah kritis sebab tak ada jaminan bahwa proses transisi akan selalu menghasilkan rezim demokratis. Pergolakan-pergolakan internal yang disebabkan faktor-faktor ekonomi, budaya dan politik berpeluang menjadi ketidakpuasan massal yang mengancam kohesi sosial masyarakat. Begitu pula, sikap-sikap politik otoriter akan kembali lagi berkuasa bilamana kohesi rezim transisi lemah atau tidak kredibel secara politik sehingga mendorong kekuatan-kekuatan pro-rezim lama yang otoriter bangkit kembali. Suatu rezim politik sipil yang sedang mengalami transisi demokrasi dihadapkan pada dua pilihan. *Pertama*, menjalani transisi demokrasi dengan tingkat konsolidasi elite yang solid ke arah satu tujuan tercapainya demokratisasi politik; *kedua*, menjalani transisi demokrasi yang berliku-liku dengan tingkat kepaduan elite sangat rapuh, penuh konflik dan gejolak politik massa.⁵²

⁵¹ Kris Nugroho, "Konsolidasi Demokrasi dan Masa Depan Politik Indonesia", Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik, Volume 14 Nomor 2:25-34, h. 2

⁵² *Ibid.*, h. 5

C. Masa Depan/Proyeksi

Masa depan secara harfiah berdasarkan *Oxford Dictionary* memiliki arti “*an expectation of advancement or progressive development*”.⁵³ Berangkat dari makna tersebut, proyeksi terhadap masa depan merupakan masa dimana terdapat pengharapan terhadap pembangunan yang lebih baik dan maju dibandingkan masa sebelumnya. Upaya proyeksi terhadap pengamatan masa depan didukung dengan tinjauan sejarah, faktor kondisi terkini, dan potensi-potensi untuk mewujudkannya, tentu dari fenomena yang bersifat koheren dan direksional.⁵⁴ Tetapi perlu digarisbawahi, memproyeksikan masa depan merupakan aktivitas ilmiah dalam memprakirakan ataupun meramalkan, tidak selalu berada pada kondisi yang diinginkan terjadi sejak awal, sehingga dalam pengamatan terhadap sebuah masa depan selalu menyediakan *design* alternatif dengan meminimalkan pengabaian terhadap faktor yang substantif.

Walter S. Jones dalam bukunya **Logika Hubungan Internasional** menguraikan tentang “Tata Dunia Masa Depan”. Walter menjelaskan bahwa semangat utama dari para kelompok futuris adalah upaya pencarian alternatif sebagai sebuah *design* masa depan untuk menghilangkan segala bentuk kekacauan yang diciptakan oleh negara sebagai hasil dari interaksi politik internasional. Salah satu dimensi tantangan di masa depan yang ditekankan olehnya yaitu pemerintahan otokratis.⁵⁵

⁵³ _____, 2012, *Oxford Dictionary*. Diakses melalui <http://oxforddictionaries.com/definition/english/future> pada tanggal 15 Februari 2012 pukul 14.00 WITA.

⁵⁴ Fancis Fukuyama, 2004, *The End of History and The Last Man*, terj. M.H. Amrullah, Yogyakarta, Penerbit Qalam, h. 3

⁵⁵ Walter S. Jones, 1993, *Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan, Ekonomi – Politik Internasional, dan Tatanan Dunia 2*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, h. 483

Sejak dahulu setiap sistem politik sebuah negara memiliki filosofi pemerintahannya sendiri dan kualitas hubungan antara yang diperintah dan yang memerintah. Namun sistem politik yang menerapkan pemerintahan yang bersifat otoriter sudah dianggap tidak relevan di zaman sekarang dimana buta huruf nyaris tidak ada, komunikasi massa berkembang begitu baik, serta adanya kebebasan nasional dan protes domestik. Dengan karakter pemerintahan otoriter yang cenderung mengekang kebebasan dan tidak mampu menjamin pelaksanaan hak asasi manusia secara merata berdampak pada terancamnya kedamaian rakyat bahkan kedamaian dunia.

Menghadapi tantangan tersebut, demokrasi muncul sebagai konsep sistem pemerintahan yang dapat menjawab segala kekuarangan dalam pemerintahan otokratis. Fenomena “gelombang demokrasi” pada kurun waktu 1970-1990-an di Asia, Afrika, hingga Eropa Timur dan berbagai wilayah bekas Uni Soviet, menjadi bukti bahwa demokrasi merupakan *design future* yang sangat relevan dengan prinsip-prinsip kebebasan dan persamaannya. Gelombang demokratisasi belakangan kembali menguat pada tahun 2011 di kawasan Timur Tengah, mengingat sebelumnya berdasarkan laporan **The Freedom House New York** berjudul “Freedom in the World 2002: Democratisation Gap”, terdapat *democracy gap* yang besar di Dunia Arab dibanding di kawasan lainnya.⁵⁶ Selama kurun waktu tersebut, perkembangan demokrasi di kawasan ini mengindikasikan kemajuan yang kecil dalam keterbukaan politik, respek terhadap HAM, dan transparansi.

Beberapa negara Arab yang pada dasarnya merupakan aktor penting dan strategis di kawasan ini menerapkan sistem pemerintahan otokratis dalam berbagai

⁵⁶ Azyumardi Azra, *Op.Cit.*, h. 46

bentuk. Di antara negara mayoritas Arab tersebut, misalnya Tunisia yang secara tegas menggunakan sistem presidensial otoriter; Libya dan Irak yang menganut sistem diktator satu partai; Aljazair, Syria, Yaman, dan terakhir adalah Mesir bahkan merupakan negara dengan partai politik penguasa dominan yang melumpuhkan seluruh kekuatan oposisi dalam kemasan sistem demokrasi; dan sisanya merupakan negara yang menerapkan monarki absolut. Setidaknya terdapat beberapa faktor yaitu *pertama*, kelemahan dalam infra-struktur dan persyaratan dalam demokrasi yang mencakup tentang keterbelakangan ekonomi dan pendidikan serta maraknya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme; *kedua*, masih kuatnya pandangan normatif-teologis tentang kesatuan agama dan negara; *ketiga*, dominannya kultur politik tradisional yang berpusat pada kepemimpinan keagamaan kharismatis yang ditaklidi secara buta oleh sebagian umat islam; *keempat*, kegagalan negara-negara Arab tersebut dalam mengadopsi dan melakukan pendekatan terhadap demokrasi secara *genuine* dan otentik, yang mana tidak sedikit rezim-rezim tersebut di dukung oleh Amerika Serikat dan negara barat lainnya; dan *kelima*, lemahnya cenderung tidak berfungsinya *civil society*.⁵⁷

Gerakan revolusi yang terjadi di hampir seluruh negara di kawasan Timur Tengah menjadi *bright spot* terhadap masa depan demokrasi dunia Arab. Tetapi tantangan negara-negara tersebut bukan hanya menumbangkan rezim pemerintah otokratis, tetapi dalam upaya penegakan demokrasi banyak hal yang harus diselesaikan baik faktor-faktor yang memperlambat demokratisasi di kawasan tersebut maupun memaksimalkan konsolidasi demokrasi antara kekuatan-kekuatan politik dalam negara. Kondisi ini sangat relevan dengan fenomena gerakan revolusi

⁵⁷ *Ibid*, h. 47-50

di Mesir, sebuah negara yang rakyatnya menginginkan penegakan demokrasi yang lebih stabil.

Mesir pada dasarnya merupakan negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokratis terutama di masa kepemimpinan Hosni Mubarak. Namun, dalam prakteknya pemerintahan tersebut gagal menerapkan kebijakan-kebijakan demokratis dengan cenderung menggunakan pendekatan politik otoriter. Praktek pemenjaraan lawan politik, penahanan tanpa proses peradilan, eksploitasi ekonomi atas kaum minoritas yang tidak etis, serta berbagai pelanggaran lainnya terhadap hak asasi manusia terus berlangsung selama pemerintahan rezim tersebut. Semua hal tersebut dilakukan demi kepentingan rezim mempertahankan posisi mereka terhadap tekanan tuntutan kebebasan politik rakyatnya.⁵⁸

Berdasarkan kondisi politik dalam negeri yang terbangun di Mesir, oleh **Ronald F. Inglehart** dalam laporan **World Value Survey** menyebutkan terdapat 4 faktor yang akan mempengaruhi prediksi terhadap prospek masa depan demokrasi di negara tersebut.⁵⁹ *Pertama*, budaya politik dimana Mesir yang terbebas dari rezim otoriter membutuhkan pendidikan politik sehingga rakyat memiliki ruang untuk belajar nilai-nilai demokrasi yang esensial. *Kedua*, pembangunan ekonomi mengingat kemiskinan membuat pelaksanaan demokrasi tidak mudah. Persoalan ekonomi yang dialami rakyat harus menjadi fokus perhatian siapapun dari kelompok manapun. Mesir merupakan salah satu negara yang kaya dengan segala sumberdaya alamnya namun rakyat tidak menikmatinya karena monopoli kekuasaan oleh rezim dan kroninya.

⁵⁸ Walter S. Jones, *Op. Cit.*, h. 493

⁵⁹ Muhammad Affan, 2011, "Masa Depan Demokrasi di Timur Tengah", diakses melalui http://www.analisadaily.com/news/read/2011/10/15/17249/masa_depan_demokrasi_di_timur_tengah/ pada tanggal 16 Oktober 2011 pukul 15.00 WITA

Ketiga, struktur sosial masyarakat Mesir memiliki komposisi penduduk yang cukup heterogen berdasarkan perbedaan suku, partai politik, dan agama karena meskipun mayoritas Muslim ada banyak sekali mazhab di dalamnya. Komposisi heterogen itu dapat memunculkan instabilitas politik dan keamanan karena telah terjadi pelepasan partisipasi politik dan ekonomi. Pembunuhan terhadap lawan politik dan pemberontakan bersenjata merupakan contoh nyata akibat pelepasan partisipasi politik dan ekonomi kaum minoritas. Sementara di sisi lain, partai-partai kecil yang nasionalis juga akan memperebutkan kekuasaan politik secara proporsional.

Keempat, faktor eksternal dimana angin perubahan di negara-negara Muslim yang kini sedang bergerak ke sistem demokrasi dapat menjadi lingkungan eksternal yang kondusif bagi proses demokrasi. Namun, sayangnya angin perubahan ini juga akan diikuti kekerasan akibat konflik yang terus berkepanjangan. Konflik Palestina-Israel akan menjadi lingkungan eksternal yang kurang kondusif bagi pembangunan demokrasi. Selain itu, kepentingan negara-negara tetangga seperti Iran, Israel, dan Turki akan menjadikan masa depan demokrasi semakin sulit diprediksi.

Kelangsungan masa depan suatu sistem politik yang tengah mengalami transisi menuju demokrasi khususnya Mesir, sangat bergantung sekali pada keberhasilannya dalam melewati proses transisi menuju demokrasi politik secara stabil, damai atau non kekerasan. Bagaimanapun harus dipahami bahwa demokrasi merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan, bukan sesuatu yang *given*. Diperlukan proses panjang sehingga nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan menginternal dalam kehidupan masyarakat. Namun, adanya transisi politik secara damai akan memberi penekanan bahwa lembaga-lembaga politik yang ada beserta

elitenya baik pada lapisan elite mau pun pada lapisan masyarakat berada pada ketahanan yang tinggi dalam menghadapi perubahan-perubahan politik yang berlangsung beserta konsekuensi-konsekuensinya.

BAB III

REPUTASI KEKUASAAN PEMERINTAHAN HOSNI MUBARAK DAN MASA TRANSISI POLITIK MESIR

Mesir terletak di sudut Timur Laut benua Afrika dan sebagian kecil wilayahnya terletak di benua Asia, yaitu Semenanjung Sinai. Mesir berbatasan dengan dua lautan, yaitu di utara dengan Laut Tengah dan timur dengan Laut Merah, kedua lautan tersebut dihubungkan oleh Terusan Suez yang memisahkan benua Afrika dan Asia. Terusan yang pernah dikuasai oleh Israel dalam Perang Arab-Israel 1967 telah dikembalikan kepada Mesir bersamaan dengan ditarik mundurnya tentara pendudukan Israel dari Semenanjung Sinai pada tahun 1978 dan bersamaan itu Terusan Suez kembali dikuasai oleh Mesir. Hal ini bukan saja merupakan sumber penghasilan negara bagi Mesir, melainkan juga memberikan arti geopolitik yang penting bagi Mesir dalam percaturan politik regional dan internasional. Negara-negara yang berbatasan langsung dengan Mesir adalah Sudan di selatan, Lybia di barat, dan Palestina di utara (Jalur Gaza).

Luas wilayah Mesir sekitar 1.020.000 km², sedangkan daerah yang dihuni oleh penduduknya hanya seluas kurang lebih 40.000 km² atau 3,6% dari seluruh wilayahnya. Dari seluruh jumlah penduduk ini, sekitar 25% bermukim di Kairo dan selebihnya tersebar di berbagai kota dan desa khususnya di sepanjang Sungai Nil. Bagi Mesir, Sungai Nil sejak masa Fir'aun merupakan sumber utama untuk kehidupan masyarakat dan budayanya. Sampai sekarang masih diingat ucapan Herodotus yaitu *Egypt is the gift of the Nile* yang berarti bahwa eksistensi Mesir adalah berkat dari Sungai Nil.⁶⁰

⁶⁰ Sukanta, 2007. *Konflik Tak Berujung Mengupas Konflik dan Interdependensi Mesir-Sudan dalam Perspektif Teori Hubungan Internasional*, Jakarta, Teraju Mizan, h. 34

Penduduk Mesir berjumlah 83 juta jiwa (sensus 2012) dengan tingkat pertumbuhan mencapai 2% dan persebaran penduduknya yang tidak merata, sehingga banyak daerah hunian berkepadatan tinggi dengan Kairo sebagai daerah hunian terpadat. Hampir seluruh populasi terpusat di sepanjang Sungai Nil, terutama Iskandariyah dan Kairo, sepanjang Delta Nil serta dekat Terusan Suez. Mayoritas penduduk Mesir beragama Islam yaitu sebanyak 90% dan sisanya beragama Kristen, terutama Kristen Koptik yang bernaung dibawah pimpinan seorang Paus yang berkedudukan di Mesir sebanyak 9%, serta sebagian kecil penganut agama Kristen Ortodoks Yunani, Ortodoks Armenia, Protestan, dan Katolik Roma.⁶¹

Pusat ibukota Mesir ada di Kairo atau lebih dikenal dengan sebutan Daerah Kairo Raya memiliki penduduk sekitar 16 juta jiwa. Kota ini adalah kota terbesar di benua Afrika dan juga Timur Tengah. Bahkan, Kairo Islam, salah satu daerah di Kairo merupakan sebuah warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO mulai tahun 1979.⁶² Selain itu, Iskandariyah merupakan salah satu kota terbesar lainnya di Mesir dimana kedua kota ini menguasai 60% perusahaan dagang, 70% perusahaan jasa, 50% gudang, dan 45% perbankan. Kedua kota ini merupakan daya tarik yang kuat bagi sebagian penduduk desa untuk berurbanisasi guna mendapat pekerjaan.⁶³

Mesir dibagi menjadi 27 wilayah administratif/governorat (muhafazat; tunggal-muhafazah), yakni:

⁶¹ _____, 2012, "Afrika: Egypt", diakses melalui <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html> pada tanggal 15 Februari 2012 pukul 01.00 WITA

⁶² David A. Ricardo, *Op.Cit.*, h. 21

⁶³ Sukanta, *Op.Cit.*, h. 42

Kota	Provinsi	Kota	Provinsi
1. Kairo	Kairo	14. Zagazig	Al-Sharqia
2. Alexandria	Alexandria	15. Damietta	Damietta
3. Giza	Giza	16. Aswan	Aswan
4. Shubra el-Kheima	Qalyubia	17. Minya	Minya
5. Port Said	Port said	18. Damanshour	Beheira
6. Suez	Suez	19. Beni Suef	Beni Suef
7. Luxor	Luxor	20. Hurghada	Red Sea
8. Mansoura	Dakahlia	21. Kafr el-Sheikh	Kafr el-Sheikh
9. El-Mahalla El-Kubra	Gharbia	22. Mersa Matruh	Matruh
10. Tanta	Gharbia	23. Arish	North Sinai
11. Asyut	Asyut	24. Banha	Qalyubia
12. Ismailia	Ismailia	25. Qena	Qena
13. Faiyum	Faiyum	26. Sohag	Sohag
		27. el-Thor	South Sinai

Tabel 2. *Daftar Nama Kota dan Provinsi di Mesir*⁶⁴

Posisi Mesir secara geografis pada dasarnya memudahkan terjadinya interaksi antar budayanya dengan lingkungan budaya lainnya di kawasan Laut Tengah, khususnya Yunani dan Romawi kuno yang merupakan pusat budaya dengan pengaruh yang kemudian meluas sebagai peradaban dan kebudayaan Eropa. Di Mesir terdapat juga peninggalan masa pendudukan Romawi seperti terlihat pada berbagai peninggalan di kota Alexandria. Masuknya agama Kristen di Mesir pada abad pertama membawa pengaruh tersendiri, dan sejak itu Mesir dengan gereja-gerejanya yang khas pun menjadi salah satu pusat penyebaran agama Kristen di Afrika.

⁶⁴ _____, 2011, "Largest cities and towns of Egypt", diakses melalui <http://countrystudies.us/egypt/57.html> pada tanggal 21 Agustus 2011 pukul 13.00 WITA

Sekitaran tiga abad kemudian agama Islam memasuki Mesir dan sejak itu penyebarannya meluas bukan saja dalam negeri Mesir, melainkan ke sepanjang wilayah Afrika Utara. Perkembangan Islam itu telah memberi corak khas pula pada kebudayaan yang berkembang di Mesir dan sekitarnya, khususnya corak budaya Arab. Sejak masa itu Mesir bukan saja menjadi salah satu pusat perkembangan budaya Arab, melainkan juga menjadi pusat penyebaran agama Islam yang juga ditandai dengan didirikannya Universitas Al-Azhar yang berwawasan Islam.⁶⁵

Agama memiliki peranan besar di negara Mesir. Secara tak resmi, adzan yang dikumandangkan lima kali sehari menjadi penentu berbagai kegiatan. Kairo juga dikenal dengan berbagai menara masjid dan geraja. Menurut konstitusi Mesir, semua perundang-undangan harus sesuai dengan hukum Islam yang ditunjukkan dengan penggunaan mazhab Hanafi lewat Kementrian Agama. Imam dilatih disekolah keahlian untuk imam dan di Universitas al-Azhar memiliki komite untuk memberikan fatwa untuk masalah agama.⁶⁶

Titik sejarah budaya politik Mesir khususnya gerakan massa menuntut adanya perubahan melalui revolusi dimulai pasca Perang Dunia I. Saad Zaghlul muncul sebagai pemimpin di Mesir yang berusaha dan berjuang untuk menuntut kemerdekaan Mesir dari Inggris yang berujung pada kebijakan Inggris untuk menangkap Saad Zaghlul dan kelompoknya serta mengasingkannya ke Malta pada 8 Maret 1919. Penangkapan dan pengasingan ini membangkitkan kemarahan rakyat Mesir sehingga pada 9 Maret 1919 terjadilah revolusi besar menentang Inggris di Kairo dan seluruh penjuru Mesir.⁶⁷

⁶⁵ Riza Sihbudi dkk, 1995, *Profil Negara-Negara Timur Tengah Buku Satu*, Jakarta, Dunia Pustaka Jaya, h. 147

⁶⁶ David A. Ricardo, *Op.Cit.*, h. 20

⁶⁷ *Ibid.*, h. 25

Kejadian ini merupakan revolusi modern pertama kali yang terjadi di Mesir yang lebih dikenal dengan **Revolusi Mesir 1919**.

Kehidupan politik di Mesir kembali tidak stabil pada masa Raja Farouk akibat merajalelanya korupsi dan kemewahan dikalangan pejabat negara. Kekuasaan raja sangatlah luas termasuk dalam menentukan pengangkatan pejabat, kontrak pemerintah, bermacam kebijakan penjualan tanah negara, dan lain-lain. Selain itu, penjajahan Inggris yang panjang dan campur tangan asing yang merajalela serta rentetan perang Palestina 1948, ditambah lagi sistem kerajaan yang menindas rakyat dan tidak adanya demokrasi yang mengakibatkan merosotnya ekonomi serta rusaknya kehidupan sosial. Faktor tersebut memaksa rakyat Mesir untuk melakukan revolusi yang sangat dikenal dengan sebutan **Revolusi Mesir 1952**. Kondisi ini mendorong sebagian perwira yang menamakan diri *Dubbath Al-Ahrar* dibawah pimpinan Gamal Abdul Nasser untuk merubah dan memperbaiki situasi di Mesir. Pada Juli 1952, pasukan Nasser bergerak menguasai pusat-pusat pemerintahan dan sarana-sarana vital lainnya, serta mengepung Istana Abdeen. Lalu mereka mengeluarkan siaran di radio yang mengumumkan pengambil alihan kekuasaan di Mesir.⁶⁸

Mesir yang ketika itu diperintah oleh Raja Farouk dipaksa menyerahkan jabatan ke anaknya, Fouad II. Berhubung Fouad II belum cukup dewasa, maka kekuasaan dipegang junta yang dibentuk oleh *Dubbath Al-Ahrar*. Tapi mereka melihat bahwa sistem kerajaan tidak cocok lagi dengan kehidupan rakyat Mesir. Akhirnya mereka mengumumkan berdirinya sistem negara Republik pada 18 Juni 1953, dan Jenderal Muhammad Naguib terpilih sebagai presiden pertama sampai tahun 1954. Setelah melewati perjuangan panjang, akhirnya tentara Inggris berhasil dipaksa keluar dari

⁶⁸ Riza Sihbudi dkk, *Op. Cit.*, h. 150

Mesir. Penarikan terakhir tentara Inggris keluar dari Mesir dilakukan pada tanggal 18 Juni 1956 dan setiap tanggal tersebut menjadi peringatan hari besar yang setiap tahunnya sebagai '*Iedul Galaa (Evacuation Day)*'.⁶⁹

Menjelang akhir tahun 1954, setelah perjuangan internal dikalangan tentara Mesir, Jenderal Naguib digeser dan Nasser muncul sebagai penguasa tertinggi Mesir. Ketika diadakan referendum, Nasser terpilih sebagai satu-satunya calon presiden dengan memperoleh 99,8% suara. Langkah berikutnya adalah menekan kemungkinan oposisi yang tidak menyukainya dan hingga pada tahun 1955, terdapat 3000 tahanan politik dibawah kepemimpinan Nasser.⁷⁰

Revolusi Mesir 1952 menjadi aksi gerakan yang mengindikasikan ketidakstabilan politik dalam negeri dan harapan perubahan Mesir dari dulu hingga saat ini. Dalam peralihan tampuk kekuasaan kepala negara Mesir, meskipun tidak selalu ditandai dengan aksi revolusi tapi selalu didasari suasana dan rasa ketidakpuasan rakyat terhadap pemimpin tersebut yang memicu terjadinya situasi krisis dalam negeri. Peralihan kepemimpinan dari Nasser ke Anwar Sadat atas ketidakpercayaan publik terhadap Nasser, hingga terbunuhnya Anwar Sadat yang kemudian pemerintahan diambil alih oleh wakilnya Hosni Mubarak yang memimpin negara tersebut kurang lebih selama 30 tahun.

Budaya revolusi Mesir kembali terulang pada tahun 2011 dengan dituntutnya Presiden Hosni Mubarak untuk segera mengundurkan diri dari jabatan kepemimpinannya di negara tersebut. Dalam rentan waktu yang cukup lama setelah revolusi yang terakhir kali terjadi, akhirnya rakyat bersatu dan kembali berani bangkit melawan pemerintah. Revolusi ini merupakan revolusi terbesar sepanjang catatan

⁶⁹ David A. Ricardo, *Op. Cit.*, h. 28

⁷⁰ *Ibid.*, h. 29

sejarah negara tersebut yang dikenal dengan Revolusi 25 Januari. Selanjutnya akan dijelaskan tentang reputasi kekuasaan Presiden Hosni Mubarak serta kebijakan-kebijakan baik dibidang politik maupun ekonomi sebagai akibat keterpurukan Mesir sekaligus faktor pendorong terjadinya revolusi oleh rakyat. Setelah itu akan dipaparkan tentang dinamisasi transisi politik yang telah terjadi pasca revolusi.

A. Reputasi Kekuasaan Pemerintahan Hosni Mubarak

Hosni Mubarak memiliki nama lengkap Muhammad Hosni Said Mubarak, lahir di Kafr-El Meselha, Al Monufiyah 84 tahun yang lalu tepatnya pada tanggal 4 Mei 1928. Pasca Revolusi Mesir, beliau kini berstatus mantan Presiden Mesir yang menjabat dalam periode tanggal 14 Oktober 1981 hingga 11 Februari 2011. Mubarak terakhir kali terpilih untuk kelima kalinya dibawah sistem pemilu presiden multi kandidat pertama di negara tersebut pada bulan September 2005, setelah sebelumnya pemilihan presiden berasal dari calon tunggal, dan melalui referendum parlemen.⁷¹ Berdasarkan periode kepemimpinannya sejak perubahan dari sistem kerajaan ke republik, Mubarak menjadi salah satu presiden terlama di Mesir dibanding pendahulunya yaitu Muhammad Naguib 2 tahun (1953-1954), Gamal Abdul Nasser 16 tahun (1954-1970), dan Anwar Sadat 11 tahun (1970-1981).

Hosni Mubarak kali pertama menjadi presiden negara tersebut pasca tujuh hari kematian Anwar Sadat, presiden sebelumnya. Anwar Sadat terbunuh pada 6 Oktober 1981 oleh kelompok radikal ketika menyaksikan parade militer peringatan Hari Pahlawan di depan tugu *Jundul Majhul* di *Nasr City*, Kairo. Hosni Mubarak selaku wakil presiden saat itu berhak mengambil kedudukan presiden secara konstitusional sebagai hasil sidang darurat gabungan Majelis *Al-Sya'ab* dan Majelis

⁷¹ Sukanta, *Op. Cit.*, h. 39

Al-Syuura.⁷² Selama menjabat, tercatat sepuluh kali Mubarak berhasil lolos dari percobaan pembunuhan atau *assassination* sehingga ia dikenal dengan sebutan *Egyptian Politics Great Survivor*.⁷³

Mubarak menikah dengan Suzanne Mubarak yang dikaruniai dua putra, Alaa Mubarak dan Gamal Mubarak. Alaa dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses di Mesir, sementara Gamal membina karir politik dibawah naungan partai Ayahnya, *National Democratic Party*. Gamal mendapat julukan sebagai sebagai “Putra Mahkota” yang sedianya dipersiapkan mengganti posisi Mubarak selanjutnya.⁷⁴

Berikut merupakan riwayat karir Hosni Mubarak baik dalam negeri maupun luar negeri selama berkuasa di Mesir,

⁷² _____, 2011, “Egypt Country Profile”, diakses melalui <http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12433045> pada tanggal 1 Maret 2011 pukul 20.00 WITA.

⁷³ _____, 2011, “Profile : Egyptian President Hosni Mubarak”, diakses melalui http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-02/11/c_13726572.htm pada tanggal 28 Februari 2011 pukul 17.00 WITA

⁷⁴ David A. Ricardo, *Op. Cit.*, h. 31

No.	Kurun Waktu Tahun	Jabatan Politik
1.	1952-1959	<i>Lecturer</i> untuk Pengetahuan Aviation di Akademi Angkatan Udara
2.	1964	Bergabung dengan Akademi Militer FROUNZ dan menjadi Komandan Pangkalan Angkatan Udara Barat Kairo
3.	1968	Menjabat Direktur Akademi Angkatan Udara
4.	1969	Kepala Staf Angkatan Udara
5.	1972	Komandan Angkatan Udara dan wakil Menteri Pertahanan
6.	1974	Promosi jabatan Letnan Jenderal
7.	1975-1981	Wakil Presiden Republik Arab Mesir
8.	1979	Wakil Presiden <i>National Democratic Party</i>
9.	1981-1987	Presiden Republik Arab Mesir
10.	1982	Presiden <i>National Democratic Party</i>
11.	1987-1993	Terpilih kembali sebagai Presiden Republik Arab Mesir
12.	1989-1990	Ketua <i>Organization of Africa Unite</i> , OAU
13.	1993	Kembali terpilih sebagai Presiden Republik Arab Mesir
14.	1993-1994	Terpilih kembali sebagai Ketua <i>Organization of Africa Unite</i> , OAU
15.	1996	Ketua Umum Arab Summit
16.	1999	Kempat kalinya, terpilih sebagai Presiden Republik Arab Mesir
17.	1998-2002	Ketua Umum G-15
18.	2005	Presiden Republik Arab Mesir

Tabel 3. *Riwayat Karir Hosni Mubarak*^{75 76}

⁷⁵ _____, 2001, "Hosni (Muhammad) Mubarak (1928-)", diakses melalui <http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsourc/biography/Mubarak.html> pada tanggal 5 Juli 2011 pada pukul 21.00 WITA

⁷⁶ _____, 2011, "Air Marshal Mohammed Hosni Mubarak", diakses melalui <http://www.mmc.gov.eg/Academies/AFA/Aa10.htm> pada tanggal 23 Desember 2011 pukul 14.00 WITA

1. Sistem Politik Pemerintahan Otoriter dan *Dynastic Republicanism*

Pasca revolusi 1952 Mesir secara resmi menjadi sebuah negara republik dan konsisten menerapkan pola-pola demokratis dalam sistem politiknya. Dibawah konstitusi 1971, seorang Presiden yang dipilih setiap enam tahun sekali membentuk sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang secara khusus mengusulkan rancangan perundang-undangan kepada lembaga parlemen yaitu Majelis Shaab dan Mejlis Shoura. Namun banyak pengamat mengatakan bahwa Mesir dibawah kepemimpinan Mubarak terkenal penerapan sistem otoriter yang dikuasai oleh satu partai berkuasa yang didukung oleh kekuatan militer.

Pola dan praktek otoriter Mubarak dalam sistem politik pemerintahan di Mesir semakin terasa kuat pada kurun waktu 1990-an. Terdapat dua faktor utama Mubarak mampu berkuasa secara luas, yaitu berada dalam naungan partai berkuasa *National Democratic Party* sebagai ketua umum partai tersebut, Hosni Mubarak menikmati kedudukan sebagai presiden berkuasa sekaligus menempatkan 90% perwakilannya di parlemen; dan pemberlakuan Undang-Undang Darurat Negara sejak tahun 1981 pasca kematian Anwar Sadat yang berintikan pelegalan terhadap penangkapan dan penahanan tanpa proses peradilan terhadap mereka yang dianggap teroris dan mengancam keamanan nasional, dimanfaatkan secara maksimal untuk menyingkirkan kelompok-kelompok oposisi yang berpotensi sebagai penentang rezim yang mengancam kekuasaan mereka. Kedua faktor tersebut semakin diperkuat dengan beberapa perubahan konstitusi yaitu Hukum Berserikat 1993 dan Hukum Organisasi Non-Pemerintah 1999 terkait pembatasan hak-hak sipil dan politik; Hukum Kepartaian 1992 tentang perizinan dan pendanaan pembentukan partai baru, hal ini memberikan peluang untuk menolak pembentukan

partai yang dianggap ancaman dalam kekuasaan politik yang dimiliki oleh rezim; dan Hukum Pers 1995 yang secara signifikan membatasi kebebasan gerak kerja pers dalam negeri.⁷⁷

Memiliki wewenang terhadap pemberlakuan ragam pembatasan hak-hak politik tersebut memberikan dampak keleluasaan pemerintah untuk campur tangan dalam proses-proses pemilihan melalui kecurangan, represi, dan intimidasi. Tercatat pemilihan parlemen pada tahun 1990, 1995, 2000, 2005, dan yang terakhir 2010 memberikan hasil yang tidak jauh berbeda yaitu kemenangan mutlak terhadap partai NDP. Pemilihan parlemen 1995 merupakan puncak dugaan keterlibatan langsung rezim penguasa dalam kecurangan pemilu yang menghasilkan kemenangan mutlak bahkan 150 kandidat dari Ikhwanul Muslimin sebagai independen dan Partai Buruh tidak memenangkan satu kursipun di parlemen.⁷⁸

Mesir memulai dinamisasi terhadap perkembangan kehidupan politik dalam negeri pada kurun waktu 2000-an. Pemerintah mendapat protes intensif dari kelompok oposisi yang terdiri dari Gerakan *Kifayah*, *The Judges Club*, Partai al-Ghad, dan Ikhwanul Muslimin dengan tuntutan yaitu reformasi politik termasuk amandemen konstitusi terkait pemilu presiden kompetitif; pencabutan UU Darurat Negara; pemberian keleluasan terhadap aktivitas kepartaian, pembentukan organisasi masyarakat sipil, dan media; serta sebuah proses pemilihan yang jujur dan adil.⁷⁹ Sebagai respon dari tuntutan tersebut meskipun terbatas, diadakan konsensus dan amandemen konstitusi 1971 no. 76 yang menghasilkan keputusan

⁷⁷ Maria Cristina Paciello, May 2011, "Egypt: Changes and Challenges of Political Transition", MEDPRO Technical Report No. 4/May 2011, h. 2

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

mengizinkan pemilu presiden 2005 dilakukan secara langsung dan multikandidat untuk pertama kalinya.

Pemilihan Umum Parlemen dan Presiden Mesir yang dilakukan pada November 2005 dianggap menjadi titik pembaharuan demokratisasi di negara tersebut. Hal ini dikarenakan dalam pemilu tersebut melibatkan 5.310 calon dari multi partai untuk memperebutkan 444 kursi di parlemen. Disamping itu, berdasarkan amandemen konstitusi, syarat menjadi seorang calon presiden adalah mendapat persetujuan dari 250 anggota majelis terpilih dari berbagai tingkatan, sudah termasuk 25 anggota parlemen Majelis Shoura yang komposisinya terdiri dari anggota partai berkuasa; serta calon kandidat merupakan utusan dari partai dan harus merupakan salah satu anggota dewan tertinggi partai pengusung setidaknya dalam satu tahun terakhir; untuk pemilihan berikutnya partai tersebut setidaknya menempatkan salah satu anggota dalam majelis parlemen terhitung sejak tanggal 1 Mei 2007.⁸⁰ Akhirnya semua partai yang berhak mencalonkan seorang kandidat adalah harus merupakan partai yang telah aktif dan legal selama lima tahun berturut-turut sebelum tanggal dimulai pencalonan.

Amandemen konstitusi awalnya menjadi semangat pembaharuan di Mesir. Namun setelah mencermati aturan dan batasan yang lebih spesifik dari amandemen tersebut, membuat kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilu presiden ternyata sangat sulit. Meskipun bersama sembilan kandidat lainnya, praktis hanya **Ayman Nour**⁸¹ selaku ketua umum Partai **Al-Ghad** yang mampu bersaing dalam pemilu

⁸⁰ Jeremy M. Sharp, *Op. Cit.*, h. 5

⁸¹ Ayman Nour bernama lengkap Ayman Abd El Aziz Nourini, adalah politisi dan negarawan berusia 48 tahun. Beliau merupakan anggota parlemen pada tahun 2003 dan Ketua Umum Partai Al Ghad yang berusaha mendobrak tembok kokoh politik rezim Mubarak. Ayman mencuri perhatian dunia ketika pada 2005 ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah atas tuduhan memalsukan dokumen saat mendirikan

presiden. Ayman Nour menempati urutan kedua dengan perolehan suara 7% dan Mubarak menjadi presiden untuk kelima kalinya dengan perolehan 87% sekaligus memimpin Mesir hingga tahun 2011.⁸²

Ikhwanul Muslimin secara tidak terduga memperoleh hasil yang baik dalam pemilu parlemen 2005 tersebut melalui jalur independen. Menempatkan 88 kandidatnya dalam parlemen merupakan pencapaian tertinggi dibandingkan dengan kelompok oposisi lainnya sekaligus menjadi kewaspadaan tersendiri untuk rezim pemerintah Mubarak, sebagaimana diketahui bahwa Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi yang tidak diakui dan dilarang semasa rezim Mubarak. Keberhasilan Ikhwanul Muslimin menjadi alasan rezim melakukan kebijakan deliberalisasi politik kembali seperti menindak keras kelompok oposisi dan protes massa, khususnya para anggota Ikhwanul Muslimin; menunda pemilu di daerah/kota yang dijadwalkan April 2006 sebagai upaya menghindari keberhasilan lain dari Ikhwanul Muslimin; dan yang terakhir adalah memperpanjang pemberlakuan UU Darurat Negara. Rezim Mubarak kemudian memperkuat kebijakan tersebut dengan memperkenalkan amandemen baru tentang pembatasan terhadap aspek kebebasan politik seperti meniadakan peran pengadilan sebagai pengawas dalam pemilu; memperkuat kekuasaan presiden untuk membubarkan parlemen tanpa sebuah referendum terlebih dahulu; pelarangan keras terhadap partai agama sebagai upaya membatasi Ikhwanul Muslimin untuk membentuk partai; dan memberikan Mubarak kekuasaan untuk menuduh masyarakat sipil yang terduga sebagai pelaku serangan teror untuk diadili dalam pengadilan militer.⁸³

partainya. Sebelumnya juga, Mubarak pernah memenjarakan Ayman Nour atas tuduhan korupsi, meski kemudian dibebaskan karena tidak mendapat cukup bukti. Lihat David A. Ricardo, *Op.Cit.*, h. 119

⁸² Maria Cristina Paciello, *Op. Cit.*, h.3

⁸³ *Ibid.*

Meningkatkan pembatasan terhadap kebebasan politik dilakukan rezim bersama aparat kepolisian melalui penangkapan dan penahanan masyarakat sipil memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan jumlah partisipan kelompok oposisi dalam kehidupan politik Mesir. Dalam pemilu Dewan Shoura 2007, Ikhwanul Muslimin bahkan tidak memenangkan satu kursipun dan berusaha memboikot segala aktivitas pemilu di negara tersebut. Hal ini setelah banyak dari calon kandidat mereka dari partai oposisi legal dicegah untuk mendaftarkan diri dalam pemilu daerah/kota tahun 2008.⁸⁴

Pemilu Parlemen Mesir 2010 menjadi keberlanjutan politik otoriter Mubarak di negara tersebut. Partai NDP kembali memenangi pemilu dengan hasil mutlak 96% suara untuk memperebutkan kursi di parlemen. Hal yang telah diperkirakan, kelompok Ikhwanul Muslimin yang sebelumnya menempatkan sebanyak 88 kursi untuk perwakilannya di parlemen, tidak memperoleh suara yang cukup bahkan untuk menempatkan satu perwakilannya di parlemen. Berdasarkan pencapaian tersebut pula, Ikhwanul Muslimin sebagai oposisi tidak akan mampu untuk ikut bersaing dalam pemilu presiden yang direncanakan berlangsung pada September 2011 sesuai apa yang diamanatkan oleh konstitusi. Sama halnya dengan kelompok-kelompok oposisi lainnya, akhirnya Pemilu Presiden selanjutnya akan kembali menempatkan calon tunggal kuat meskipun Mubarak dan partainya belum memberikan pernyataan resmi tentang sosok yang akan diajukan, namun mudah untuk memperkirakan hasilnya bila pemilu presiden dilaksanakan.

Kelompok Ikhwanul Muslimin merasakan adanya kecurangan dalam hasil pemilu tersebut dan akan memboikot rangkaian pemilu selanjutnya. Menurut

⁸⁴ *Ibid.*, h. 4

mereka, pemerintah telah melakukan kecurangan berupa pengrusakan surat suara dengan berbagai tuduhan terhadap pemilih pendukung Ikhwanul Muslimin yang diyakini berjumlah 25% dari total pemilih Mesir.⁸⁵ Dalam usahanya bersama Partai New Wafd melakukan pemboikotan dan gabungan aksi protes terhadap pemerintah, ternyata telah terjadi penangkapan terhadap para anggota Ikhwanul Muslimin melebihi dari 1.000 anggota termasuk delapan kandidat parlemen bahkan sebelum pemilu parlemen putaran kedua. *Amnesty International* bahkan mengeluarkan laporan bahwa pemerintah Mesir berusaha mengkooptasi dan membungkam kelompok oposisi, namun pemerintah menyangkal tuduhan tersebut dengan mengemukakan alasan penggunaan slogan-slogan agama sebagai dasar berbagai tindakan penangkapan tersebut.⁸⁶

Hosni Mubarak dalam masa kekuasaannya tidak hanya bersikap otoriter namun juga terindikasi adanya upaya membangun sebuah politik dinasti dalam sebuah negara. Politik dinasti atau juga biasa disebut *dynastic republicanism*, merupakan cara dari rezim penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya melalui pembentukan sosok generasi atau suksesor dalam lingkaran keluarga dan kelompok elit yang akan terus melanjutkan kepemimpinan kekuasaannya. Pada dasarnya dalam konstitusi Mesir saat itu tidak mengatur tentang pembatasan periodik untuk seseorang terpilih kembali menjadi seorang presiden, bahkan terkait tentang kesehatan seorang calon presiden sekalipun sehingga banyak yang mempercayai bahwa Mubarak akan tetap mencalonkan diri dalam setiap pemilu presiden sesuai pernyataannya “*serve until the last breath in my lungs, and the last beat of my*

⁸⁵ Jeremy M. Sharp, *Op. Cit.*, h. 6

⁸⁶ David A. Ricardo, *Op.Cit.*, h. 4

heart".⁸⁷ Namun ditengah kondisi kesehatan Mubarak yang semakin menurun diikuti dengan tidak adanya indikasi terhadap publik kemungkinan dirinya kembali mencalonkan dalam pemilihan selanjutnya, Gamal Mubarak yang merupakan anak dari Hosni Mubarak muncul sebagai calon kuat melanjutkan kepemimpinan ayahnya.

Karir politik Gamal Mubarak cukup cemerlang dalam satu dekade terakhir khususnya dalam struktur partai berkuasa NPD. Tahun 2010, Gamal sudah menjabat sebagai Sekertaris Jenderal partai NDP dan memperoleh dukungan lebih dari 50 anggota dewan tertinggi partai tersebut yang mampu mendukungnya sebagai wakil utama dari partai dalam pemilihan presiden mendatang.⁸⁸ Selain itu, meskipun tidak pernah menjabat sebagai pejabat negara, Gamal pernah menemani ayahnya dalam dua kali kunjungan resmi kenegeraan di Washington DC khususnya pada September 2010 ketika Mesir ingin melakukan pembicaraan awal dalam negosiasi perdamaian Israel-Palestina.

Gamal Mubarak menjadi tokoh sentral sekaligus simbol elit korporasi Mesir dalam pembangunan ekonomi dalam negeri. Gamal terus melakukan kampanye mengenai keberhasilan reformasi kebijakan-kebijakan ekonomi dan dalam satu dekade terakhir, bersama aliansi politik dan gabungan perusahaan di Mesir telah berhasil meningkatkan kesuksesan khususnya memacu pertumbuhan ekonomi makro. Selain itu, Mesir yang memiliki hubungan baik dengan Israel sekaligus berhasil memberantas kelompok ekstrimis Islam pada akhir 1990-an menjadi salah satu pertimbangan kelompok pengusaha untuk mendukung Gamal Mubarak sebagai sosok yang mendukung kebijakan privatisasi dibanding sosok pemimpin dari

⁸⁷ Jeremy M. Sharp, *Op. Cit.*, h. 7

⁸⁸ *Ibid.*

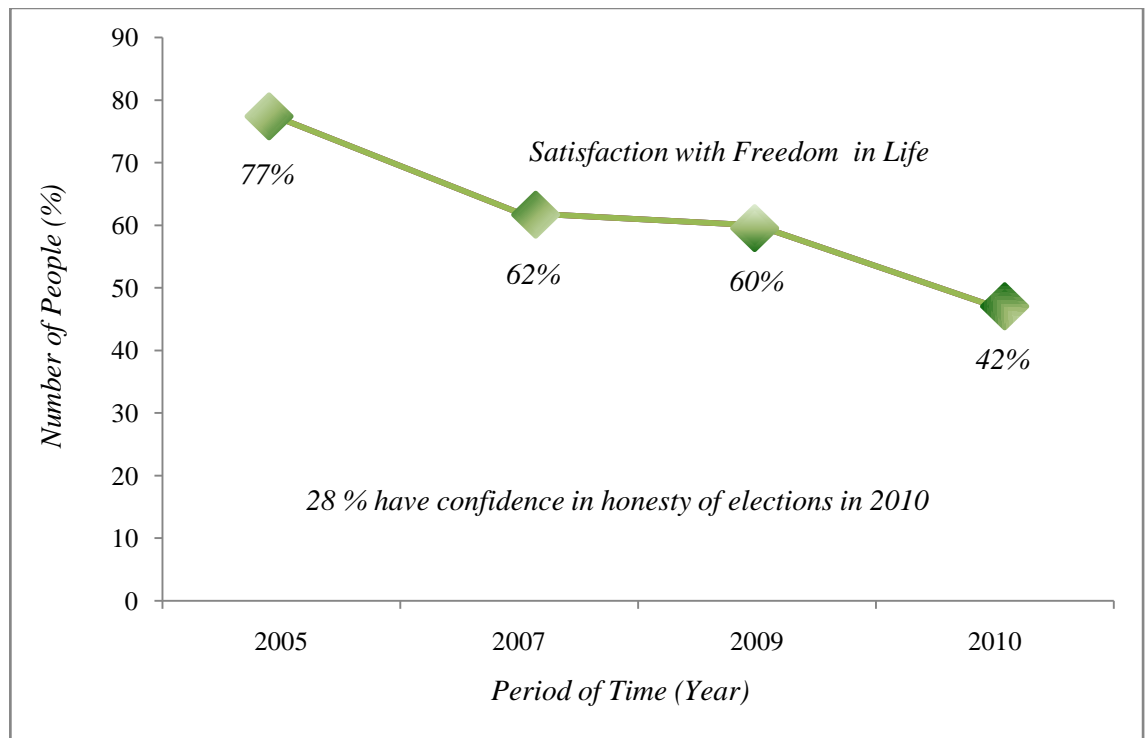
militer. Selain itu, para pemimpin dari kelompok Kristen Koptik dilaporkan akan menjadi salah satu pendukung Gamal nanti dalam pemilu presiden karena diyakini bahwa Gamal akan melanjutkan kebijakan ayahnya dalam mendukung otonomi gereja khususnya tentang pertukaran Paus dan muridnya.⁸⁹ Namun, pandangan dari kelompok oposisi jelas berbeda yang mengatakan bahwa Gamal merupakan simbol dari korupsi, keserakahan korporasi, dan penyebab kesenjangan antara kelompok elit sektor privat dan buruh.

Rangkaian kebijakan otoriter serta penerapan politik dinasti oleh rezim Mubarak tersebut dianggap oleh rakyat sebagai sebuah penyangkalan dari sistem politik demokrasi yang dianut negara tersebut. Tidak terealisasinya mekanisme aspirasi dalam demokrasi negara membuat rakyat tidak puas terhadap kinerja pemerintahan. Pendapat tersebut didukung dari hasil penelitian sebuah lembaga kajian dunia Arab yang menyebutkan bahwa 80% rakyat Mesir sepakat dengan statement *moving toward greater democracy will help Muslims progress* yang berarti bahwa pada dasarnya pelaksanaan demokrasi secara substantif dan prosedural akan mendorong kemajuan negara-negara Arab dengan mayoritas muslim khususnya Mesir. Selanjutnya berdasarkan hasil survey tahun 2009, 97% rakyat Mesir menginginkan adanya jaminan terhadap kebebasan berpendapat dan beraspirasi terutama terhadap penyusunan sebuah konstitusi baru untuk membangun sebuah negara yang lebih demokratis. Hal ini didasarkan bahwa presentasi dari *voiced opinion to public official* di Mesir adalah yang terendah sebanyak 4% dibandingkan negara-negara Arab lainnya seperti Yordania 7%, Turki 12%, Sudan 24%, dan Pakistan 27%. Selain itu, tercatat $\frac{3}{4}$ rakyat Mesir

⁸⁹ *Ibid.*, h. 8

sangat menginginkan jaminan terhadap kebebasan beragama khususnya dalam melakukan syiar dan aktivitas beragama.⁹⁰

Ketidakpuasan rakyat juga ditunjukkan dari pelaksanaan pemilihan umum parlemen dalam kurun waktu 2005 hingga 2010. *Abu Dhabi Gallup* memaparkan dalam diagram berikut:



*Diagram 1. Tingkat Kepuasan Rakyat Mesir dalam Kebebasan Politik*⁹¹

Dari penggambaran diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap tahun kepercayaan rakyat akan kebebasan berpolitik di negara tersebut secara signifikan menurun. Hingga tahun 2010, kepercayaan publik terhadap pemerintah menyisakan angka 42%, termasuk didalamnya mencapai 28% yang mempercayai bahwa mekanisme politik termasuk pemilihan umum parlemen merupakan pemilu yang dilaksanakan secara jujur dan adil. Angka kepuasan pada tahun 2005 menjadi yang tertinggi,

⁹⁰ Abu Dhabi Gallup, Maret 2011, "Egypt: The Arithmetic of Revolution, An empirical analysis of social and economic conditions in months before the January 25 uprising", Abu Dhabi Gallup Center, h. 5-7

⁹¹ *Ibid.*, h. 8

semakin menguatkan asumsi bahwa ketika terjadi reformasi politik pada tahun tersebut oleh rakyat dianggap merupakan titik sejarah pembaharuan negara menuju arah yang lebih demokratis. Namun dalam setiap periodenya mengalami penurunan karena terungkapnya sejumlah bukti penyelewengan dan pelanggaran dalam pemilu, termasuk konsistensi tindakan-tindakan represi pemerintah terhadap kelompok-kelompok oposisi.

Undang-Undang Darurat Negara menjadi faktor dan pilar utama lainnya rezim Hosni Mubarak untuk menjaga eksistensi kekuasaannya. Pemberlakuan UU Darurat No 162/1958 ini sebagai reaksi atas terbunuhnya Anwar Sadat oleh ekstrimis militan Islam. UU tersebut mulanya dibuat dengan maksud penciptaan stabilitas politik dan keamanan sekaligus menekan potensi tumbuhnya gerakan ekstrimis di negara tersebut. Hal ini pula oleh Hosni Mubarak dianggap merupakan prasyarat bagi kelancaran dan kecepatan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, Mubarak melihat undang-undang tersebut sebagai instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan eksistensi kekuasaannya selama mungkin mengingat secara mendasar UU ini melarang warga berkumpul dan berserikat untuk menyampaikan aspirasinya.

Undang-undang Darurat Negara dimanfaatkan rezim Mubarak untuk terus melakukan banyak penyelewengan. Dengan UU ini, pemerintah mempunyai wewenang penuh menginstruksikan aparat kepolisian untuk menangkap seseorang yang dianggap teroris dan menghentikan semua aktivitas politik. Tercatat pelanggaran HAM, seperti menangkap dan memenjarakan siapapun yang dianggap membahayakan kepentingan negara tanpa proses pengadilan; membatasi kebebasan berbicara, dan berserikat; dan lain sebagainya. Tindakan-tindakan tersebut secara

otomatis memuluskan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta penyalahgunaan wewenang yang bertransformasi menjadi sebuah budaya politik elit dan kebiasaan sehari-hari para pejabat pemerintah/negara dan elit penguasa.

Organisasi HAM lokal dan internasional telah bertahun-tahun mengkritik hak asasi manusia di Mesir, tidak terkecuali *Amnesty International* dan *Human Right Watch*. Pada 2005, Presiden Mubarak menghadapi kritikan publik yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika mengekang aktivis demokrasi yang menentang kekuasaannya. Hal ini merujuk pada catatan laporan yang menyebutkan bahwa telah terjadi 567 kasus penyiksaan, termasuk 167 kematian yang dilakukan oleh polisi yang terjadi dalam kurun waktu 1993 hingga 2007.⁹² Peristiwa yang paling diingat adalah kematian Khaled Mohamed Saeed meninggal dalam kekerasan fisik aparat di Alexandria pada Juni 2010.

Rezim Mubarak bukan tanpa usaha untuk mengantisipasi dan mencegah gerakan-gerakan organisasi HAM tersebut. Tahun 2003 pemerintah membentuk Dewan Nasional Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB Boutros Ghali yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Sebagai organisasi pemerintah, Dewan HAM Nasional ini rutin memberikan laporan sebagai upaya menangkal aktivisasi organisasi HAM non-pemerintah. Dewan tersebut mendapat kritik keras oleh para aktivis lokal yang berpendapat bahwa organisasi tersebut melemahkan aktivitas dan kinerja mereka di Mesir sebagai alat propaganda bagi pemerintah untuk alasan pelanggaran dan memberikan legitimasi hukum terutama UU Darurat Negara.

⁹² Apriadi Tamburaka, *Op. Cit.*, h. 73

Upaya menentang rezim Mubarak oleh kelompok-kelompok oposisi pada dasarnya telah dilakukan sejak lama. Namun, tindakan pembatasan politik dan represi yang keras oleh aparat, berhasil menggagalkan oposisi menggalang kekuatan massa yg lebih besar sehingga hanya terbatas pada pelajar, kaum intelektual muda, dan kelompok profesional kelas menengah. Selain itu kelompok –kelompok oposisi juga mengalami masalah internal dalam upaya penyatuan kekuatan seperti perbedaan pandangan dan strategi demokratisasi jangka panjang dalam internal, kapasitas organisasi yang minim, sumberdaya minim, dan yang penting adalah terbatasnya konstituen mereka. Gerakan *Kifaya* sebagai salah satu gerakan perubahan baru mampu memberikan pengaruh terhadap kebijakan amandemen konstitusi, namun setelah tahun 2006 organisasi ini terbengkalai dan perlahan terhenti aktivitasnya.⁹³ Terakhir adalah perbedaan ideologi yang besar terutama Ikhwanul Muslimin dan beberapa kelompok oposisi sekuler mencegah mereka untuk bersatu dan mengorganisasikan gerakan perlawanan dan perubahan terhadap rezim Mubarak.

Kelompok Islamis khususnya Ikhwanul Muslimin yang merupakan kekuatan oposisi yang memiliki massa pendukung besar bahkan memilih tidak menentang rezim secara konstan untuk perubahan politik yang diharapkan. Sebaliknya Ikhwanul Muslimin lebih memilih menarik sebagian besar pendukungnya terutama untuk mengambil alih tugas memberikan pelayanan sosial terhadap masyarakat setelah pemerintah tidak melakukan fungsinya di wilayah tersebut secara maksimal pada pertengahan tahun 1980-an hingga 1990-an. Disamping itu kemenangan yang signifikan oleh Ikhwanul Muslimin dalam pemilu parlemen 2005, mendorong rezim

⁹³ Maria Cristina Paciello, *Op. Cit.*, h.3

Mubarak untuk berusaha mengeliminir gerakan ini dari panggung politik Mesir dengan meningkatkan pengusikan, penahanan terhadap pemimpin gerakan, bahkan penyitaan terhadap aset finansial organisasi terutama beberapa tahun terakhir, sehingga pada akhirnya mereka memilih untuk meminimalisir konfrontasi dengan rezim pemerintahan.⁹⁴

Ukuran suatu negara demokratis bukan hanya terbatas pada pembukaan ruang-ruang politik seperti pemilihan umum tetapi sejauh mana terdapat kebebasan pers. Rezim pemerintah Mubarak melakukan kebijakan reformasi politik namun tidak berbanding lurus terhadap penetapan aturan mengenai kebebasan pers. Kelompok pers Mesir pada Juli 2006 menentang kebijakan undang-undang pers baru yang disahkan oleh parlemen dengan memboikot penerbitan koran harian dan mingguan. Mengutip undang-undang terkait kebebasan pers dalam negeri Mesir yaitu,

“Freedom of the perss, printing, publication, and mass media shall be guaranteed. Censhorship on newspapers is forbidden as well as notifying, suspending or cancelling them by administrative methods. In a state of emergency or in time of war a limited censorship may be imposed on the newspapers, publication, and mass media in matters related to public safety or purposes of national security in accordance with the law.”⁹⁵

Pihak oposisi menggarisbawahi kalimat terakhir dalam kutipan ayat tersebut dan mengatakan bahwa UU tersebut merupakan pukulan kembali pada pembaharuan Mesir serta memperlihatkan ketidaktulusan janji Presiden Hosni Mubarak untuk memberikan lebih banyak kebebasan politik dan mengakhiri hukuman tahanan pada pelanggaran media. Media massa yang menentang UU itu menilai ketentuan tersebut memungkinkan pemenjaraan wartawan yang menuduh pejabat atau pegawai negeri melakukan penyelewengan terhadap mekanisme dan kebijakan

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Riza Sihbudi dkk, *Op. Cit.* h. 150

politik, sampai tindakan-tindakan korupsi, merupakan upaya menghalangi pers melakukan perannya dalam mengkritik dan mengungkap kebobrokan dalam tubuh rezim penguasa.

2. Sistem Perekonomian Rezim Terpusat

Kebijakan reformasi ekonomi menjadi salah satu upaya Mubarak dalam mengkonsolidasikan dan merestrukturisasi sistem kekuasaan rezimnya. Pertengahan tahun 1980-an, Mesir menghadapi persoalan krisis ekonomi serta masalah utang luar negeri yang serius. Mengatasi krisis tersebut, tahun 1991 Mesir berkomitmen mereformasi kebijakan ekonomi berorientasi terhadap pasar setelah menandatangani sebuah kesepakatan bantuan dari IMF dan *World Bank*.⁹⁶ Pada akhirnya reformasi kebijakan ekonomi tidak hanya sebagai upaya untuk menyelamatkan ekonomi dalam negeri tetapi sekaligus untuk mengkonsolidasi kekuatan rezim dan mempertahankan stabilitas kekuasaannya.

Kebijakan reformasi ekonomi melalui privatisasi dan liberalisasi perdagangan mengalami percepatan hingga tahun 2004 dibawah Perdana Menteri Ahmed Nazif. Tapi yang perlu diperhatikan adalah beberapa cara yang ditempuh oleh rezim untuk tetap menjaga dan mempertahankan stabilitas kekuasaannya melalui kebijakan selektif liberalisasi ekonomi. *Pertama*, memisahkan permasalahan sektor ekonomi dari hal-hal yang bersifat politis agar tidak saling merugikan kepentingan terutama elit penguasa, dan kebijakan tersebut dimanfaatkan dengan baik terutama kelompok militer sebagai pendukung dari stabilitas rezim Mubarak melalui hak istimewa yang didapatkan oleh Mubarak. *Kedua*, melalui langkah bertahap mampu mengurangi dampak sosial negatif terkait reformasi kebijakan neo-liberalisasi ekonomi yang

⁹⁶ Maria Cristina Paciello, *Op. Cit.*, h.5

penyakit. Seperti yang diketahui bahwa kebijakan neo-liberalisasi dapat menyebabkan permasalahan sosial khususnya pengangguran akibat PHK dari perusahaan sehingga pada tahun 1990-an rezim menunda langkah privatisasi untuk menghindari dampak tersebut yang dapat mengancam dukungan dan stabilitas kekuasaannya. *Ketiga*, melalui liberalisasi ekonomi, rezim memberikan hak-hak istimewa kepada pendukung kekuasaannya dan memilih kelompok-kelompok penting dalam sektor privatisasi, tentunya untuk memperkuat basis sosialnya.⁹⁷

Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang kuat secara makro dan reformasi ekonomi berorientasi terhadap pasar nyatanya tidak cukup menyelesaikan permasalahan dan tantangan sosial khususnya kondisi ekonomi mikro Mesir. Mesir mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat mencapai 7.1% pada tahun 2006-2005 yang didukung oleh meningkatnya aktifitas ekspor dalam negeri. Investasi dalam negeri yang meningkat dengan angka rata-rata mencapai 1,5 miliar USD pada tahun 1995-2005 menjadi 10 Miliar USD ditahun 2006 sebelum turun menuju angka 6,7 miliar USD tahun 2009 sebagai dampak krisis global.⁹⁸ Namun rakyat Mesir tidak memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan mencatat angka kemiskinan mencapai 20-40% dari 83 juta penduduknya. Dalam jangka panjang, kebijakan ekonomi terpusat yang mengakar dalam rezim otoriter hanya akan memunculkan ketidakefisienan ekonomi, ketimpangan dalam kompetisi pelaku ekonomi, serta memungkinkan munculnya budaya korupsi.

Dampak yang dirasakan dari kebijakan ekonomi tersebut salah satunya daya beli konsumen yang menurun hingga 23,6% pada Agustus 2008 ketika terjadi lonjakan harga makanan. Meskipun pendapatan riil masyarakat terus meningkat

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*, h. 7

namun kondisi tersebut tidak berimbang dengan kenaikan harga yang dialami sekaligus untuk mempertahankan standar kehidupan yang layak oleh masyarakat terutama untuk masyarakat dengan tingkat pendapatan menengah dan rendah. Meningkatnya harga makanan telah menjadi indikator utama meningkatnya angka kemiskinan absolut dalam satu dekade di negara tersebut tersebut yang awalnya hanya 16,7% periode 2001 menjadi 23,4% periode 2009.⁹⁹

Pemerintah Mesir berusaha melakukan langkah terhadap dampak kenaikan harga dan ketidakpuasan masyarakat dengan memberi kebijakan sistem subsidi untuk kebutuhan pokok dan menaikkan gaji pendapatan masyarakat. Namun bagaimanapun kebijakan tersebut diterapkan ternyata tidak cukup mampu untuk tetap mempertahankan daya beli masyarakat terlebih sistem subsidi kebutuhan pokok kurang tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. Bahkan kondisi tersebut mengundang perdebatan terhadap aturan penetapan pendapatan minimum antara rancangan pemerintah dan permintaan pekerja/buruh. Seperti contoh pada November 2010, *the National Wage Council* mengusulkan bahwa upah minimum adalah sebesar LE400 sebulannya, namun para guru meminta setidaknya LE1200, perbedaan angka yang sangat besar.¹⁰⁰

Pengangguran menjadi masalah lain dari kegagalan kebijakan ekonomi Mesir. Dalam menerapkan kebijakan-kebijakan ekonomi dalam negeri, pemerintah Mesir tidak terlalu memusatkan perhatian terhadap perluasan lapangan kerja yang berujung pada semakin memburuknya situasi pengangguran. Aktivitas ekspor Mesir yang didominasi oleh hasil-hasil sumberdaya alam dan ekspor manufaktur *low-tech*

⁹⁹ Maria Cristina Paciello, *Egypt's Last Decades: The Emergence of a Social Question*, dalam Daniela Pioppi dkk, 2011, "Transition to What: Egypt's Uncertain Departure from Neo-Authoritarianism", Washington, The German Marshall Fund, h. 11

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 15

ternyata tidak menyediakan lapangan kerja berkualitas dan meminimalkan peluang untuk tenaga kerja yang *qualified*. Disamping itu, pencapaian ekonomi Mesir sangat didominasi pula dari faktor eksternal yaitu *Gulf Cooperation Council* terkait pendapatan negara yang diperoleh dari Terusan Suez sebesar USD 5 juta. Disektor tersebut juga tidak mampu secara kontinuitas menyerap tenaga kerja profesional hingga jumlah pengangguran meningkat dalam sepuluh tahun terakhir, terutama kaum pemuda lulusan universitas yaitu dari angka 9,7% tahun 1998 menjadi 14,4% tahun 2006.¹⁰¹

Pemerintah Mesir menerapkan kebijakan penghematan terhadap sistem kesejahteraan sosial. Kebijakan ini tentu bukan merupakan kebijakan yang memihak rakyat ketika sebuah pemerintah harus menjadi penyedia utama dalam layanan kesehatan dan pendidikan tidak lagi mudah dan gratis. Pengeluaran publik dalam layanan pendidikan menurun dari tahun ke tahun, misalnya angka 19,5% tahun 2002 menjadi 11,5% tahun 2006 dari total GDP negara. Sama halnya dengan total pengeluaran untuk layanan kesehatan, meskipun persentasenya mengalami kenaikan dari 1,2% tahun 2002 menjadi 3,6% tahun 2009, angka tersebut masih relatif rendah bila dibandingkan dengan negara lain yang memiliki pendapatan negara yang hampir sama.¹⁰² Kondisi tersebut pada akhirnya berkontribusi terhadap penciptaan generasi muda Mesir yang tidak siap menghadapi bursa lapangan kerja.

Tindakan korupsi juga semakin mengakar dalam budaya politik di Mesir. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa menurut *Transparency International* tahun 2010, laporan indeks Persepsi Korupsi terhadap Mesir dengan skor 3,1 HK berdasarkan persepsi tingkat korupsi dari orang-orang bisnis dan analis

¹⁰¹ *Ibid.*, h. 18

¹⁰² *Ibid.*, h. 20

negara. Kekayaan Mubarak dan keluarga secara pribadi tercatat USD 40 juta – 70 juta (Rp 357 triliun – Rp 625 triliun)¹⁰³, angka yang fantastis untuk seorang kepala negara. Disamping itu, tercatat para mantan pejabat menteri dan pelaku bisnis ikut melakukan korupsi dengan total kekayaan yakni mantan sekretaris RPN Ahmed Ezz¹⁰⁴ LM 18 juta; mantan menteri Perumahan Ahmed Al-Maghraby LM 11 juta; mantan menteri Pariwisata Zuhair Garrana LM 13 juta; mantan menteri Perdagangan dan Industri Rashid Mohammed Rashid LM 12 juta; mantan menteri Dalam Negeri Habib Al-Adly LM 8 juta.¹⁰⁵

Keterpurukan masyarakat Mesir dalam kondisi sosial ekonomi tersebut memunculkan gerakan-gerakan perlawanan yang terus berkembang. Berdasarkan data dari *Egyptian Human Rights Organization*, dalam kurun waktu 2004-2008 mencatat 1.900 kasus serangan dan demonstrasi yang melibatkan hampir 1,7 juta partisipan. Setidaknya tercatat sekitar 2 juta buruh melakukan aksi mogok dalam kurun waktu 10 tahun dari 1998-2008.¹⁰⁶ Para buruh dan kelompok intelektual muda yang terdiri dari Kelompok 6 April dan *National Movement for Change* pimpinan Mohammed El Baradei¹⁰⁷ menuntut diakhirnya sistem politik di negara

¹⁰³ Siti Muti'ah Setiawati, *Perpaduan Pesona dan Problema Pergolakan Politik Mesir*, dalam Purnawan Adi Sujasa dkk, 2011, "Perubahan di Timur Tengah dan Afrika Utara", Jurnal Luar Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri RI, Edisi Khusus 2011, h. 66

¹⁰⁴ Ahmed Ezz adalah salah satu pebisnis industri besi terkemuka di Mesir dan memiliki kedekatan dalam asosiasi bisnis yang dibentuk oleh Gamal Mubarak. Termasuk salah satu orang terpenting dalam rezim Mubarak. Pada tahun 2006, Ezz mengontrol sebanyak 70% produksi besi dan baja negara dan 50% pasar keramik di Mesir. Ezz diadili pada tanggal 8 Maret 2011 dengan tuduhan berperan dan memfasilitasi sejumlah aksi korupsi di negara tersebut bersama mantan Menteri Perdagangan Mesir, Rachid Mohamed Rachid, and mantan Direktur Pembangunan Industri, Amr Assal. Lihat Athina Lampridi, Maret 2011, "Occasional Analysis: Egypt/Hosni Mubarak, The Slow Fall of Strong Man", TEIM Election Watch Analysis, hal. 4

¹⁰⁵ Apriadi Tamburaka, *Op. Cit.*, h. 72

¹⁰⁶ Elie Podeh, *Loc. Cit.*

¹⁰⁷ Mohammed ElBaradei merupakan mantan *Director of the International Atomic Energy Agency* badan Atom Internasional periode 1997-2009. Sebagai seorang sarjana hukum, ElBaradei juga termasuk salah satu anggota Asosiasi Hukum Internasional dan *American Society of International Law*. ElBaradei sangat dikenal sebagai salah satu oposisi utama penentang rezim kekuasaan Hosni Mubarak yang memimpin dan berhasil menyatukan berbagai kekuatan-kekuatan politik dalam negeri. Bahkan dalam

tersebut yang hanya menyiksa rakyatnya. Motivasi utama dari gerakan demonstrasi buruh ini adalah ketakutan terhadap konsekuensi merugikan dari proses privatisasi ekonomi dimana mereka menginginkan peningkatan kualitas hidup sementara kebijakan tersebut dapat meningkatkan angka pengangguran.

Kebijakan tersebut menyebabkan kenaikan harga kebutuhan yang tidak diikuti dengan kenaikan upah buruh. Pada pertengahan 2007, harga makanan secara umum meningkat sebesar 25% namun upah penghasilan buruh tidak mengalami kenaikan. Hal lebih buruk terjadi pada tahun 1978-1988, meskipun rata-rata pendapatan buruh meningkat sebanyak 60% tetapi harga kebutuhan dasar meningkat sebanyak 300%. Penghasilan pokok buruh di Mesir berkisar USD 45-107 perbulannya mengindikasikan bahwa pendapatan rakyat Mesir berada dibawah garis kemiskinan menurut World Bank sekitar USD 2 perhari.¹⁰⁸

3. Politik dan Kebijakan Luar Negeri Beraliansi Barat

Mesir tergolong Negara Arab yang berperan penting sebagai aktor politik yang berpengaruh terhadap perkembangan situasi di Timur Tengah umumnya, khususnya berkaitan dengan usaha penyelesaian sengketa Arab-Israel yang berintikan masalah Palestina. Peran aktif Mesir diamati dalam beberapa lingkaran yang secara konsentris berurutan yaitu Liga Arab, Organisasi Konferensi Islam, Organisasi Persatuan Afrika, dan Gerakan Non Blok. Mesir termasuk salah satu pemrakarsa bagi lahirnya organisasi tersebut dan selanjutnya memainkan peran aktif dalam berbagai urusan yang melibatkan kepentingan negara-negara anggota.

Keterlibatan secara langsung dalam sengketa Arab-Israel membawa Mesir berperan

pemilu Mesir, tokoh ini dipinang oleh Ikhwanul Muslimin untuk diusung sebagai calon presiden meskipun pada kenyataannya hanya memenangkan dua kursi diparlemen. Lihat, David A. Ricardo, *Op.Cit.*,h. 114

¹⁰⁸ *Ibid.*

sebagai aktor politik penting dalam lingkaran Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga saat ini.

Sejarah politik luar negeri Mesir sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan luar negeri negara tersebut dibawah kepemimpinan Mubarak. Hosni Mubarak terkenal sebagai pendukung penuh kebijakan politik Anwar Sadat, termasuk politik luar negeri khususnya upaya Sadat untuk mengakhiri masa “*no recognition, no negotiation, no peace*”¹⁰⁹ yang ditandai dengan Perjanjian Damai Camp David oleh Mesir, Amerika Serikat, dan Israel. Disamping itu, Sadat perlahan mulai mengalihkan kerjasamanya dengan Uni Soviet dan lebih mengintensifkan hubungan kerjasama bersama Amerika Serikat melalui kebijakan liberalisasi ekonomi dan bantuan pertahanan keamanan, meskipun mendapat penentangan dari rakyat Mesir. Seperti yang diketahui, pada saat itu Uni Soviet dan Amerika Serikat merupakan aktor penting dalam konstelasi konflik di Timur Tengah dimana Uni Soviet secara menyeluruh mendukung negara-negara Arab, sementara Amerika Serikat akan melakukan apapun bahkan bantuan dan gerakan militer untuk menjaga eksistensi Israel di kawasan tersebut.

Pengalihan arah politik luar negeri Sadat membawa dampak yang negatif untuk negara terutama dalam lingkup dunia Arab. Mesir dikeluarkan dalam keanggotaan Liga Arab, dan Kantor Pusat Liga Arab yang semulanya bertempat di Kairo dipindahkan ke Tunis, Tunisia. Berbagai sumber bantuan dari negara-negara Arab dihentikan dan praktis terkucil dari dunia Arab, karena tertuduh melakukan

¹⁰⁹ *No Recognition, No Negotiation, No Peace* merupakan semboyan negara-negara Arab terhadap eksistensi Israel pada masa sengketa Perang Arab-Israel. Semboyan tersebut memiliki makna bahwa negara-negara Arab selamanya tidak akan mengakui keberadaan Israel di kawasan Timur Tengah sekaligus tidak akan menyediakan jalan untuk berdiplomasi dan bernegosiasi dalam upaya perdamaian, yang diinginkan adalah perang menyingkirkan Israel. Nasser yang memimpin Mesir ketika menjadi aktor penting dalam persatuan Negara Arab dan pendukung semboyan tersebut. Lihat Riza Sihbudi dkk, *Op. Cit.* h. 155 dan 159

perjanjian perdamaian tersendiri (*separate peace*) yang bertentangan dengan kesepakatan antar-Arab untuk hanya menerima penyelesaian perdamaian yang menyeluruh (*comprehensive peace*). Selain itu, Mesir tidak banyak mendapat dukungan seperti biasanya dan cenderung dikucilkan dari forum OKI dan GNB. Kondisi ini semakin kuat setelah diadakannya pertemuan puncak negara Arab di Baghdad yang mengeluarkan pernyataan “mengutuk perjanjian Camp David” dan menghasilkan sanksi terhadap Mesir berupa isolasi politik dan pembekuan sumber bantuan keuangan yang sedianya diterima dari beberapa negara petro-dollar Arab.¹¹⁰

Mubarak diperhadapkan pada situasi sulit sepeninggalan Sadat dan dituntut untuk segera menyelesaikan permasalahan dengan negara Arab. Kondisi tersebut oleh Mubarak merupakan suatu konsekuensi logis dan merasa tidak perlu merisaukan terjadinya perpecahan hubungan antara Mesir dengan negara Arab, bahkan Mubarak berpendapat bahwa negara Arab tidak mungkin mengucilkan Mesir dalam waktu yang lama karena tetap akan membutuhkan peran aktif bukan saja dalam usaha penyelesaian sengketa Arab-Israel melainkan dalam penyelesaian masalah antar-Arab. Namun demikian Mubarak menyadari bahwa identifikasinya dengan kebijaksanaan politik luar negeri yang dilakukan Sadat, khususnya dukungannya terhadap persetujuan Camp David, tidak memudahkan baginya untuk segera melakukan pendekatan terhadap negara-negara Arab guna memperbaiki hubungannya dengan Mesir.

Usaha untuk memperbaiki hubungan Mesir ditingkat perpolitikan internasional bisa dikatakan berjalan mulus. Mubarak berhasil memperbaiki dan

¹¹⁰ *Ibid.*, h. 160

memulihkan hubungan Mesir dan Uni Soviet dengan melakukan pendekatan pertukaran kunjungan pejabat tinggi kedua negara meskipun tidak seakrab Perang Arab-Israel Oktober 1973. Disamping itu, Mubarak sangat aktif dalam konsolidasi dalam forum GNB, OPA, dan OKI untuk kembali mengawali pendekatan terhadap negara-negara Arab. Berbagai peristiwa penting memudahkan Mesir memulihkan citranya sebagai aktor politik yang tidak bisa diabaikan perannya seperti dukungan Mesir ke Irak dalam perang Irak-Iran (1980-1988); sikap penentangan Mubarak dalam invasi Israel ke Lebanon; Kairo menerima Arafat sebagai pelarian akibat pengusiran PLO dari Lebanon, hal ini dinilai memiliki nilai strategis dalam pemulihan hubungan dengan negara-negara Arab lainnya mengingat PLO termasuk dalam kubu *steadfastness front* yang menentang perjanjian Camp David. Puncak dari keberhasilan kebijakan *rapproachment* oleh Mubarak, Mesir kembali diterima sebagai anggota Liga Arab tahun 1989 dan mengembalikan Kantor Pusat Liga Arab di Kairo. Pada akhirnya keterlibatan aktif Mesir itu pula berdampak pada penghapusan sejumlah utang Mesir yang berasal dari negara-negara Arab petrodollar dan ini berarti situasi yang sangat baik ketika Mesir juga harus memikirkan perbaikan situasi perekonomian dalam negerinya.¹¹¹

Peristiwa-peristiwa tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Mesir dibawah kepemimpinan Mubarak berhasil memulihkan citranya sebagai aktor politik penting di kawasan Timur Tengah. Peran Mesir tersebut pada dasarnya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan negara-negara Barat yaitu Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa, yang notabene adalah negara demokratis, dan belakangan menjadi salah satu indikator utama kesuksesan bertahannya rezim Mubarak. Rezim

¹¹¹ *Ibid.*, h. 163-164

otoriter Mubarak dan negara-negara Barat tersebut menikmati kerjasama yang dijalin dalam berbagai dimensi permasalahan. Sebagai mitra kerjasama yang baik, pada akhirnya negara-negara Barat bersikap hati-hati, moderat, cenderung inkonsisten dalam upaya memberikan dukungan terhadap reformasi politik dalam negeri Mesir karena ketakutan terganggunya kerjasama khususnya kepentingan vital mereka di kawasan Timur Tengah.

Program *European Neighbourhood Policy (ENP) Action Plan for Egypt* menjadi salah satu contoh indikasi pendekatan yang sangat hati-hati oleh Uni Eropa. Program ini khusus dilaksanakan sebagai respon terhadap kemunduran serius kondisi politik dalam negeri Mesir yang ditandai dengan amandemen konstitusi 2007. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik, termasuk mempromosikan kesadaran dan partisipasi publik khususnya dalam pemilihan umum, sekaligus dijadikan sarana pertukaran pengalaman dalam ranah pemilihan umum dan menyatukan kepentingan dalam upaya pembangunan yang bersifat kooperatif. Namun ternyata, program dialog tersebut tidak melibatkan kelompok-kelompok politik penting dan organisasi masyarakat sipil di Mesir, melainkan lebih kepada sebagian kelompok pembuat kebijakan yang lebih memihak kepada rezim pemerintah berkuasa.¹¹² Amerika Serikat juga tidak terlalu memberikan tekanan yang berarti terhadap Mesir ketika kontroversi terhadap amandemen konstitusi 2007 disamping pada dasarnya Mubarak memang menolak segala bentuk intervensi terhadap pelaksanaan politik luar negeri terutama aktivitas dalam konteks promosi demokrasi.

¹¹² *EU/Egypt Action Plan*, h. 5-6 diakses melalui http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm pada tanggal 2 Maret 2011 pukul 21.00 WITA

Sikap Amerika Serikat tersebut sudah menjadi konsekuensi logis terhadap Mesir mengingat kepentingannya di kawasan Timur Tengah khususnya upaya meredam perkembangan gerakan-gerakan Islam. Pandangan realistis tersebut menyebabkan Amerika Serikat lebih memilih tindakan yang pasif terhadap promosi kebijakan reformasi sistem politik dalam negeri Mesir. Kondisi ini didukung oleh citra positif Mesir di kawasan Timur Tengah, semakin mampu dimanfaatkan sebagai jembatan penghubung kerjasama diberbagai aspek terhadap aktor-aktor di kawasan tersebut. Khusus untuk memperkuat hubungan dengan Mesir, Amerika Serikat menawarkan dan memberikan berbagai macam bentuk program bantuan dari segala aspek kerjasama. Meskipun bantuan tersebut secara bertahap berkurang setiap tahunnya, sebagai penerima bantuan Amerika Serikat terbesar kedua setelah Israel, Mesir menikmati bantuan luar negeri seperti dipaparkan dalam tabel berikut,

Fiscal Year	Economic	Military	IMET	Total
1948-1997	23,288.6	22,353.5	27.3	45,669.4
1998	815.0	1,300.0	1.0	2,116.0
1999	775.0	1,300.0	1.0	2,076.0
2000	727.3	1,300.0	1.0	2,028.3
2001	695.0	1,300.0	1.0	1,996.0
2002	655.0	1,300.0	1.0	1,956.0
2003	911.0	1,300.0	1.2	2,212.2
2004	571.6	1,292.3	1.4	1,865.3
2005	530.7	1,289.6	1.2	1,821.5
2006	490.0	1,287.0	1.2	1,778.2
2007	450.0	1,300.0	1.3	1,751.3
2008	411.6	1,289.4	1.2	1,702.2
2009	250.0	1,300.0	1.3	1,551.3
2010	250.0	1,300.0	1.9	1,551.9
2011	250.0	1,300.0	1.4	1,551.4
Total	30,820.8	39,211.8	43.0	70,075.6

I.M.E.T = *International Military Education and Training*

Tabel 4. *Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Mesir (dalam juta \$)*¹¹³

Mesir secara prinsip menolak segala bantuan luar negeri khususnya Amerika Serikat dalam rangka aktivitas promosi demokrasi. Secara kukuh bahkan pemerintah menolak segala bentuk dukungan terhadap kelompok sipil independen yang berorientasi pada aspek akuntabilitas dalam sistem politik dan pemerintahan,

¹¹³ Jeremy M. Sharp, *Op.Cit*, h. 25

terlebih dukungan kepada kelompok sipil yang tidak mendapat legalitas dari pemerintah terkait pembentukan kelompok dan organisasi tersebut. Namun ternyata meskipun dengan enggan, Mesir telah menyepakati beberapa program terkait hal tersebut.

Amerika Serikat dibawah pemerintahan George Bush dan Barak Obama secara rutin telah menganggarkan bantuan yang disetujui oleh kongres dari *Economic Support Fund* untuk mendukung NGO yang ada di Mesir. Terpisah dengan program bantuan yang lain, Amerika serikat menganggarkan sekitar USD 25 juta pada tahun 2010, 10% dari total bantuan ekonomi.¹¹⁴ Namun banyak pengamat mencatat bahwa hanya sebagian kecil bantuan yang berasal dari *USAID's Democracy and Government* (D&G) berhasil dialokasikan kepada kelompok sipil independen di Mesir dan bahkan diyakini kelompok-kelompok yang tidak memperoleh legalitas pemerintah, tidak menikmati bantuan tersebut. Disebutkan pula, bahwa sebagian besar bantuan USAID's D&G hanya dinikmati oleh pemerintah Mesir yang mana diharapkan sebagai penyalur kepada sasaran program bantuan.

¹¹⁴ Jeremy M. Sharp, Februari 2011, "Egypt: The January 25 Revolution and Implications for U.S. Foreign Policy, Congressional Research Service, h. 26

	FY2008	FY2009	FY2010	FY2011 Request
Democracy and Governance				
Total	54,850,315	23,539,643	29,000,000	25,000,000
USAID	54,800,000	20,000,000	25,000,000	25,000,000
HRD	0	2,057,000	2,000,000	n/a
MEPI	50,3115	1,482,643	2,000,000	n/a
Civil Society				
Total	27,900,315	9,539,643	25,000,000	21,000,000
USAID	27,850,000	6,000,000	21,000,000	21,000,000
HRD	0	2,057,000	2,000,000	n/a
MEPI	50,351	1,482,643	2,000,000	n/a
Egyptian unregistered orgs	925, 286	1,482,643	2,000,000	n/a
USAID	925, 286	0	0	n/a
MEPI	0	1.482,643	2,000,000	n/a
Egyptian registered orgs	5,669,529	5,000,000	10,000,000	n/a
USAID	5,619,214	5,000,000	10,000,000	n/a
MEPI	50,315	0	0	
US registered groups	5,801,846	1,000,000	1,000,000	TBD
USAID	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
US unregistered groups	15,503, 654	2,057,000	2,000,000	TBD
USAID	15,503, 654	0	0	

MEPI = Middle East Partnership Initiative

HRD = Human Right and Democracy

Source: U.S. State Departement. Bureau of Near Eastern Affairs

Tabel 5. Bantuan Luar Negeri Langsung Amerika Serikat untuk NGO Mesir¹¹⁵

Kelompok aktivis demokrasi dan HAM menyatakan psimis dengan bantuan tersebut. Pemerintah Amerika Serikat dibawah Barak Obama diyakini masih

¹¹⁵ *Ibid.*, h. 28

dengan sikap terdahulu, yaitu tidak cukup serius untuk menekan kebijakan pemerintah Mesir mereformasi sistem politik di negara tersebut. Beberapa menyebutkan bahkan pemerintah Amerika Serikat berpihak kepada kedua kubu yang berlawanan dalam hal ini pemerintah dan para aktivis. Kondisi ini memperkuat anggapan bahwa Amerika Serikat memiliki standar ganda yaitu berupaya menyelamatkan citranya sebagai negara penegak demokrasi namun disisi lain tetap berupaya mempertahankan hubungan baik terhadap pemerintah otoriter Mubarak yang secara tidak langsung ikut melestarikan budaya politik otoriter tanpa keadilan.

B. Masa Transisi Politik Mesir

1. Kronologi Revolusi 25 Januari

Demonstrasi rakyat Mesir berhasil memaksa presiden menjabat Hosni Mubarak untuk meninggalkan kedudukannya selama 30 tahun. Aksi kemarahan rakyat ini bukan merupakan hal yang mudah mengingat demonstrasi yang dilakukan tanpa menyerah 18 hari lamanya dan meninggalkan ratusan korban nyawa dan ribuan yang terluka, bahkan tidak sedikit pula ditahan oleh rezim berkuasa. Tidak hanya berpusat di *Tahrir Square* Kairo, namun aksi demonstrasi juga berkembang di kota-kota besar lainnya seperti kota Alexandria, Aswan, Mansoura, dan Suez.

Berikut ini merupakan rangkuman kronologi menjelang mundurnya rezim pimpinan Hosni Mubarak yang telah berkuasa selama 30 tahun di Mesir:

No.	Tanggal	Kronologi Revolusi 25 Januari
1.	25 Januari 2011	Rakyat turun ke jalan untuk memulai demonstrasi yang terinspirasi oleh revolusi yang sukses di Tunisia dengan massa sekitar ribuan orang dengan tujuan memprotes kemiskinan, pengangguran, korupsi pemerintah, dan pemerintahan otokrasi oleh Hosni Mubarak selama 30 tahun lamanya. Hari tersebut dikenal dengan “Hari Kemarahan”.
2.	26 Januari 2011	Polisi yang mengeluarkan larangan demonstrasi akhirnya bentrok dengan demonstran yang tidak mengindahkan larangan tersebut.
3.	27 Januari 2011	Kelompok Ikhwanul Muslimin dan Mohamad ElBaradei, mantan ketua Badan Atom Internasional yang juga dikenal dengan pengkritik Mubarak, tiba di Kairo dan kemudian bergabung dengan demonstran. Polisi anti huru-hara turun ke jalan, menangkap dan melukai ratusan orang dengan menggunakan tongkat, gas air mata, dan meriam air. Protes terjadi di Alexandria dan Suez, dua kota besar di Mesir.
4.	28 Januari 2011	Sekurangnya 24 orang dilaporkan tewas dalam bentrokan di seluruh Mesir. Mubarak memperpanjang jam malam ke seluruh kota di Mesir. Mubarak memerintahkan tentara dan tank turun ke jalan untuk menghadang demonstran. Namun demonstran malah menyambut tentara yang dianggap netral, tidak seperti polisi yang dikerahkan sebelumnya.
5.	29 Januari 2011	Mubarak menyatakan merombak kabinet dan menolak mundur. Protes kembali memadati Tahrir Square usai pernyataan tersebut. Mubarak selanjutnya menunjuk kepala badan intelijen Omar Suleiman sebagai wakil presiden. Ribuan demonstran turun ke jalan saat jam malam dimulai guna berjaga-jaga terhadap penjarahan.
6.	31 Januari	Militer mengatakan tidak akan menggunakan kekerasan terhadap demonstran. Militer mengatakan kebebasan berkespresi dengan damai dijamin bagi semua warga negara. Mubarak melantik kabinet baru dengan harapan bahwa Suleiman dapat melakukan mediasi terhadap semua kekuatan politik. Ribuan demonstran berkumpul dengan sendirinya di Tahrir Square saat jam malam dengan tuntutan yang sama.
7.	1 Februari 2011	Mubarak melalui siaran televisi mengatakan tidak akan mundur dari jabatannya, dan baru akan turun jika masa jabatan berakhir pada September 2011. Ia juga menawarkan konsesi namun rakyat menolak dan tetap meminta Mubarak untuk mundur.

8.	2 Februari 2011	Militer meminta demonstran untuk meninggalkan jalanan dan jam malam dilonggarkan. Bentrokan pecah antara kelompok pendukung Mubarak dan massa demonstran di Tahrir <i>Square</i> , namun militer diam saja. Mubarak menolak permintaan AS dan Eropa agar transisi politik segera dilakukan
9.	3 Februari 2011	Sejumlah tembakan dilepaskan kepada demonstran di Kairo yang menewaskan sekitar 10 orang. PBB memperkirakan 300 orang telah tewas sepanjang demonstrasi berlangsung
10.	4 Februari 2011	Ribuan demonstran berkumpul di Tahrir <i>Square</i> untuk mendesak diakhirinya rezim Mubarak. Aksi ini dinamai “Hari Keberangkatan”. Gamal Mubarak kemudian mundur sebagai pimpinan partai berkuasa Mesir
11.	6 Februari 2011	Kelompok oposisi termasuk Ikhwanul Muslimin melakukan pertemuan dengan wapres Omar Suleiman. Oposisi mengatakan tuntutan utama mereka tidak dipenuhi sehingga memaksa pemerintah untuk tetap terus melakukan pertemuan dan sebuah komite dibentuk untuk mengkaji konstitusi. Bank kembali dibuka usai ditutup selama sepekan.
12.	7 Februari 2011	Kantor Berita MENA melaporkan Mubarak membentuk dua komite untuk mengkaji amandemen konstitusi. Pimpinan oposisi mengatakan pembicaraan dengan pemerintah tidak ada kemajuan.
13.	8 Februari 2011	Rakyat Mesir menggelar demonstrasi terbesar sebagai bentuk respon. Wapres Suleiman mengatakan pemerintah punya jadwal untuk pemindahan kekuasaan secara damai dan menjanjikan tidak ada lagi tindak represif terhadap demonstran. Ia memperingatkan militer akan melakukan kudeta jika demonstrasi tak juga diakhiri.
14.	9 Februari 2011	Empat orang tewas dalam bentrokan antara aparat dan 3.000 demonstran di Provinsi New Valley, selatan Kairo
15.	10 Februari 2011	Militer membuat pernyataan yang mengindikasikan akan melakukan kudeta dan menyingkirkan Mubarak. Mubarak diprediksi akan menyatakan mundur hari itu juga. Namun pada kenyataannya melalui pidatonya Mubarak menegaskan tetap bertahan dan mendelegasikan kekuasaan eksekutif kepada Suleiman. Demonstran marah dan meningkatkan tekanan terhadap Mubarak.
16.	11 Februari 2011	Mubarak mundur dan menyerahkan wewenang kepada militer. Suleiman mengatakan Dewan Militer akan memegang kendali atas Mesir. Tidak hanya demonstran tetapi seluruh rakyat Mesir merayakan berita pengunduran diri Mubarak.

Tabel 6. *Kronologi Revolusi 25 Januari Mesir*^{116 117}

¹¹⁶ International Crisis Group, Februari 2011, “Popular Protest In North Africa and Middle East: Egypt Victorious?”, Middle East/North Africa Report No. 101, hal. 3-7

Aksi demonstrasi rakyat Mesir telah lama direncanakan sebagai hari revolusi melawan kemiskinan, korupsi, pengangguran, dan represi politik dan aparat. Penggalangan massa sebagian besar dilakukan melalui situs jejaring sosial *Facebook*. Tercatat sekitar 80.000 pengguna *Facebook* di negara itu menyatakan keikutsertaannya dalam aksi tersebut. Beberapa kelompok penentang Mubarak bersatu dalam gerakan perlawanan di *Tahrir Square* seperti *Kifaya*, kelompok yang pernah terlibat dalam aksi protes terhadap rezim Mubarak pada tahun 2000 dan 2003; *The 6 April Youth Movement*, kelompok aktivis buruh yang telah memulai perlawanannya pada tahun 2008 sebagai respon terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok dan tindakan represi dari aparat; *We Are All Khaled*, kelompok yang terbentuk pasca insiden penembakan Khaled Mohammed Saeed melalui internet, gerakan ini dipimpin oleh seorang pemuda bernama Wael Ghonim; dan tentunya Ikhwanul Muslimin dan Salafis, kelompok yang oleh rezim Mubarak merupakan organisasi terlarang.¹¹⁸

Otoritas berwenang pemerintah kemudian menutup semua media komunikasi publik di seluruh negeri. Layanan internet dan pesan singkat (SMS) telepon seluler, juga *Blackberry Internet Service* bahkan pemerintah sebelumnya sudah menutup akses situs jejaring sosial *Twitter* dan *Facebook*, juga *Youtube*, *Yahoo*, dan *Google*. Empat operator utama penyedia layanan internet di Mesir yaitu *Link Mesir*, *Vodafone/Raya*, *Telecom Mesir*, dan *Etisalat Misr* mengaku layanan mereka telah ditutup oleh pemerintah.¹¹⁹ Penutupan akses internet ini diindikasikan kuat sebagai respon pemerintah atas tindakan *Associated Press* yang menerbitkan sebuah video

¹¹⁷ Jeremy M. Sharp, *Egypt: The January 25 Revolution*, h. 2-11

¹¹⁸ International Crisis Group, *Op.Cit.*, h. 2

¹¹⁹ David A Ricardo, *Op.Cit.*, h.39

penembakan seorang demonstran yang ditembak aparat Mesir.¹²⁰ Penutupan akses komunikasi publik sangat ekstrem akibat rezim Mubarak yang dihindangi rasa takut berlebihan terhadap aksi massa.

Televisi menjadi salah satu media yang juga berperan membantu menyebarkan informasi sekaligus semangat kepada rakyat untuk melawan rezim pemerintah. Meskipun pada dasarnya berita di TV nasional Mesir tidak memberitakan hal yang objektif, namun sebagian besar mampu mengakses channel berita Al-Jazeera dan BBC Arab akan penentangan terhadap Mubarak. Meskipun siaran kedua saluran berita tersebut sempat diputus oleh Nile Sat, namun dapat kembali diakses tetapi harus menghadapi usaha siaran berita lokal yang berupaya mendiskreditkan saluran berita tersebut. Survey menunjukkan bahwa dari jumlah total demonstran, sebanyak 83% mengakui bahwa sumber berita televisi yang mendorong mereka untuk turun ke jalan, sementara 17% sisanya merupakan akses berita melalui internet.¹²¹

Demonstrasi yang diwarnai bentrokan di pusat kota Kairo menyebabkan korban jiwa dan terluka yang begitu besar. Menurut konfirmasi dari Menteri Kesehatan Mesir, *Ahmed Samih Farid*, setidaknya ada 864 orang yang tewas dan sekitar 3.000 orang terluka selama 18 hari.¹²² Tidak hanya membawa korban dari kebanyakan demonstran, bahkan wartawan pun mendapat perlakuan kasar yang coba meliput setiap detik demonstrasi oleh massa pro-Mubarak dengan tindakan pemukulan. Selain itu adapula yang dilaporkan ditahan oleh aparat keamanan sebagai upaya sekaligus mengintimidasi pers. Dua reporter *New York Times* ditahan

¹²⁰ Apriadi Tamburaka, *Op. Cit.*, h. 79

¹²¹ Abu Dhabi Gallup, Juni 2011, "Egypt from Tahrir to Transition", Abu Dhabi Gallup Center, h. 10

¹²² A.M. Fachir, 2011, "Gerakan Rakyat Untuk Perubahan, Pembelajaran dari Timur Tengah", dalam Jurnal Luar Negeri, *Op. Cit.*, h. 15

di Kairo meskipun kemudian dibebaskan, Kepala Biro *The Washington Post's* Kairo dan fotografernya dilaporkan juga ditangkap.

Penjelasan mengenai reputasi kekuasaan Hosni Mubarak sebelumnya dan dinamika Revolusi Mesir 2011 dapat diuraikan melalui analisa rumusan **Michael Kimmel** terhadap akumulasi momentum terciptanya sebuah revolusi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Kimmel menguraikan tiga tahapan yaitu *pre-condition*, *precipitant*, dan *trigger*. Apabila meninjau fenomena yang terjadi di Mesir, dapat disimpulkan bahwa:

a) *Pre-condition*

Tahapan *pre-condition* yang pertama adalah pemerintahan Mesir yang berorientasi pada terbentuknya suatu rezim politik otoriter sejak tahun 1950-an hingga tahun 2011, bertahan hingga rezim pimpinan Husni Mubarak hampir selama 30 tahun. Rezim tersebut mengkonsolidasikan kekuatan sipil dan militer untuk menjamin kekuasaannya melalui mekanisme institusional, yaitu konstitusi, pemberlakuan undang-undang darurat, dan penguasaan di parlemen. Rezim pemerintah juga memberikan batasan terhadap aktivitas politik dan kebebasan berekspresi terhadap rakyat. Rakyat yang dianggap melakukan perlawanan bahkan sekedar mengekspresikannya akan ditindaki secara keras.

Pre-condition yang kedua adalah situasi demografi Mesir dimana sejak tahun 1950-an, populasi Mesir mengalami perkembangan hingga empat kali lipat yaitu dari sekitar 21,4 juta menjadi 83 juta penduduk, meskipun pemerintah cenderung berhasil menurunkan angka kelahiran dari 2,8% pada tahun 1980-an menjadi 1,9% pada tahun 2000-an. Situasi Mesir dengan angka kelahiran tinggi pada akhirnya berdampak pada pengangguran, penurunan kualitas kesehatan dan

layanan pendidikan, serta populasi penduduk yang tidak merata dimana setidaknya terdapat sepertiga penduduk berumur 14 tahun ke bawah. Pada umumnya beberapa pra-kondisi tersebut sudah cukup untuk menciptakan situasi revolusioner di Mesir.

b) *Precipitant*

Precipitants yang pertama terkait dengan upaya pembangunan *dynastic republicanism* oleh Hosni Mubarak. Amandemen konstitusi pada tahun 2005 pada dasarnya akan membuka jalan terhadap proses-proses yang lebih demokratis terhadap pemilu presiden yang mungkin mampu mengakhiri kekuasaan Hosni Mubarak. Namun selama periode pemerintahannya, Mubarak telah mempersiapkan anaknya, Gamal Mubarak sebagai suksesornya di Mesir dimana secara tidak langsung akan menciptakan sebuah dinasti kekuasaan ditubuh Mesir. Salah satu kelompok gerakan perubahan Mesir yang terbentuk tahun 2004 menamakan diri mereka *Kifaya*, mengkritisi dan menentang tindakan Hosni Mubarak serta menolak kehadiran anaknya dalam panggung politik Mesir.

Precipitants kedua yaitu terkait hasil pemilihan parlemen pada November 2010 yang tidak diawasi oleh lembaga hukum. Pada pemilihan tersebut tidak menempatkan sama sekali perwakilan dari kelompok oposisi di parlemen. Hasil yang bertolak belakang terhadap komposisi parlemen tahun 2005 dimana terdapat 88 anggota dari 454 kursi parlemen yang berafiliasi dengan *Ikhwanul Muslimin*. Peniadaan kelompok oposisi di parlemen semakin menegaskan tindakan kecurangan terhadap pemilu. Dampaknya, angka pemilih menurun sebagai bentuk apatisme publik dan ketidakpercayaan dari politik terkhusus prosedur pemilihan umum.

Precipitans ketiga adalah semakin meluasnya gerakan-gerakan penentangan yang terhimpun dari masyarakat sejak 2004. Berdasarkan data dari *Egyptian Human Rights Organization*, dalam kurun waktu 2004-2008 mencatat 1.900 kasus serangan dan demonstrasi yang melibatkan hampir 2 juta partisipan. Para buruh dan kelompok intelektual muda yang terdiri dari kelompok 6 April dan *National Movement for Change* pimpinan Muhammad El Baradei menuntut diakhirnya sistem politik di negara tersebut yang hanya menyiksa rakyatnya. Gerakan tersebut terbentuk dari jaringan media sosial internet *Facebook* ketika pemerintah sangat ketat mengontrol media massa. Motivasi utama dari gerakan demonstrasi buruh ini adalah ketakutan terhadap konsekuensi merugikan dari proses privatisasi ekonomi dimana mereka menginginkan peningkatan kualitas hidup sementara kebijakan tersebut dapat meningkatkan angka pengangguran. Kebijakan tersebut menyebabkan kenaikan harga kebutuhan yang tidak diikuti dengan kenaikan upah buruh.

c) *Trigger*

Trigger atau pemicu pada akhirnya membuat gerakan revolusi di Mesir pecah. Demonstrasi massa di Tunisia pada awal tahun 2011 dikarenakan aksi bakar dir oleh Muhammad Bouazizi mengakhiri kekuasaan rezim otoriter Presiden Ben Ali. Rakyat Mesir yang terinspirasi dari peristiwa tersebut, menjadikan momen perayaan Hari Kepolisian pada tanggal 25 Januari untuk menghimpun dan melakukan aksi demonstrasi bersar-besar di *Tahrir Square* yang berdampak pada mundurnya rezim Hosni Mubarak. Keberhasilan tersebut didasari pada dua hal penting, yaitu Hosni Mubarak terlalu lambat dalam menangani aksi tersebut dikarenakan kondisi kesehatannya yang memburuk sehingga semakin

memperkuat kekuatan rakyat dalam perlawanan terhadap rezim pemerintah. Kedua, yaitu revolusi komunikasi global seperti telepon seluler, Internet, *Facebook*, dan *Twitter* yang memfasilitasi revolusi dari satu negara ke negara lainnya. Hal ini juga dikuatkan dari bentuk-bentuk pemberitaan dari *al-Jazeera* dan *BBC World*, channel saluran berita yang berpengaruh di Timur Tengah.

2. Pemerintahan Interim oleh *Supreme Council of the Armed Force*

Pasca Mubarak, kekuasaan dan kontrol negara diserahkan kepada Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata Mesir (*Supreme Council of the Armed Force* – SCAF) atau Dewan Militer Mesir. Lembaga tersebut yang akan menjalankan proses transisi menuju demokrasi, hingga terbentuknya konstitusi, parlemen, dan terpilihnya presiden baru di Mesir. Dengan pengawalan langsung dari rakyat, Dewan Militer dibawah pimpinan Mohammed Husain Tantawi¹²³ dituntut untuk membawa Mesir menuju arah demokrasi yang sebenarnya tanpa adanya upaya politisasi lainnya yang dianggap dapat menggagalkan harapan rakyat Mesir.

Dewan Militer Mesir mendapat kepercayaan yang luas dari rakyat untuk menjalankan keberlangsungan dan kelancaran proses transisi. Meskipun pada dasarnya lembaga ini sebelumnya dipimpin langsung oleh Presiden Mubarak sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, SCAF memang sudah memiliki reputasi yang baik di mata rakyat daripada lembaga keamanan lainnya seperti kepolisian. Terlebih lagi, reputasi tersebut tetap terjaga dengan mengambil posisi dan sikap yang sangat persuasif dan simpatik terhadap para demonstran selama

¹²³ Mohammed Husain Tantawi adalah Menteri Pertahanan dan Ketua Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata Mesir. Ia pernah terlibat dalam perang melawan Israel; Perang Suez pada 1956, perang Enam Hari pada 1967, Perang Oktober pada 1973. Tantawi menjadi Jenderal Mesir pertama yang mendapat pangkat Field Marshal pada 1989. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Produksi Militer Mesir sejak 1991. Kemudian, ia menduduki posisi panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Mesir sejak 1995. Lihat Athina Lampridi, *Op.Cit.*, h. 3

gerakan Revolusi 25 Januari berlangsung. Meskipun keharmonisan hubungan antara tentara-rakyat selama proses transisi mengalami sejumlah konflik akibat dugaan politisasi serta ketidaksabaran rakyat dalam pengalihan kekuasaan kepada sipil, namun Dewan Militer tetap konsisten hingga tugasnya berakhir membentuk pemerintahan.

Dewan Militer menegaskan komitmennya untuk mengantarkan proses transisi politik dan kekuasaan di Mesir menuju terbentuknya sebuah pemerintahan sipil yang demokratis sesuai dengan amanat revolusi. SCAF merancang sejumlah kebijakan dan tahapan bagi proses transisi dengan menunjukkan pendekatan yang akomodatif terhadap berbagai aspirasi yang berkembang, termasuk melalui proses dialog dan konsultasi dengan berbagai elemen politik dan masyarakat. Hanya berselang dua hari sejak menerima kekuasaan dari Presiden Mubarak, SCAF mengeluarkan **Deklarasi Konstitusional I** yang memuat beberapa hal yaitu pembekuan Konstitusi Mesir; pembubaran dua lembaga perlemen yaitu Majelis Shaab dan Majelis Shoura; penegasan sifat sementara kekuasaan SCAF selama enam bulan atau hingga pelaksanaan Pemilu Parlemen dan Presiden; keputusan untuk mempertahankan kabinet PM Ahmed Shafiq; keputusan untuk membentuk komite amandemen Konstitusi; dan komitmen untuk tetap menghormati perjanjian internasional yang mengikat Mesir. Deklarasi Konstitusional pertama ini kemudian menjadi landasan bagi penetapan sejumlah tahapan selanjutnya.¹²⁴

Tahapan penting yang telah dilakukan oleh SCAF mencakup hal-hal berikut:

1. Pembentukan Komite Amandemen Konstitusi pada Februari 2011;
2. Pembentukan kabinet baru, dengan mengangkat Essam Sharaf yang merupakan tokoh revolusi sebagai Perdana Menteri, menggantikan Ahamed Shafiq yang mengundurkan diri pada Maret 2011;

¹²⁴ A.M. Fachir, *Op. Cit.*, hal. 19

3. Pembubaran *State Security Agency* pada Maret 2011;
4. Referendum Amandemen Konstitusi Maret 2011 yang dimenangkan oleh suara yang setuju sebanyak 77.2%;
5. Pengesahan revisi UU partai politik Maret 2011, yang melonggarkan syarat dan mekanisme perizinan pendirian partai politik;
6. Deklarasi Konstitusional II pada Maret 2011;
7. Pembubaran mantan partai berkuasa *National Democratic Party* melalui keputusan Pengadilan Tinggi Administratif April 2011.

Deklarasi Konstitusional II merupakan hasil dari pemantapan deklarasi konstitusional sebelumnya. Deklarasi kedua memuat 63 pasal termasuk pasal-pasal yang diamandemen melalui referendum dan mengatur berbagai aspek ketatanegaraan Mesir serta kekuasaan transisional SCAF hingga pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Pokok-pokok amandemen yang tercakup dalam konstitusi tersebut yaitu pelonggaran mekanisme pencalonan presiden, pembatasan masa jabatan presiden (maksimal 2 tahun berturut-turut), pengembalian fungsi *supervise* penuh lembaga peradilan terhadap pelaksanaan pemilu/referendum untuk menjamin asas bebas, jujur, dan adil, pembatasan pemberlakuan darurat (6 bulan dan selanjutnya harus melalui referendum), dan pengaturan mekanisme penyusunan konstitusi baru oleh lembaga legislatif mendatang.¹²⁵

Langkah tersebut akhirnya membawa Mesir dalam pemilu yang dilaksanakan mulai November 2011 hingga Januari 2012 untuk pemilihan parlemen. Pemilihan parlemen ini menghasilkan kemenangan terbesar oleh kelompok Salafis dan Ikhwanul Muslimin. Kedua kelompok ini merebut sekitar 70% suara.¹²⁶ Partai Keadilan dan Kebebasan yang merupakan sayap politik Ikhwanul Muslimin muncul sebagai fraksi terkuat di parlemen dan Partai an-Nour dari kelompok Salafis ada di urutan kedua.

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ _____, 2012, "Mesir: Pemilu Parlemen Mulai Akhir April", diakses melalui <http://dw.de/mesir-pemilu-parlemen-mulai-akhir-april/a-16621638> pada tanggal 15 Februari 2012 pukul 01.00 WITA

Pemilu dilanjutkan dengan pemilihan Presiden Mesir secara terbuka dan luas untuk pertama kalinya. Dalam pelaksanaannya, pemilu presiden dilaksanakan dalam dua putaran. Pilpres Mesir diikuti oleh 23 juta pemilih, atau sekitar 46% total pemilik hak pilih di Mesir sebanyak 51 juta orang. Hingga akhirnya setelah pemilu putaran pertama, Komisi Pemilihan Umum Mesir mengumumkan dua kandidat untuk bersaing memperebutkan kursi kepresidenan pada putaran kedua, yaitu *Mohammed Mursi* (24,8%) dari Ikhwanul Muslimin sekaligus Ketua Partai Keadilan dan Kebebasan, yang akan berhadapan dengan *Ahmed Shafiq* (23,7%) dari calon independen, mantan perdana menteri era Hosni Mubarak.¹²⁷ Pemilu presiden putaran kedua dilaksanakan pada tanggal 16-17 Juni 2012.

Hasil pilpres putaran pertama tersebut bukan tanpa masalah. Para capres yang gagal masuk putaran kedua, yakni *Amr Mousa*, *Hamdin Sabahi*, *Salim Alawa*, *Khalid Ied*, dan *Abdul Munim Abul Futuh* meminta komisi pemilu menunda pengumuman hasil final pilpres karena dugaan terjadinya kecurangan signifikan dalam pilpres tersebut. Sejumlah kekuatan di kubu pemuda revolusi pun menghimbau komisi pemilu menerima banding Sabahi yang menduduki tempat ketiga dalam pilpres putaran pertama dalam bentuk solusi ketiga yaitu pilpres putaran kedua diikuti oleh tiga capres yaitu Mursi, Shafik, dan dirinya. Namun Ketua Komisi Pemilu Mesir Farouk Sultan menolak semua banding yang diajukan terkait hasil pilpres putaran pertama karena tidak ditemukannya alasan yang kuat.

Kekisruhan politik terjadi ditengah persiapan pelaksanaan pilpres putaran kedua. *Supreme Council of Court* (SCC) atau Mahkamah Konstitusi Mesir memutuskan untuk membubarkan parlemen yang sudah terbentuk melalui pemilu

¹²⁷ _____, 2012, "Kekuatan Politik Terpolarisasi", diakses melalui <http://m.kompas.com/news/read/2012/05/29/02123616/kekuatan.politik.terpolarisasi> pada tanggal 29 Mei 2012 pukul 12.35 WITA

parlemen pada awal tahun 2012 tersebut.¹²⁸ Parlemen yang dibubarkan kekuasaannya akan dipegang kembali oleh Dewan Tinggi Militer sehingga siapa pun yang menang pada pilpres putaran kedua bisa berkuasa tanpa pengawasan parlemen serta tanpa sebuah konstitusi permanen untuk mendefinisikan kekuasaan atau tugasnya.

Pembubaran parlemen ini didasarkan pada alasan bahwa terjadi pelanggaran terhadap undang-undang pemilu. Pelanggaran tersebut terkait komposisi parlemen hasil pemilu yang tidak sesuai ketentuan UU Pemilu Parlemen. Sejak saat itu, lembaga perwakilan yang ada hanyalah majelis Dewan Syura sebagai majelis tinggi. Selanjutnya anggota Dewan Syura yang didominasi kelompok Ikhwanul Muslimin akhirnya menyetujui perubahan undang-undang pemilu untuk memenuhi tuntutan SCC sehingga atas persetujuan tersebut, terbuka jalan untuk pemilihan umum parlemen yang baru.

Menuju pilpres tahap kedua juga diwarnai berbagai aksi demonstrasi massa yang turun ke jalan. Para demonstran menyampaikan beberapa hal yaitu tuntutan mereka terhadap peralihan kekuasaan dari Dewan Militer Mesir ke sipil agar dilakukan secepatnya. Hal lain yang juga mendorong demonstran turun ke jalan adalah keikutsertaan Ahmed Shafik dalam pilpres Mesir karena rakyat secara tegas menolak keterlibatan para politisi rezim sebelumnya dalam era pemerintahan baru. Terakhir adalah proses peradilan mantan presiden terguling Hosni Mubarak dan menteri dalam negerinya yang divonis peradilan Mesir atas hukuman seumur hidup sementara rakyat menginginkan Mubarak dan keluarga memperoleh hukuman mati

¹²⁸ _____, 2012, "Egypt Election", diakses melalui http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/06/120616_egyptelection.shtml pada tanggal 6 Juni 2012 pukul 13.00 WITA

karena kekejamannya terhadap demonstran yang menewaskan 850 orang dalam revolusi 18 hari.¹²⁹

Pelaksanaan pemilu Presiden tahap kedua di Mesir akhirnya dilaksanakan sesuai jadwal yang direncanakan. Meskipun pengumuman hasil pemilu mengalami penundaan sebanyak dua kali yang mengundang kemarahan rakyat, proses pemilihan umum tidak begitu mengalami gangguan yang berarti. Melalui Ketua Komisi Pemilihan Umum, Farouq menyebutkan bahwa Mohamed Mursi memenangkan pemilu dengan perolehan suara sebanyak 13.280.131 suara atau 52% dari total pemilih yang berpartisipasi.¹³⁰

3. Pemerintahan dipimpin oleh kelompok Islamis Ikhwanul Muslimin

Hasil pemilu presiden Mesir akhirnya diumumkan dengan Mohamed Mursi, dari Ikhwanul Muslimin menjadi pemenangnya. Mursi menyingkirkan Ahmed Shafik yang merupakan kandidat independen dimana adalah mantan perdana menteri terakhir Hosni Mubarak. Hasil pilpres ini menjadi catatan sejarah tersendiri mengingat ini merupakan kali pertama Ikhwanul Muslimin menempatkan wakilnya untuk memegang kendali kekuasaan tertinggi di Mesir. Ikhwanul Muslimin sendiri pernah mendapat sanksi sebagai organisasi terlarang di negara itu ketika Mesir masih dipimpin oleh Presiden Nasser. Baru setelah Mubarak tidak lagi menjadi penguasa di Mesir, Ikhwanul Muslimin mendapatkan kebebasan khususnya terlibat dalam politik dan membentuk sebuah partai politik. Berdasarkan kondisi tersebut, tidak sedikit yang meragukan Mursi mampu memimpin pemerintahan.

¹²⁹ _____, 2012, "Rakyat Mesir Tetap Minta Mubarak dan Keluarga Dihukum Mati", diakses melalui <http://www.metrotvnews.com/mobile-site/read/newsvideo//2012/06/05/152399/Rakyat-Mesir-Tetap-Minta-Mubarak-dan-Keluarga-Dihukum-Mati/7> pada tanggal 5 Juni 2012 pukul 15.01 WITA

¹³⁰ _____, 2012, "Mohamed Mursi, Presiden Mesir dengan Kekuasaan Terbatas", diakses melalui <http://www.beritasatu.com/fokus/56008-mohamed-mursi-presiden-mesir-dengan-kekuasaan-terbatas.html> pada tanggal 25 Juni 2012 pukul 08.00 WITA

Mursi selanjutnya membentuk pemerintahannya dengan mengutamakan pembagian kekuasaan dengan berbagai pihak. Hal ini ditunjukkannya dengan memasukkan sebagian besar pejabatnya berasal dari kalangan independen. Salah satu contohnya dan yang paling utama adalah Perdana Menteri pilihan Mursi bernama Hisham Qandil adalah seorang politisi yang berasal dari independen. Lebih lanjut, dari tiga puluh enam orang komposisi dalam kabinet menteri, hanya lima orang (14%) yang berasal dari partainya FJP, sebagian besar lainnya adalah profesional teknokrat dan politisi independen.¹³¹

Presiden Mursi berupaya memperbaiki kondisi kementerian dalam negeri dan menciptakan keamanan dimana pasca revolusi terjadi kekacauan yang sangat luar biasa. Mursi bisa dikatakan berhasil menciptakan keamanan dan membangun stabilitas di Mesir. Disamping itu, Mursi juga berhasil mengganti sejumlah perwira di jajaran Jenderal Mesir yang sudah lama berkuasa sejak rezim Mubarak dengan para perwira yang dinilai lebih memiliki integritas terhadap pemerintah dan negara. Marsekal Hussein Tantawi digantikan oleh Abdul Fatah al Sisi dalam kebijakan pembersihan Mursi dalam tubuh militer ini.

Awal masa kepemimpinan Mohammed Mursi diakuinya tidak cukup memuaskan. Meskipun lebih lanjut disebutkan bahwa apa yang dicapai pemerintahannya menurut standar layak professional telah mencapai 70% dari apa yang ditargetkan selama 100 hari. Penilaian tersebut didasarkan pada program yang telah berjalan maupun program yang pelaksanaannya masih terus berlangsung. Terdapat 64 poin program yang dijanjikan Mursi diawal kepemimpinannya dalam rangka menyediakan solusi yang cepat untuk menyelesaikan beberapa masalah

¹³¹ _____, 2012, "Brothers Cabinet", diakses melalui <http://www.egyptindependent.com/news/brothers-cabinet> pada tanggal 3 Agustus 2012 pukul 15.00 WITA

yang sifatnya kronis. Program tersebut termaktub dan dikenal dengan program *traffic, security, rubbish, bread, and fuel*.¹³²

Kelemahan utama pemerintahnya adalah kemampuan untuk memasok energi gas bagi rakyat Mesir. Negara saat itu menjual tabung gas dikisaran harga 5 pound Mesir sebagai bagian dari program subsidi energi. Bila saja tidak diterapkan kebijakan subsidi energi, harga energi yang harus dibayarkan akan jauh lebih mahal.

Perekonomian Mesir pasca revolusi sangat terpuruk. Arus masuk investasi asing ke Mesir mencapai titik nol. Devisa dari sektor pariwisata anjlok hingga 80% dan Mesir merugi USD 40 juta setiap hari akibat terhentinya aktifitas pariwisata. Tingkat kemiskinan Mesir naik tajam hingga 70% dimana 48% warga Mesir hidup dibawah garis kemiskinan, bahkan jumlah tersebut semakin meningkat. Utang luar negeri dan domestik mencapai USD 180 miliar atau 90% dari pendapatan domestik nasional Mesir. Pemasukan negara juga susut akibat produksi terhenti, baik akibat revolusi maupun unjuk rasa buruh menuntut kenaikan upah. Pada Mei 2011, sektor industri Mesir merugi mencapai USD 3,2 miliar. Cadangan devisa Mesir anjlok dari USD 36 miliar pada Desember 2010 menjadi USD 16 miliar pada April 2012. Pemerintah Mesir mengklaim rugi USD 1 miliar per bulan sejak 25 Januari. Pertumbuhan ekonomi anjlok hanya 2,5% pada tahun 2011 dan hanya naik hingga 4% pada tahun 2012.¹³³

¹³² _____, 2012, "Egypt's Morsi Lists Successes of First 100 Days", diakses melalui <http://www.rawstory.com/rs/2012/10/egypts-morsi-lists-successes-of-first-100-days/> pada tanggal 8 Oktober 2012 pukul 16.00 WITA

¹³³ _____, 2012, "Mursi Vs Shafik, Citra IM Kontra NDP", diakses melalui <http://m.kompas.com/news/read/2012/05/27/03333571/mursi.vs.shafik.citra.im.kontra.ndp> pada tanggal 29 Mei 2012 pukul 13.10 WITA

Mursi bekerja untuk menghadapi tantangan ekonomi Mesir yang begitu berat. Dalam satu tahun saja menurut penuturan mantan penasehat Presiden Mursi, Wael Haddana¹³⁴, pemerintah Mesir telah berhasil melakukan kebijakan ekonomi di beberapa sektor dan terus berlanjut sebagai upaya mengimplimentasikan visi pemerintah dalam bidang ekonomi. Dalam keadaan lingkungan ekonomi global yang begitu sulit, GDP Mesir masih terus berkembang dari angka 1,8% menjadi 2,4%, disamping berkembangnya kondisi investasi sebanyak 7% sebesar 180 miliar pound Mesir. Dalam bidang pariwisata, pemerintah berupaya memulihkan kestabilannya sama seperti kondisi sebelum revolusi terjadi; produksi gandum dalam negeri Mesir mengalami peningkatan sehingga mengurangi aktifitas impor gandum dari luar negeri; 6,4 juta pegawai sektor publik akan menerima kenaikan gaji sebesar 40% pada tahun 2013-2014 dibandingkan pada tahun 2011-2012; peningkatan asuransi kesehatan kepada 13 juta anak di Mesir; menarik investasi asing untuk membangun industri pabrik Samsung terbesar di kawasan; pemerintah melakukan ekspansi dan *re-development* terhadap Terusan Suez untuk mendapat penghasilan yang maksimal terhadap jalur penting tersebut.

Mursi melakukan kunjungan keluar negeri sebagai salah satu upayanya dengan tujuan mendorong perekonomian. Perjalanannya ke Addis Ababa, Beijing, New York, dan beberapa tujuan negara lainnya telah membawa dukungan ekonomi Mesir yang sedang mengalami krisis. Mesir mendapatkan bantuan sebesar USD 10 miliar dalam bentuk investasi. Selain itu Mursi juga berusaha mengamankan pinjaman USD 4,8 miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menutup defisit anggaran. Oleh Mursi, kebijakan tersebut tidak akan mengubah prinsip-

¹³⁴ Wael Haddara, 2013, "Opinion – Egypt Narratives: A Brief Critique of the Reasons Advanced to Justify the Egyptian Military Coup of July 2013", diakses melalui <http://www.thecordobafoundation.com/news.php?id=3&art=150> pada tanggal 29 Juli 2013

prinsip hukum Islam karena suku bunga pinjaman yang hanya 1,1% dan hal itu tidak dianggap sebagai sebuah riba.

Terkait pelaksanaan politik luar negeri, Mursi ingin mengembalikan posisi Mesir sebagai kekuatan kokoh di Timur Tengah melalui pembenahan pemerintahan yang fokus terhadap aspek ekonomi dan keamanan. Mursi sudah menunjukkan perannya yang efektif di forum regional, termasuk KTT Non Blok di Teheran, yang tegas menyuarakan penggulingan Presiden Suriah Bashar al Assad yang menjadi sekutu Iran dan Irak. Selain itu, Mursi juga menyerukan pembelaan terhadap rakyat Palestina di forum unilateral PBB dalam bentuk dukungan kemerdekaan rakyat Palestina.¹³⁵

Konflik dalam pemerintahan Mursi mulai terlihat antara Ikhwanul Muslimin dan kelompok liberal-sekuler. Bahkan kedua kekuatan ini saling mendukung ketika upayanya menentang elit politik rezim Mubarak yang masih berada dalam pemerintah. Namun Ikhwanul Muslimin dan Mursi tampak tidak bisa membendung rezim lama di pemerintahan sekaligus memuaskan kelompok sekuler dan Kelompok Kiri. Dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden Mursi November 2012 akhirnya semakin mempertajam level konflik terhadap kelompok sekuler.

November 2012, Mursi mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa semua produk hukum yang dihasilkan parlemen tidak bisa dibatalkan oleh pengadilan. Langkah ini ditempuh untuk menjaga agar proses pemerintahan tidak terganggu oleh Mahkamah Konstitusi dan lembaga yudikatif yang masih dikuasai oleh para

¹³⁵ _____, 2012, "100 Hari Pemerintahan Presiden Mursi, 70 Persen Rakyat Puas", diakses melalui <http://m.voa-islam.com/news/analysis/2012/10/08/21025/100-hari-pemerintahan-presiden-mursi-70-persen-rakyat-puas/> pada tanggal 9 Oktober 2010 pukul 10.30 WITA

pejabat era Mubarak.¹³⁶ Terbukti pada Juni 2013, Mahkamah Konstitusi menyatakan dewan perwakilan majelis rendah dan Majelis Shura inkonstitusional dan harus dibubarkan. Disamping itu, melalui dekrit ini Mursi ingin mempercepat pembentukan konstitusi baru.

Mengumumkan dekrit seperti itu malah menimbulkan protes kepada Mursi. Kubu oposisi yang tidak setuju dengan langkah yang ditempuh Mursi mengambil sikap walk out dalam sidang parlemen. Semakin parah ketika kubu oposisi juga selalu menolak usulan dan ajakan dialog oleh Presiden Mursi lalu mengatakan bahwa kubu mayoritas di parlemen berusaha berlaku otoriter terhadap mereka.

Mengatasi masalah tersebut, Mursi yang kehilangan oposisi dalam melanjutkan pemerintahan memberikan solusi. Solusi tersebut adalah mempersilahkan kubu oposisi untuk menuliskan keberatannya dan menuliskan revisi yang mereka kehendaki. Mursi tanpa waktu lama langsung menyetujui draft yang diajukan oleh kubu oposisi. Proses ini dipimpin oleh M. Salim al Awa dan Ayman Nour. Begitu luasnya ruang yang dibuka oleh Mursi dalam mengakomodasi artikulasi kepentingan dalam struktur pemerintahannya.

Meskipun upaya telah dilakukan oleh Mursi untuk menjaga stabilitas pemerintahannya, tetap saja tidak bisa menghindarkannya dari tekanan oposisi. Presiden Mursi yang diberi mandat untuk mewujudkan tujuan revolusi akhirnya dipandang gagal merealisasikannya. Oleh oposisi, yang terjadi adalah kontra revolusi yaitu kediktatoran dalam bentuk otoritarianisme Islamis. Polarisasi terjadi antara kekuatan politik kedalam kedua kubu Islamis vs non-Islamis, dimana rezim Ikhwanul Muslimin dituduh sebagai Fir'aun baru sementara para pendukung IM

¹³⁶ _____, 2012, "Egypt's Mursi removes legal official seen as Mubarak loyalist", diakses melalui <http://www.reuters.com/article/2012/10/11/us-egypt-president-idUSBRE89A1NN20121011> pada tanggal 10 November 2012 pukul 15.30 WITA

menyebut kelompok oposisi *Front Penyelamatan Nasional* sebagai penghasut dan pemecah belah persatuan Mesir.

Protes terhadap Mursi dan Ikhwanul Muslimin semakin meluas. Pihak oposisi menuduh Morsi dan pendukungnya telah mengkhianati revolusi dengan berupaya untuk memonopoli kekuasaan. Aksi protes diiringi dengan rangkaian kerusuhan dan bentrokan antara aparat keamanan dan demonstran membawa korban tewas sebanyak 60 orang dalam berbagai bentrokan. Kondisi ini membuat legitimasi Ikhwanul Muslimin dalam pemerintahan mulai mengalami defisit.

Tepat setahun masa jabatan pemerintahan ditandai dengan lengsernya Presiden Mursi setelah jutaan rakyat berdemonstrasi di lapangan Tahrir. Para demonstran menyuarakan *irhal, irhal* (pergilah, hengkanlah). Berawal dari aksi massa tersebut, akhirnya Dewan Militer Mesir mengeluarkan ultimatum agar Mursi melakukan dialog nasional dalam kurun waktu 2x24 jam dan jika tidak dilakukan, Militer akan mengambil kekuasaan. Mursi bersikeras bertahan yang akhirnya militer mengambil kekuasaan darinya tepat ketika batas waktu ultimatum berakhir. Militer kemudian menahan Mursi dan mengejar para pimpinan Ikhwanul Muslimin. Selain itu, militer menutup semua kantor-kantor media Islam dan media yang mendukung Mursi dan Ikhwanul Muslimin.

Gerakan massa menentang Presiden Mursi disebutkan merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Mesir mengalahkan Revolusi 25 Januari. Aksi ini juga dikenal sebagai Revolusi jilid II. Gerakan *Tamarrud* (Pembangkangan) adalah kelompok yang menggerakkan aksi tersebut dan mereka sebagian besar terdiri dari *6 April Youth Movement* dan anggota Kelompok Kiri yang ada di Mesir. Mereka

mengklaim telah mengumpulkan tanda tangan petisi sebanyak 22 juta tanda tangan untuk menentang Mursi.

Abdel Fatah al Sisi selaku Ketua Dewan Militer melengserkan Mursi pada Juli 2013. Lengsernya Mursi diikuti oleh tindakan keras terhadap Ikhwanul Muslimin termasuk pimpinan dan para simpatisannya. Setidaknya 1.400 orang tewas sejak Juli 2013 dan lebih dari 15.000 orang dipenjara. Mursi dan para pimpinan Ikhwanul Muslimin merupakan bagian dari mereka yang sekarang masih menjalani penahanan dan berhadapan dengan pengadilan.¹³⁷

Mesir selanjutnya berada dibawah pemerintahan interim yang dikendalikan militer selama setahun pasca penggulingan Mohamed Mursi. Tahapan pemilu telah dilaksanakan pada Mei 2014 yang dimenangkan oleh Abdul Fatah al Sisi. Dalam pilpres kali ini al Sisi bersaing dengan Hamdan Sabahi dengan meraih suara mutlak sebesar 96,7%.¹³⁸

Kondisi perekonomian Mesir pasca kudeta militer tidak juga kunjung membaik. Setahun militer memimpin Mesir, sebagian besar warga melakukan protes terhadap Abdel Fattah al Sisi diberbagai kota-kota besar. Protes yang disampaikan melalui aksi demonstrasi dilakukan atas ketidakpuasan dari memburuknya ekonomi. Oleh para demonstiran, pemerintah dianggap tidak mampu mengontrol harga barang-barang pokok serta memberikan pelayanan yang layak kepada masyarakat, dimana masih ada masyarakat yang tidak bisa mengakses layanan penting terutama listrik.

¹³⁷ _____, 2014, "El-Sisi: Militer Tak Akan Punya Peran Lebih bila Saya Terpilih", diakses melalui <http://www.internasional.kompas.com/read/2014/05/06/0843504/El-Sisi.Militer.Tak.Akan.Punya.Peran.Lebih.bila.Saya.Terpilih>, pada tanggal 6 Mei 2014 pukul 10.00 WITA

¹³⁸ _____, 2014, "Mesir dan Tantangan Pemerintahan El-Sisi", diakses melalui <http://www.indonesian.tribune.com/ranah/telisik/item/81611-Mesir-dan-Tantangan-Pemerintahan-El-Sisi> pada tanggal 16 Juni 2014 pukul 21.00 WITA

Data terbaru mengenai ekonomi Mesir menunjukkan defisit anggaran serta utang dalam dan luar negeri Mesir semakin membengkak. Defisit anggaran tersebut mencapai lebih dari USD 30 miliar sementara rata-rata utang publik pemerintah Mesir mencapai USD 44 miliar. Disamping itu, kondisi sosial ekonomi menunjukkan 12 juta warga Mesir dilaporkan tidak memiliki pekerjaan dimana jumlah tersebut kebanyakan berusia muda dengan rentang usia 15 hingga 29 tahun , 80% berpendidikan tinggi.¹³⁹

Defisit anggaran dan utang tersebut mendorong rezim al Sisi mengambil kebijakan yang semakin tidak menguntungkan rakyat. Demi mendapatkan bantuan ekonomi dari IMF sebagai alasan penyelamatan ekonomi, al Sisi melakukan kebijakan pengetatan anggaran dan pencabutan subsidi bahan-bahan pokok. Rencana selanjutnya bahkan melakukan pengurangan subsidi terhadap bahan bakar minyak.

Negara-negara pendukung kudeta dari kalangan negara-negara Teluk telah menarik bantuan keuangan kepada Mesir. Pejabat Bank Sentral Mesir menyebut Arab Saudi maupun Uni Emirat Arab tidak member bantuan keuangan seperti yang telah dijanjikan setelah kudeta. Ia turut menafikan Kuwait telah mengirimkan bantuan USD 4 miliar. Qatar juga telah menghentikan fase kedua dan ketiga bantuan USD 4 miliar bahkan tidak memutuskan tanggal tawaran yang baru. Arab Saudi sendiri merasa telah terlalu banyak mengulurkan bantuan kepada Mesir sejak penggulingan Mursi sehingga menasehatkan agar Mesir menetapkan mekanisme perundingan dengan IMF untuk mendapat pinjaman sesegera mungkin. Semakin sulit

¹³⁹ ____, 2014, “Krisis Ekonomi Mesir dan Ketidakpuasan Rakyat”, diakses melalui <http://www.indonesian.tribune.com/indonesian/ekonomi/krisis-ekonomi-mesir-dan-ketidakpuasan-rakyat> pada tanggal 21 Juli 2014 pukul 20:40 WITA

ketika Turki dan beberapa perusahaan dari berbagai negara telah menarik diri dari pasar Mesir.¹⁴⁰

Berdasarkan kondisi secara umum tersebut, al Sisi akan dihadapkan pada banyak persoalan rumit di bidang politik, keamanan, serta yang paling krusial adalah persoalan ekonomi negara. Rekam jejak pemerintah baru Mesir akan mempengaruhi popularitas yang telah diperoleh al Sisi meskipun hal yang mungkin saja terjadi adalah kebencian rakyat yang semakin luas terhadapnya. Berbanding terbalik dengan apa yang telah dijanjikan al Sisi sebagai presiden baru Mesir saat itu dimana akan memperbaiki kondisi sosial ekonomi rakyat dalam dua tahun dan berjanji akan merealisasikan cita-cita revolusi tiga tahun yang lalu berdasarkan semangat yang tertuang dalam slogan *bread, freedom, and social justice*. Konsekuensi buruk akan terjadi terhadap pemegang kekuasaan jika janji tersebut tidak terealisasi.

¹⁴⁰ _____, 2013, “2 Bulan Kudeta, Mesir Alami Krisis Ekonomi”, diakses melalui <http://news.firmadani.com/read/2013/09/09/2-bulan-kudeta-mesir-alami-krisis-ekonomi/> pada tanggal 9 September 2013 pukul 15.00 WITA

BAB IV
MASA DEPAN DEMOKRASI MESIR PASCA PEMERINTAHAN
HOSNI MUBARAK

A. Pembangunan Demokrasi dalam Aspek Politik Pemerintahan dan Sosial Ekonomi

1. Demokratisasi dalam Aspek Politik dan Pemerintahan

Tersingkirnya Hosni Mubarak dari kursi kekuasaan tertinggi di Mesir oleh revolusi rakyat membawa negara tersebut ke dalam suatu masa perubahan politik. Pemerintahan Hosni Mubarak menerapkan kebijakan-kebijakan politik yang berorientasi pada praktek otokrasi dengan bantuan represi, korupsi, dan manipulasi dalam pemilu. Tentunya seiring berjalannya waktu, rakyat merasa penerapan politik model seperti itu tidak membawa dampak yang baik terhadap kehidupan mereka. Perubahan pun terjadi seiring berakhirnya kekuasaan rezim hingga pada masa-masa penting transisi politik yang terjadi di Mesir sampai saat ini.

Revolusi Mesir menunjukkan bahwa rakyat menginginkan perubahan dalam bentuk peralihan yang termobilisasi, penuh ketidaksabaran, hingga bersifat kekerasan. Sulitnya berada dalam pengalaman sistem politik otoriter, semangat rakyat telah mengkristal dan berani memanifestasikan hak sekaligus gagasan mereka untuk menentang otoritas rezim berdasarkan penyangkalan terhadap hak asasi dan kontrak sosial terhadap negara. Kini rakyat Mesir telah memiliki modal besar untuk terus berjuang terutama dalam membangun pemerintahan baru yang benar-benar menerapkan politik demokrasi substantif. Apa yang diharapkan adalah

pemerintahan yang bersikap lebih manusiawi dan lebih peka terhadap kebutuhan rakyatnya.

Aksi gerakan massa yang menumbangkan Hosni Mubarak merupakan hasil dari infiltrasi gerakan massa itu sendiri. Tidak tersedianya ruang dialog oleh pemerintah sebagai kanal aspirasi untuk mengakomodasi kepentingan rakyat memunculkan aksi pembangkangan masyarakat. Secara perlahan dan meyakinkan, gerakan menentang pemerintah yang telah lama dilakukan oleh kelompok buruh, intelektual muda, profesi, hingga kelompok ideologi politik akhirnya bermuara di *Tahrir Square* pada tahun 2011 sebagai pusat dari aksi tersebut. Kelompok seperti *6 April Youth Movement*, *National Movement for Change*, *Kifayah*, *Judges Club*, *Ikhwanul Muslimin*, dan kelompok ideologi kiri, terhimpun dan bersatu dengan tujuan menumbangkan rezim berkuasa. Selanjutnya membentuk gerakan massa yang kuat, terpadu, dan penuh keberanian menghadapi aparat keamanan yang berusaha melindungi rezim Mubarak saat itu.

Tiga tahun berlalu sejak keberhasilan menumbangkan rezim Hosni Mubarak, gerakan massa di Mesir terlihat berbeda. Pada dasarnya, intensitas demonstrasi sama sekali tidak berkurang. Tidak ada kelelahan sama sekali dan perjuangan terus menerus dilakukan demi perubahan. Tetapi bila dicermati, perkembangan gerakan massa telah terpolarisasi kembali dalam kelompok dan kepentingan masing-masing.

Kelompok-kelompok pejuang revolusi ini kini terlihat bergerak sesuai kepentingannya dalam konstelasi politik di Mesir. Bila mencermati kondisi ini, dapat disimpulkan bahwa aksi gerakan massa Mesir kini berada dalam keadaan yang lemah dan terjadi kemunduran. Tidak jarang terjadi konflik bahkan mengarah kepada tidak saling mengakui eksistensi keberadaan masing-masing kelompok. Hal

ini terlihat jelas selama masa transisi politik di Mesir selama tiga tahun terakhir, sehingga dapat dikatakan Mesir kehilangan modal besar dalam bentuk kesatuan masyarakat sipil/*civil society* yang terwujud dalam kesatuan dalam gerakan massa.

Pasca lengsernya Hosni Mubarak, Mesir menghadapi perjuangan dalam membangun demokrasi. Dalam upaya mewujudkannya, Mesir harus berhasil melewati masa transisi politik menuju demokrasi. Transisi politik disini diartikan sebagai masa peralihan negara dari bentuk kekuasaan otoriter hingga terbentuknya sebuah pemerintahan yang demokratis. Masa peralihan ini tidak selalu mudah dihadapi, sebaliknya, dalam masa tersebut hadir berbagai tantangan yang tentu tidak mudah dihadapi. Berdasarkan apa yang terjadi di Mesir, transisi politik dibagi dalam dua fase yaitu fase pasca tergulingnya rezim Mubarak dan fase pasca kudeta militer.

Mencermati proses transisi politik di Mesir hingga saat ini, terdapat beberapa aktor yang berperan penting didalamnya. Selama dua fase transisi politik tersebut, *Militer Mesir* muncul sebagai aktor utama dimana ketika mereka memegang kekuasaan tertinggi pemerintahan transisi pasca Hosni Mubarak hingga perannya dalam kudeta militer terhadap Mohamed Mursi dan sekaligus menempatkan Abdul Fatah al Sisi sebagai presiden Mesir selanjutnya hingga saat ini. Selanjutnya, *Ikhwanul Muslimin* yang memegang kekuasaan setelah fase awal transisi selesai; *elit era Mubarak* yang masih banyak menempati jabatan-jabatan penting, khususnya dalam lembaga peradilan; *politisi nasionalis-liberal-sekuler*; dan *gerakan rakyat/pemuda pejuang revolusi* yang selalu mengawasi jalannya pemerintahan dan melakukan aksi demonstrasi.

Kemajuan kehidupan politik ditunjukkan ketika kekuasaan berhasil dialihkan kepada pemerintahan sipil. Kepemimpinan saat itu oleh Mohammed Mursi dan Ikhwanul Muslimin dalam pemerintahan sipil pertama Mesir bisa dikatakan cukup berhasil membangun suasana demokrasi. Ditandai dengan makin bebasnya wacana demokrasi, kebebasan, dan independensi politik. Selama masa kepemimpinannya muncul ragam dan gerakan organisasi sipil, partai politik, dan keterbukaan informasi oleh media. Mursi juga bersikap akomodatif, kompromistis, dan membuka ruang yang luas terhadap kekuasaan di Mesir. Sikap dan kebijakan yang sangat demokratis ditunjukkan oleh pemerintahn tersebut.

Upaya yang dilakukan Mursi ternyata dianggap tidak cukup dan pada akhirnya kudeta militer terjadi pada pemerintahnya. Konflik dalam tubuh pemerintahan yang tidak kunjung selesai dengan politisi oposisi liberal sekuler, serta desakan rakyat direspon dengan kudeta militer. Kejadian ini memberikan kesan bahwa penggulingan kekuasaan Mursi di Mesir seolah menjadi hal yang lazim dan dibenarkan dengan tindakan pimpinan militer yang didukung politisi oposisi, dan dimobilisasi oleh sebagian massa. Kudeta terhadap Mursi bisa dikatakan kudeta terhadap demokrasi terlepas dari pertarungan ideologi yang keras terjadi antara gerakan Ikhwanul Muslimin dengan pihak oposisi liberal sekuler maupun ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja pemerintahan, kudeta semacam ini adalah hal yang tidak dapat dibenarkan.

Berdasarkan kudeta militer ini akan muncul preseden bahwa apabila oposisi dan rakyat tidak puas, maka kudeta militer terhadap pemerintah adalah jalan satu-satunya. Preseden ini memutuskan dialektika dan diskursus dalam mengelola negara. Hal ini tentu bukan saja menjadi ancaman bagi Mesir semata, tetapi juga

ancaman bagi seluruh negara yang mengakui dirinya sebagai negara demokratis serta akan menurunkan derajat dan hakekat demokrasi.

Peristiwa penggulingan ini tentu mencoreng perjalanan sejarah politik Mesir. Mesir harus membayar mahal dalam pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dan menyangkal legitimasi dari rakyat melalui pemilu. Kerusuhan dan perang saudara yang menimbulkan korban jiwa menjadi harga yang terlalu mahal untuk negara. Perlu diingat bahwa Mesir berada dalam masa transisi dari sebuah era yang sangat otoriter di masa rezim Hosni Mubarak menuju era demokrasi dan keterbukaan, upaya rekonsiliasi nasional yang menjadi keinginan rakyat akan hilang dan harus mengulang dari awal.

Kudeta militer Mursi menjadi citra buruk sistem pemerintahan di Mesir. Setidaknya dapat disimpulkan dalam beberapa poin, yaitu

1. Kudeta militer menunjukkan keburukan sistem pemerintahan yang ada sehingga menciptakan instabilitas politik. Konstitusi ternyata dapat dilanggar sehingga yang terjadi bukan saja demokrasi prosedural tanpa substansi tetapi juga ketiadaan demokrasi itu sendiri. Kedaulatan rakyat harus selalu dibarengi dengan kedaulatan hukum agar kehidupan pemerintahan senantiasa bertujuan untuk menegakan sebuah negara hukum yang demokratis dan demokrasi konstitusional
2. Lengsernya Mursi menunjukkan rendahnya kesadaran bahwa pemilu seharusnya menjadi upaya untuk mengalihkan pemerintahan secara damai. Regenerasi kepemimpinan yang sah harus melalui mekanisme pemilu, dan pihak-pihak yang ingin duduk dalam kekuasaan pemerintahan harus bertarung melalui pemilu yang demokratis.

3. Peristiwa ini membuktikan ketidakmapanaan kanal aspirasi masyarakat dan mekanisme *check and balance* antar lembaga pemegang kekuasaan di Mesir. Ketidakpuasan harus dilembagakan dan dijalankan oleh seluruh lapisan agar kehidupan ketatanegaraan yang dinamis tidak tersendat baik oleh penguasa, sistem, hingga kekacauan faktual.
4. Rezim militer Mesir tidak ingin melepaskan kekuasaannya di masa lalu sehingga tidak siap menghadapi perubahan melalui gelombang demokratisasi yang hadir pasca Revolusi 25 Januari dengan menggunakan otoritasnya sewenang-wenang.

Semasa kekuasaan Mubarak ternyata memang menjadikan militer sebagai *the most powerful constituency* di Mesir. Militer dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan pada masa pemerintahannya terutama dalam bidang ekonomi, militer terlibat dalam pengembangan infrastruktur dan proyek-proyek pembangunan dalam negeri Mesir. Sudah menjadi konsekuensi logis bila hal ini kemudian berdampak pada keberlangsungan kepemimpinan Mubarak yang mendapat sokongan penuh dari pihak militer.¹⁴¹ Bahkan Mubarak juga berprinsip bahwa militer merupakan sarana negara yang paling efisien dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sehingga militer Mesir pada masa pemerintahan Mubarak memiliki fungsi yang signifikan dalam politik domestik Mesir. Sedangkan dalam kehidupan politik, militer juga mendapatkan pos dalam kementerian serta jabatan gubernur yang ditempati oleh pihak-pihak berlatar belakang militer pilihan Mubarak.

Berada diposisi seperti ini tentunya sulit untuk dilepaskan oleh Militer Mesir.

Pada masa-masa transisi politik, tidak sedikit upaya yang dilakukan Militer Mesir

¹⁴¹ C. Ryan. 2000. "Political Strategies and Survival Regimes in Egypt", *Journal of Third World Studies*, Vol. 18, No. 2, h. 7-8

dan didukung oleh lembaga peradilan bentukan era Mubarak dalam menjaga agar kepentingannya tidak terganggu. Membubarkan parlemen hasil pemilu presiden membawa Militer Mesir yang saat memimpin memperoleh kekuasaan eksekutif sekaligus legislatif. Kekuasaan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Militer Mesir selain menetapkan secara sepihak perumusan dan penetapan konstitusi baru, salah satunya yang menjadi perhatian adalah *Maklumat Pelengkap Konstitusi*¹⁴² dimana beberapa pasalnya dianggap sebagai usaha militer memperluas kekuasaan dan membatasi kekuasaan presiden terpilih Mohamed Mursi. Pasal tersebut antara lain mengatur kekuasaan Kepala Negara yaitu presiden tidak bisa menyatakan perang kecuali harus terlebih dahulu disetujui *SCAF* atau Dewan Militer. Begitu pula bila negara dalam keadaan kacau dan presiden ingin meminta campur tangan, maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan militer.

Isi pasal tersebut sudah menggambarkan sejak awal bahwa selain ingin mempertahankan kepentingannya, Militer Mesir juga hakekatnya tidak menginginkan adanya perubahan politik di negeri tersebut. Militer Mesir sangat menyadari kekuatan yang berasal dari rakyat namun disamping itu juga sangat memahami kapabilitas para pelaku politik seperti Ikhwanul Muslimin dan politisi liberal sekuler. Sehingga Militer Mesir tetap mampu mempolitisasi kehidupan politik meski ditengah konteks perubahan yang tengah berlangsung di Mesir. Melepaskan kekuasaan untuk sementara waktu kepada sipil dan kemudian mengambilnya kembali dalam sebuah kudeta militer penggulingan terhadap presiden sipil pertama di negara tersebut.

¹⁴² _____, 2012, "Sejuta Umat Protes Konstitusi Militer", diakses melalui <http://m.republika.co.id/berita/internasional/global/12/06/19/m5u57u-sejuta-umat-mesir-protes-konstitusi-militer> pada tanggal 19 Juni 2012 pukul 08.00 WITA

Esam al Amin¹⁴³ bahkan menyebutkan bahwa militer berusaha melindungi diri melalui konstitusi. Dengan adanya pasal-pasal tersebut, militer berusaha menjaga kejahatan politik dan skandal korupsinya selama rezim Mubarak berkuasa tak dituntut oleh kaum revolusioner. Militer memasang target sebagai garansi apabila kekuasaan diserahkan pada pemerintahan sipil yaitu *pertama*, mengamankan kekayaan haram para jenderal yang bernilai 25-35% dari ekonomi hasil korupsi; *kedua*, imunitas dan impunitas dari segala kejahatan politik dan ekonomi yang dilakukan dimasa lalu; *ketiga*, memperoleh status istimewa dari konstitusi yang memperbolehkan militer mengontroll anggarannya tanpa pengawasan sipil dan memiliki hak untuk kebijakan strategis, termasuk hubungan luar negeri dan keputusan untuk menyatakan perang dan damai.

Berbicara mengenai pilpres 2014, Abdel Fatah al Sisi memenangkan suara mutlak rakyat Mesir. Namun, ternyata perolehan suara pada pilpres 2014 yang tinggi untuk Sisi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pemerintah interim Mesir melakukan berbagai cara supaya rakyat Mesir mendatangi tempat pemungutan suara. Selain melakukan mobilisasi massal dan membangkitkan sentimen nasionalisme dengan menyebarkan siaran melalui media massa pemerintah mengenai sejarah Mesir, pemerintah juga menyebut orang yang tidak berpartisipasi dalam pemilu sebagai pengkhianat bangsa. Selain itu, pemerintah juga mengancam akan menjatuhkan denda bagi yang tidak mendatangi TPS sebesar 500 pound Mesir, jumlah tersebut relatif besar bagi rata-rata warga Mesir yang sedang mengalami masalah ekonomi.

¹⁴³ Esam al-Amin, 2012, "The Calculus of Egypt's Presidential Race", International Policy Digest, diakses melalui <http://www.internationalpolicydigest.org/2012/04/23/the-calculus-of-egypts-presidential-race/> pada tanggal 22 Juli 2013 pukul 13.00 WITA

Perbandingan mengenai pemilu presiden 2012 dan 2014 dari aspek partisipasi rakyat dan perolehan suara menunjukkan bahwa pemilu presiden yang belum lama ini digelar sebagai upaya untuk menjustifikasi terpilihnya seorang jenderal dan kembalinya militer dalam politik Mesir. Tingkat partisipasi pemilu tahun 2012 mencapai 52%, tapi kemudian menurun menjadi 42% pada pemilu presiden tahun 2014 yang dimenangi al Sisi. Meskipun pemerintah interim melakukan berbagai cara mulai dari tekanan hingga ancaman terhadap warganya sendiri, tapi tingkat partisipasi rakyat lebih rendah dari sebelumnya. Dari sekitar 54 juta warga yang memiliki hak pilih pada pemilu presiden 2014, hanya 25 juta orang yang mendatangi tempat pemungutan suara dan menggunakan haknya.¹⁴⁴

Berdasarkan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. *Pertama*, pada pemilu 2012 terjadi persaingan sebenarnya yang dimenangkan Mursi. Sedangkan pada pemilu 2014 sudah ditetapkan sebelumnya, dan Sabahi sendiri bukan rival yang kuat.
2. *Kedua*, banyak kalangan yang mempersoalkan penetapan hanya dua orang yang bersaing dalam pemilu presiden 2014. Kandidat potensial dicoret dari daftar capres oleh komisi pemilu, padahal mereka memiliki kekayaan.
3. *Ketiga*, pemilu presiden 2014 hanya merupakan bentuk manipulasi dan rekayasa politik yang digelar untuk menjustifikasi kembalinya peran militer Mesir dalam politik dan menghapus pemerintahan interim yang merupakan hasil dari kudeta militer dengan sebuah pemerintahan demoratis.

¹⁴⁴ _____, 2014, "Mesir dan Tantangan Pemerintahan El-Sisi", diakses melalui <http://www.indonesian.tribune.com/ranah/telisik/item/81611-Mesir-dan-Tantangan-Pemerintahan-El-Sisi> pada tanggal 16 Juni 2014 pukul 21.00 WITA

Mencermati proses transisi menuju demokrasi dalam kasus Mesir terlihat bahwa fase yang akan ditempuh masih relatif panjang dan bergejolak. Ini dikarenakan intensitas terhadap situasi konflik yang ada dalam negara itu. Konflik-konflik tersebut melibatkan aktor-aktor termasuk antar para elit politik maupun aksi demonstrasi yang terlalu sering berujung pada tindak kekerasan yang tidak sedikit memakan korban jiwa.

Munculnya partai-partai politik baru dan lahirnya kelompok organisasi gerakan rakyat dengan berbagai macam ragam kepentingan tidak berkorelasi positif terhadap cita-cita demokrasi itu sendiri. Masih tidak padunya misi politik guna menyukseskan demokrasi menjadi gambaran riil bagaimana proses dinamika politik di Mesir berlangsung. Bahkan cenderung para aktor berkoalisi bukan hanya didasarkan pada visi dan kepentingan yang sama tetapi lebih kepada sikap oportunis, keberpihakan pada kelompok mana yang memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh kekuasaan dalam konteks kompetisi politik.

Faktor selanjutnya terletak pada buruknya komunikasi politik antar elit maupun antara elit dan rakyat. Buruknya komunikasi politik tidak hanya dikarenakan oleh perbedaan kepentingan politik praktis antara pemerintah dan kekuatan partai-partai, tetapi juga disebabkan oleh tidak adanya konsensus politik minimal yang dibutuhkan sebagai modal menyusun desain besar reformasi politik kedepan. Buruknya komunikasi ini malah membawa kondisi kedalam gesekan-gesekan politik yang direspon secara emosional oleh elit pemerintah misalnya respon Ikhwanul Muslimin terhadap Front Penyelamatan Nasioanl dengan menuduh adanya yang ingin menggagalkan revolusi dan begitu pula sebaliknya

dimana kelompok non-pemerintah mengatakan bahwa rezim pemerintah pimpinan Mursi tidak bersifat akomodatif cenderung menjadi otoriter baru.

Titik krusial dinamika politik saat ini adalah bagaimana elite-elite politik menyadari betapa berat konsekuensi yang akan terjadi jika halangan-halangan demokrasi tidak bisa diatasi. Ketidadaan wibawa hukum, pijakan norma-norma demokrasi masih lemah, terlalu sering terjadi perbedaan tafsir elit atas arah reformasi politik, adanya elit oportunis yang hanya sekedar ingin berkuasa dan potensi tak terkendali aksi-aksi kekerasan massa yang dengan mudah menyulut terjadinya kerusuhan sosial. Kesemuanya bersifat destruktif sehingga sulit mencapai apa yang diistilahkan oleh penulis sebagai tertib dalam setiap elemen yang ada di Mesir.

Formulasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut terletak pada pemahaman tentang apa yang disebut demokrasi konsosional. Demokrasi konsosional adalah politik yang rivalitasnya saling mengakui bahwa mereka memiliki perbedaan-perbedaan yang esensial yang perlu diselesaikan.¹⁴⁵ Hal ini akan memunculkan kebutuhan untuk saling mengakui eksistensi setiap segmen politik yang ada sehingga yang muncul adalah pergolakan politik transisional yang terkendali tanpa mengorbankan hakekat reformasi itu sendiri.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa transisi demokrasi merupakan titik krusial yang harus dilalui dengan aman dimana respon-respon elit terhadap persoalan-persoalan politik domestik harus menghasilkan konsensus minimal atau *political pact* antar aktor politik yang berkonflik. Diantara elit harus tercipta kondisi politik kondusif untuk lahirnya komitmen dalam menyelamatkan arah reformasi

¹⁴⁵ Kris Nugroho, 2010, "Konsolidasi Demokrasi", diakses melalui http://www.mkp.fisip.unair.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=94:konsolidasi-demokrasi&catid=34:mkp&Itemid=61 pada tanggal 12 September 2013 pukul 17.00 WITA

politik dengan munculnya kesepakatan-kesepakatan minimal menyangkut persoalan-persoalan reformasi domestik. Skala prioritas politik apa yang harus diwujudkan diawal transisi juga harus dirundingkan di antara para elit tanpa mengurangi hak-hak dan kewenangan politik pihak yang memegang kendali pemerintah.

Konsolidasi antar kekuatan politik harus ditekankan guna mencapai konsensus minimal politik demi menggagas desain reformasi yang diinginkan; Membuka jalur dialog multi poros politik, setidaknya untuk menghindari frustrasi politik pihak-pihak yang tidak terakomodasi dalam pemerintahannya. Semua pelaku dalam panggung politik Mesir harus berusaha menemukan titik temu yang sama untuk meluncurkan tindakan politik bersama kearah suatu kepentingan politik secara meluas.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan dalam beberapa poin, yaitu:

1. *Pertama*, gerakan massa harus mampu mengkonsolidasikan dirinya secara politik, organisasi, dan program-program alternatif yang solid. Dengan kondisi saat ini, gerakan massa hanya memiliki kemampuan untuk menggulingkan elit pemegang kekuasaan yang tidak berpihak pada kepentingannya kemudian untuk digantikan oleh kekuatan yang lain. Gerakan massa sudah seharusnya meninggalkan pola-pola gerakan yang tanpa kepemimpinan politik, organisasi, dan teoritik yang jelas jika mereka ingin menuntaskan cita-cita revolusinya.
2. *Kedua*, demokrasi Mesir akan memberikan harapan jika mereka memaknai demokrasi tidak berakhir dalam kotak suara. Selama demokrasi diukur berdasarkan hasil pemilu, maka selama itu pula demokrasi

cenderung melayani atau hanya menjadi kendaraan elite bisnis, militer, dan politik. Demokrasi parlementer harus dibarengi dengan demokrasi partisipatif dimana rakyat terlibat dalam pengambilan keputusan hidupnya setiap hari. Hanya melalui demokrasi partisipatif maka akan ada jaminan bahwa kepentingan rakyat sulit untuk dimanipulasi.

3. *Ketiga*, setelah mencapai konsolidasi demokrasi yang kuat melalui konsensus serta pendalaman terdapat nilai-nilai dan asas demokrasi, para aktor politik di Mesir harus mampu mendorong dan membentuk profesionalisme dalam tubuh militer. Profesionalisme militer disini dimaksudkan agar militer menjadi institusi pendukung demokrasi yang berada dibawah kekuasaan masyarakat sipil. Militer selanjutnya ditekankan untuk hanya fokus terhadap masalah pertahanan dan keamanan saja. Hal ini sangat penting mengingat bahwa Militer Mesir sudah sejak lama telah merusak pengalaman hidup rakyat untuk merasakan kebebasan dalam berdemokrasi, bahwa suara dan aspirasi rakyat sangat dihargai di negeri tersebut.

2. Demokratisasi dalam Aspek Sosial Ekonomi

Demokrasi ekonomi merupakan sebuah konsekuensi dari proses demokratisasi politik. Hal ini terjadi karena ekonomi dan politik selalu berjalan bersama sehingga stabilitas politik berimbas pada ekonomi, begitupun ekonomi akan memberikan pengaruh terhadap pengalaman kehidupan politik. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada demokrasi ekonomi tanpa demokrasi politik. Lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan fisik tetapi individu diberi kesempatan untuk

mengekspresikan kehendak, aspirasi ekonomi, partisipasi, dan kebebasan untuk memilih yang terbaik dalam mewujudkan ekonomi yang terbaik untuk dirinya.¹⁴⁶

Kondisi di Mesir membuktikan pendapat diatas ketika perekonomian rakyat tidak sehat memberikan dampak terhadap instabilitas politik dan keamanan. Saat masa-masa pasca Mubarak berkuasa, konstelasi politik yang dipenuhi konflik berdampak pada sulitnya pemerintah mengangkat kembali perekonomian negara. Lambatnya pemulihan stabilitas politik keamanan, membuat segala kebijakan pemerintah mengatasi perbaikan ekonomi tersendat. Sehingga, pada dasarnya para elit politik dalam rangka konsolidasi demokrasi juga seharusnya secara bijak mempertimbangkan perekonomian negara sebagai prioritas karena hal ini terkait langsung dengan nasib dan kepentingan rakyat secara luas.

Mesir berada dalam krisis ekonomi karena lemahnya pengelolaan keuangan negara. Kondisi sosial Mesir saat ini tidak menguntungkan ditengah meningkatnya angka pengangguran serta kemiskinan yang diikuti oleh pendapatan masyarakat yang masih mengalami stagnasi. Rakyat Mesir menderita terhadap kondisi perekonomian yang terus memburuk di masa-masa transisi politik. Dalam perekonomian makro, Mesir terus mengalami penurunan termasuk kondisi nilai tukar mata uang dan segala bentuk investasi yang menyebabkan sulitnya mengembalikan sumber perekonomian yang ada di sektor-sektor lainnya. Dalam kondisi seperti ini, sangat sulit mewujudkan demokrasi ekonomi dalam waktu cepat mengingat tantangan yang datang disertai kapabilitas terhadap pengelolaan keuangan.

¹⁴⁶ Didik J. Rachbini, 1990, *Politik Pembangunan : Pemikiran Ke Arah Demokrasi Ekonomi*, Jakarta, LP3ES, hlm 6

Kebijakan pemerintah dibawah al Sisi sebagai upaya mengatasi gagalnya perekonomian Mesir adalah memangkas subsidi. Hal ini didorong oleh besarnya subsidi yang selama ini merupakan beban anggaran belanja negara menjadi masalah pemerintahan Mesir. Setidaknya seperempat dari APBN Mesir dialokasikan untuk mendanai subsidi bahan bakar dan pangan. Untuk menekan defisit anggaran yang semakin membengkak, al Sisi terpaksa memangkas subsidi bahan bakar dan pangan.

Dilema yang dihadapi adalah jika tidak dilakukan maka akan berdampak buruk terhadap APBN pemerintah Mesir. Di sisi lain, sekitaran setengah rakyat Mesir yang miskin membutuhkan subsidi pangan dan bahan bakar. Jika pemerintah al Sisi menaikkan harga bahan bakar dan pangan maka akan berdampak terhadap kenaikan komoditas lain dan mata pencaharian rakyat pun semakin terancam. Memburuknya masalah ekonomi akan berdampak terhadap instabilitas keamanan dan sosial.

Pariwisata menjadi sumber devisa ekonomi terbesar di negara Mesir. Tetapi krisis ekonomi dan instabilitas membuat sektor ini juga berada diambang kejatuhan. Meningkatkan kembali sektor ini ternyata juga membutuhkan investasi dana besar. Selama itu, pemerintah akan menerapkan kebijakan hak sewa asing terhadap pengelolaan situs-situs pariwisata sebagai langkah mengatasi pengelolaan terhadap perawatan situs-situs tersebut. Kebijakan ini dinilai sebagai kebijakan jangka pendek untuk mempercepat pemulihan ekonomi negara.

Sektor pertanian juga harus menjadi perhatian utama pemerintah. Kebijakan pemerintah Mursi dibidang pertanian khususnya di bidang produksi gandum harus dilanjutkan oleh pemerintah selanjutnya. Pada era Mubarak gandum hanya boleh

diproduksi dalam negeri sebanyak 20% dimana harus mengimpornya ke Amerika, sementara di era Mursi berhasil memaksa produksi meningkat melampaui 60% dimana Mursi mengimpornya ke negara yang diinginkannya sehingga lebih menguntungkan rakyat¹⁴⁷. Mursi pun dalam setahun berhasil membawa Mesir menuju arah swasembada pangan dimana pencapaian ini sudah tentu mampu meringankan beban pemerintah dan masyarakat mengingat pemerintah mampu menghemat belanja negara sampai miliaran dolar per tahun sekaligus meningkatkan perekonomian para petani.

Terusan Suez bisa menjadi salah satu solusi besar untuk menjawab krisis ekonomi Mesir. Namun hanya bila Terusan Suez bisa dioptimalkan pemanfaatannya oleh pemerintah. Di era Mursi, Terusan Suez rencana akan dikembangkan menjadi terusan pasar bebas dunia yang dulu di zaman Mubarak hanya menghasilkan uang sebanyak 5,6 miliar dollar pertahun, akan meningkat 100 miliar dollar pertahun.¹⁴⁸

Demi mendapatkan manfaat dari pengembangan Terusan Suez, Mesir telah bekerjasama dengan pihak asing. Menandatangani dua kontrak dengan satu konsorsium yang terdiri atas enam perusahaan internasional, Mesir akan membuat Terusan Suez Baru di sebelah terusan yang lama. Proyek ini dirancang untuk diselesaikan selama tiga tahun. Tetapi presiden al Sisi memerintahkan pelaksanaannya selesai agar menyelesaikan Terusan Suez Baru tersebut tepat satu

¹⁴⁷ _____, 2013, "Dosa-Dosa Presiden Mesir Dr. Muhammad Mursi", diakses melalui <http://www.bersamadakwah.com/2013/07/dosa-dosa-presiden-mesir-dr-muhammad-mursi.html> pada tanggal 23 Juli 2013 pukul 12.30 WITA

¹⁴⁸ *Ibid.*

tahun dan dibuka pelayaran pada awal Agustus 2015.¹⁴⁹ Program ini diperkirakan akan membantu menghidupkan kembali ekonomi Mesir dengan meningkatkan penghasilan dari lalu lintas kapal, menarik banyak penanaman modal asing dan menciptakan ribuan lapangan kerja.

Pengembangan industri dianggap bisa menjadikan Mesir sebagai negara mandiri dengan memiliki industri berat dan kuat. Pada era Mursi, terdapat dua industri penting yang dibangun yaitu membangun pabrik Samsung terbesar di Arab di Bani Suweh¹⁵⁰; dan pabrik mobil dalam negeri. Tetapi sulitnya kondisi keamanan di Mesir membuat para investor menunda pelaksanaan rencana tersebut.

Mengharapkan paket dana talangan dari IMF juga menjadi kebijakan yang dilakukan oleh al Sisi setelah mantan Presiden Mursi. Awalnya pasca penggulingan, IMF memberhentikan perundingan mengenai dana *bailout* tersebut karena tidak yakin terhadap pemerintahan interim yang didukung oleh militer. Namun secara perlahan, pemerintahan al Sisi sudah berhasil meyakinkan IMF untuk memulai kembali komitmen tersebut. Namun, seperti sebelumnya bahwa solusi ini mendapat penentangan dari dalam negeri karena mengingat bahwa syarat-syarat IMF dalam bentuk kebijakan tidak berpihak kepada rakyat disetiap negara yang menerapkannya.

Dikuasainya negara oleh rezim yang korup selama ini membuat Mesir tidak berdaya dari segi ekonomi di masa-masa saat ini. Oleh karenanya, Pemerintah Mesir harus segera melakukan langkah-langkah untuk mengembalikan aset-aset

¹⁴⁹ _____, 2014, "Mesir dan 6 Perusahaan Internasional Buat Terusan Suez Baru", diakses melalui http://m.rimanews.com/investasi/read/20141019/178621/Mesir-dan-6-Perusahaan_Internasional-Buat-Terusan-Suez-Baru pada tanggal 19 Oktober 2014 pukul 20.00 WITA

¹⁵⁰ Bayu Galih, 2012, "Ekspansi Samsung ke Afrika dan Timur Tengah", diakses melalui <http://m2.news.viva.co.id/newsread/351399-video-ekspansi-samsung-ke-afrika-dan-timur-tengah> pada tanggal 14 September 2012 pukul 17.00 WITA

pemerintahan. Presiden Mursi memilih untuk mengkonsolidasikan kekuatan politiknya di awal pemerintahannya, mengingat ia adalah kekuatan oposisi dalam pemerintahan.

Perubahan yang paling terlihat dari arah politik luar negeri Mesir dibawah pemerintahan Mursi adalah normalisasi hubungan dengan negara-negara Timur Tengah yang dinilai dominan. Yang paling utama adalah kunjungan Presiden Mursi ke Arab Saudi dan Iran. Mesir juga berperan aktif sebagai komisi tiga negara bersama Turki dan Iran yang berfokus terhadap solusi damai dalam konflik Suriah, bahkan menginisiasi banyak solusi agar konflik tidak berlangsung terus-menerus. Langkah yang sangat persuasif untuk menunjukkan pola baru dalam politik luar negeri Mesir.

Arah kebijakan luar negeri Mesir yang juga perlu digarisbawahi adalah keaktifan Mursi terhadap eskalasi konflik Israel dan Palestina. Setelah serangan Israel ke Gaza pada November 2012, Mursi memanggil Duta Besar Mesir di Palestina dan Israel untuk mengadakan konsultasi dengan Liga Arab, dan akhirnya menghasilkan keputusan untuk mengirimkan delegasi yang dipimpin oleh Nabil Al Arabi. Presiden Mursi dihadapkan pada proses yang menentukan dalam perubahan politik luar negeri Mesir dengan merespon ketegangan pertama Israel-Palestina dalam masa pemerintahannya. Dengan memihak pada Palestina ketika itu, Mesir menunjukkan bahwa Mesir merupakan aktor yang independen dalam menentukan sikap keberpihakan pada konflik tersebut. Tidak hanya itu, Mesir kini terlibat aktif dalam upaya implementatif untuk mewujudkan solusi-solusi penyelesaian konflik.

Presiden Mursi yang didukung oleh Ikhwanul muslimin diperkirakan banyak pihak bahwa politik dan kebijakan luar negeri Mesir akan mengalami perubahan besar terhadap Amerika Serikat. Ini tidak dapat dilepaskan dari sikap Ikhwanul Muslimin yang secara ideologi bertentangan dengan barat, akan tetapi politik luar negeri Mesir terhadap Amerika Serikat ternyata masih konsisten sebagaimana masa Presiden Mubarak. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan Mursi dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB September 2012 bahwa Mesir tidak akan merubah politik luar negerinya secara drastis, khususnya komitmen dalam menjaga hubungan baik dengan Mesir dan Amerika Serikat. Hal ini ditunjukkan melalui pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton untuk membahas tentang prospek kerja sama antara kedua negara terutama dengan tetap memberlakukan kebijakan pemberian bantuan ekonomi dan militer kepada Mesir dibawah kepemimpinan Mursi.¹⁵² Selain itu hubungan erat Mesir dan Amerika Serikat dapat dilihat dari sikap kedua negara yang sama-sama menyerukan pergantian rezim di Suriah yang tengah mengalami krisis internal.

Berdasarkan informasi ini, dapat disebutkan bahwa politik luar negeri Mesir terhadap Amerika Serikat tidak mengalami perubahan. Mesir tetap berhubungan baik dengan Amerika Serikat seperti pada masa kepemimpinan Husni Mubarak. Kondisi ini merupakan suatu paradoks jika meninjau komposisi pemerintahan Mesir dibawah kepemimpinan Mursi yang didominasi oleh *Ikhwanul Muslimin* dimana seharusnya berpengaruh besar terhadap kebijakan luar negeri Mesir terhadap Amerika Serikat.

¹⁵² _____, 2013, Clinton dan Morsi Bahas Hubungan AS-Mesir”, diakses melalui <http://www.voaindonesia.com/content/clinton-dan-morsi-bahas-hubungan-as-mesir/1514980.html> pada tanggal 9 Maret 2013 pukul 19.00 WITA

Pemerintahan Mursi tidak hanya memusatkan agenda politik luar negerinya terhadap Amerika Serikat. Konsistensi memang ditunjukkan Mesir terhadap Amerika namun Mesir juga tetap serius memperhatikan potensi pengembangan kerja sama luar negeri terhadap pihak lain. Dalam konteks regional, Mesir bahkan menjalin kembali hubungan diplomatik dengan Iran setelah hubungan kedua negara renggang selama era Mubarak. Bahkan sekalipun pemerintahan Iran adalah pendukung Presiden Suriah memerangi pemberontak Suriah, hubungan kedua negara tidak terpengaruh. Disamping itu, yang awalnya dikhawatirkan hubungan dengan Israel akan terganggu terutama terkait pembatalan perjanjian *Camp David*, tidak terjadi demikian. Ini membuktikan bahwa Mesir akan lebih memprioritaskan kepentingan dalam konteks kerja sama dibanding berkonflik dengan Barat.

Kebijakan politik luar negeri Mesir seperti sekarang ini dipengaruhi besar oleh kondisi internal. Negara yang berada dalam kondisi terpuruk sudah tentu akan mengarahkan kebijakan luar negerinya guna mendapatkan dukungan terutama bantuan ekonomi. Hal ini terbukti dengan kunjungan luar negeri Mursi yang memperoleh bantuan ekonomi dari sejumlah negara. Selain itu, Mursi juga mengupayakan usaha untuk menarik para investor asing demi mengembalikan stabilitas perekonomian. Hal ini sangat rasional dilakukan oleh Mesir dan sangat dibutuhkan perhatian dan konsistensi pula dalam menjalankannya.

Berdasarkan dinamika politik luar negeri Mesir pasca transisi politik tidak mengalami perubahan yang sifatnya radikal, sekalipun dibawah kekuasaan kelompok *Ikhwanul Muslimin*. Disamping itu, Mesir yang kini berada ditengah kondisi yang sulit, terus berupaya memanfaatkan potensi-potensi kerja sama disamping tetap mengedepankan peran sebagai penyangga perdamaian di kawasan.

Menjaga setiap perjanjian dan hubungan yang harmonis dengan negara-negara sahabat serta membuka peluang menjalin hubungan negara-negara Asia, Afrika, dan Eropa menjadi kunci utama kebijakan luar negerinya. Salah satu contohnya ketika Arab Saudi menarik duta besarnya karena terjadi demonstrasi terhadap kedutaannya di Kairo, parlemen Mesir mengirim delegasi besar ke Arab Saudi guna mencari solusi penyelesaian terhadap permasalahan tersebut.¹⁵³ Mesir sadar bahwa mereka tidak menghadapi masalah besar dalam politik luar negerinya.

¹⁵³ _____, 2012, "Ikhwanul Muslimin Dikhawatirkan Ubah Politik Luar Negeri Mesir jika Menang Pilres", diakses melalui <http://www.voaindonesia.com/content/ikhwanul-muslimin-dikhawatirkan-ubah-politik-luar-negeri-mesir/1210814.html> pada tanggal 13 Juni 2012 pukul 14.30 WITA

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

1. Pemerintahan Hosni Mubarak yang berkuasa selama 30 tahun telah menerapkan pola-pola dan praktek otoriter dalam menjalankan dan mempertahankan kekuasaannya di Mesir. Mubarak menguasai setiap sendi kehidupan politik di Mesir melalui suasana yang penuh dengan manipulasi, tindakan represif, dan intimidasi melalui instrument-instrumen politik dan hukum yang mendukungnya. Sementara dalam aspek ekonomi, rezim penguasa Mubarak yang menerapkan kebijakan liberalisasi ekonomi, mendorong negara kedalam ketidakefisienan ekonomi, ketimpangan pelaku ekonomi, serta memunculkan budaya korupsi yang tentunya berdampak buruk bagi kehidupan sosial masyarakat. Hidup dalam pengalaman buruk politik otoriter mendorong rakyat bersatu menentang dan melengserkan Mubarak dalam bentuk revolusi pada tanggal 25 Januari 2011.
2. Mesir memasuki masa transisi politik demokrasi pasca lengsernya Mubarak dari kekuasaan Mesir. Tetapi proses perubahan yang begitu cepat tidak disertai dengan kesiapan yang matang oleh para politisi Mesir seperti Ikhwanul Muslimin dan kalangan liberal sekuler. Kelompok ini sering terlibat konflik dalam proses pemerintahan. Kondisi ini dimanfaatkan dengan baik oleh Militer Mesir dan pejabat rezim Mubarak untuk mempertahankan dominasinya dalam kehidupan politik Mesir. Kelompok pemuda pejuang revolusi memainkan peran yang tidak maksimal selama masa transisi. Kondisi ini akhirnya membawa

Mesir kembali kedalam kepemimpinan militer yang cenderung menerapkan kebijakan serupa dengan rezim otoriter Mubarak.

Dalam bidang ekonomi, Mesir berada dalam kondisi krisis dimana sektor-sektor penyumbang devisa negara nyaris mengalami kemunduran disertai dengan kondisi sosial yang semakin memburuk. Mengatasi persoalan ini, pemerintahan menerapkan pembatasan terhadap subsidi pangan dan bahan bakar yang tidak berpihak terhadap rakyat; membuka kebijakan investasi seluas-luasnya di Mesir; dan mengusahakan memperoleh bantuan ekonomi dan pinjaman luar negeri.

Kebijakan luar negeri Mesir tidak banyak berubah selama masa transisi. Mesir selalu menunjukkan diri sebagai salah satu penyangga perdamaian di kawasan Timur Tengah. Mengedepankan hubungan yang harmonis dengan negara sahabat serta pembinaan hubungan baik dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Eropa

B. Saran-saran

1. Setiap elemen politik di Mesir harus mengakhiri perselisihan yang berujung konflik karena dapat menciptakan instabilitas dan mengganggu keamanan negara yang berdampak langsung pada kehidupan ekonomi.
2. Setiap elemen politik di Mesir harus mampu mengkonsolidasikan diri dalam suasana yang demokratis untuk mencapai kesepakatan atau konsensus minimal dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang menjadi prioritas seperti ekonomi dan politik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adnan, Abdul Hadi. 2008. *Perkembangan Hubungan Internasional di Afrika*. Bandung : CV. Angkasa
- Apter, David E. 1988. *Pengantar Analisa Politik*. Jakarta : Kincir Buana
- Azra, Azyumardi. 2002. *Konflik Baru Antar Peradaban Globalisasi, Radikalisme, dan Pluralitas*. Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Budiarjo, Miriam. 1991. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia
- Dahl, Robert A. 2001. *Perihal Demokrasi Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Diamond, Larry. 1993. *Revolusi Demokrasi: Perjuangan untuk Kebebasan dan Pluralisme di Negara Berkembang*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Efriza. 2009. *Ilmu Politik, Dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan*. Bandung : Alfabeta
- Fukuyama, Francis. 2004. *The End of History and The Last Man*. Yogyakarta : Penerbit Qalam
- Jones, Walter S. 1993. *Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan , Ekonomi – Politik Internasional, dan Tatanan Dunia baru 2*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Mas'oed, Mohtar. 2003. *Negara, Kapital, dan Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Meyer, Thomas. 2009. *Demokrasi Sebuah Pengantar Untuk Penerapan*. Jakarta : Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia
- Nohlen, Dieter. 1994. *Kamus Dunia Ketiga: Negara, Organisasi, Teori, Definisi, dan Tokoh*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia
- Pioppi, Daniela. 2001. *Transition to What: Egypt's Uncertain Departure from Neo-Authoritarianism*. Washington: The German Marshall Fund
- Ricardo, David A. 2011. *Catatan Harian Revolusi Mesir Revolusi Rakyat*. Jakarta : Buku Kita

- Rodee, Carlton Claymer. 2002. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada
- Sihbudi, Riza. 1995. *Profil Negara-Negara Timur Tengah Buku Satu*. Jakarta : Dunia Pustaka Jaya
- Soekamto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada
- Sukanta. 2007. *Konflik Tak Berujung Mengupas Konflik dan Interdependensi Mesir-Sudan dalam Perspektif Teori Hubungan Internasional*. Jakarta : Teraju Mizan
- Tamburak, Apriadi. 2011. *Revolusi Timur Tengah Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-Negara Timur Tengah*. Yogyakarta : NARASI

JURNAL :

- Anderson, Lisa. 2011. "The New Arab Revolt, Foreign Affairs". Vol. 90 No. 3
- International Crisis Group. 2011. "Popular Protest In North Africa and Middle East: Egypt Victorious?". Middle East/North Africa Report No. 101
- Lampridi, Athina. 2011. "Occasional Analysis: Egypt/Hosni Mubarak, The Slow Fall of Strong Man". TEIM Election Watch Analysis
- Nugroho, Kris. "Konsolidasi Demokrasi dan Masa Depan Politik Indonesia". Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik. Vol. 14 No. 2
- Sharp, Jeremy. 2011. "Egypt: Background and U.S Relations:". Congressional research Services
- Sujasa, Purnawan Adi. 2011. "Perubahan di Timur Tengah dan Afrika Utara",. Jurnal Luar Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementrian Luar Negeri RI, Edisi Khusus 2011
- Paciello, Maria Cristina. 2011. "Egypt: Changes and Challenges of Political Transition". MEDPRO Technical Report No. 4/May 2011

INTERNET :

- http://www.analisadaily.com/news/read/2011/10/15/17249/masa_depan_demokrasi_di_timur_tengah/ diakses pada tanggal 16 Oktober 2011 pukul 15.00 WITA
- <http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12433045> diakses pada tanggal 1 Maret 2011 pukul 20.00 WITA

http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/06//120616_egyptelection.shtml

diakses pada tanggal 6 Juni 2012 pukul 13.00 WITA

<http://www.beritasatu.com/fokus/56008-mohamed-mursi-presiden-mesir-dengan-kekuasaan-terbatas.html>

diakses pada tanggal 25 Juni 2012 pukul 08.00 WITA

<http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html>

diakses pada tanggal 15 Februari 2012 pukul 01.00 WITA

<http://countrystudies.us/egypt/57.html>

diakses pada tanggal 21 Agustus 2011 pukul 13.00 WITA

<http://www.egyptindependent.com/news/brother-cabinet>

diakses pada tanggal 3 Agustus 2012 pukul 15.00 WITA

http://ec.europa.eu/word/enp/documents_en.html

diakses pada tanggal 2 Maret 2011 pukul 22.00 WITA

http://www.ifes.org/~media/Files/Publications/Whita%20PaperReport/2011/2011_egypt_briefing_paper_II.pdf

diakses pada tanggal 23 Mei 2011 pukul 17.00 WITA

http://www.indonesian.irib.ir/ranah/telisik/item/81611-Mesir_dan_Tantangan_Pemerintahan_El-Sisi

diakses pada tanggal 16 Juni 2014 pukul 21.00 WITA

http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/83035-Krisis_Ekonomi_Mesir_dan_Ketidakpuasan_Rakyat

diakses pada tanggal 21 Juli 2014 pukul 20.40 WITA

<http://www.internaional.kompas.com/read/2014/05/06/0843504/El-Sisi.Militer.Tak.Akan.Punya.Peran.Lebih.bila.Saya.Terpilih>

diakses pada tanggal 6 Mei 2014 pukul 10.00 WITA

<http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/Mubarak.html>

diakses pada tanggal 5 Juli 2011 pukul 21.00 WITA

<http://m.kompas.com/news/read/2012/05/29/02123616/kekuatan.politik.terpolarisasi>

diakses pada tanggal 29 Mei 2012 pukul 12.35 WITA

<http://m.kompas.com/news/read/2012/05/27/03333571/mursi.vs.shafik.citra.im.kontra.ndp>

diakses pada tanggal 29 Mei 2012 pukul 13.10 WITA

<http://www.metronews.com/mobile-site/read/newsvideo/2012/06/05/152399/Rakyat-Mesir-Tetap-Minta-Mubarak-dan-Keluarga-Dihukum-Mati/7>

diakses pada tanggal 5 Juni 2012 pukul 15.00 WITA

<http://www.mmc.gov.eg/Academies/AFA/Aa10.htm> diakses pada tanggal 23 Desember 2011 pukul 14.00 WITA

<http://news.firmadani.com/read/2013/09/09/2-bulan-kudeta-mesir-alami-krisis-ekonomi/> diakses pada tanggal 9 September 2013 pukul 15.00 WITA

<http://www.nytimes.com/2011/02/12/world/middleeast/12egypt.html> diakses pada tanggal 25 Februari 2011 pukul 19.00 WITA

<http://oxforddictionaries.com/definition/english/future> diakses pada tanggal 15 Februari 2012 pukul 14.00 WITA

<http://www.rawstory.com/rs/2012/10/egypts-morsi-lists-successes-of-first-100-days/> diakses pada tanggal 8 Oktober 2012 pukul 16.00 WITA

<http://www.reuters.com/article/2011/10/11/us-egypt-president-idUSBRE89A1NN20121011> diakses pada tanggal 10 November 2012 pukul 15.30 WITA

<http://www.thecordobaoundation.com/news.php?id=3&art=150> diakses pada tanggal 29 Juli 2013

<http://m.voa-islam.com/news/analysis/2012/10/08/210025/100-hari-pemerintahan-presiden-morsi-70-persen-rakyat-puas/> diakses pada tanggal 9 Oktober 2010 pukul 10.30 WITA

http://nwes.xinhuanet.com/english2010/world/2011-02/11/c_13726572.htm diakses pada tanggal 28 Februari 2011 pukul 17.00 WITA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

Constitutional Declaration

After reviewing the constitutional declaration issued in 13th February, And results of the referendum on the constitutional amendments of 19th March 2011, where were announced in 20th March 2011, And in consideration of the statement issued by the Supreme Council of Armed Forces in 23rd March 2011, The Supreme Council of Armed Forces has decreed the following;

(Article 1)

The Arab Republic of Egypt is a democratic state based on citizenship. The Egyptian people are part of the Arab nation and work for the realization of its comprehensive unity.

(Article 2)

Islam is the religion of the state and the Arabic language is its official language. Principles of Islamic law (Shari'a) are the principal source of legislation.

(Article 3)

Sovereignty is for the people alone and they are the source of authority. The people shall exercise and protect this sovereignty, and safeguard the national unity.

(Article 4)

Citizens have the right to establish associations, syndicates, federations, and parties according to the law. It is forbidden to form associations whose activities are opposed to the order of society or secret or of militaristic nature. No political activity shall be exercised nor political parties established on a religious referential authority, on a religious basis or on discrimination on grounds of gender or origin.

(Article 5)

Public property is protected, and its defense and support is a duty incumbent on every citizen, according to the law. Private property is safeguard, and it is not permitted to impose guardianship over it except through means stated in law and by court ruling. Property cannot be seized except for the public benefit and in exchange for compensation according to the law, and the right inheritance is guaranteed.

(Article 6)

Law applies equally to all citizens, and they are equal in rights and general duties. They may not be discriminated against due to race, origin, language, religion, or creed.

(Article 7)

Personal freedom is an natural right, safeguarded and inviolable, and except in the case of being caught in the act of violation, it is not permitted for anyone to be detained or searched or to be freedom restricted, or movement prevented, except by a warrant order compelling the necessity of investigation or to safeguard the security of society. This warrant order shall be issued by a specialized judge or the general prosecutor, according to the law. The law also determines the period for which one may be detained.

(Article 8)

Every citizen who is arrested or detained must be treated in a way that preserves his/her human dignity. It is forbidden to be abused psychically or morally, and forbidden to be

detained in places outside of those designated by the prisons law. Any statement proven to be extracted from a citizen under threat will not be counted.

(Article 9)

Homes are protected and it is not permitted to enter or search them without a warrant according to the law.

(Article 10)

The life of citizens has special sanctity protected by law, as do messages sent by post, fax, telephone, or other means of communications, where secrecy is guaranteed. It is not permitted to confiscate, read or censor them, except by court ruling and for a limited time, according to the law.

(Article 11)

The state guarantees the freedom of creed, and practicing religious rites.

(Article 12)

Freedom of opinion is guaranteed, and every person has the right to express his opinion and publish it spoken, written, photographed, or other form of expression within the law. Personal criticism and constructive criticism are a guarantee for the safety of the national development.

(Article 13)

Freedom of the press, printing, publication and media are guaranteed, and censorship is forbidden, as are giving ultimatums and stopping or canceling publication from an administrative channel. Exception may be made in the case of emergency or time of war, allowing limited censorship of newspapers, publication and media on matters related to general safety or the purposes of national security, all according to law.

(Article 14)

It is not permitted for any citizen to be denied residence in a particular area, nor requiring him to reside in a particular place, except in cases designated by law.

(Article 15)

It is not permitted to expel a citizen from the country or forbid him from returning, or to give up political refugees.

(Article 16)

Citizens have the right of private assembly in peace without bearing arms or need for prior notice. It is not permitted for security forces to attend these private meetings. Public meetings, processions and gatherings are permitted within confines of the law.

(Article 17)

Any attack on the personal freedom or sanctity of life of citizens or other rights and general freedom guaranteed by the constitution and law is a crime, which will be followed by a criminal or civil suit according to the statute of limitations. The state guarantees fair compensation for whoever experiences such an aggression.

(Article 18)

Public taxes will be instituted and their amendment or cancellation will take place by law. No one will be excluded from taxation except in cases stated in law. It is not permitted for anyone to charge another pay taxes or fees except within the bounds of law.

(Article 19)

Personal penalty. There will be no crime or penalty except according to the law. Punishment will not take place except by judicial ruling, nor will punishment occur for acts that take place before enactment of the relevant law.

(Article 20)

The accused is innocent until proven guilty in a court of law that guarantees for him defense. Every accused in a crime is required to have an attorney to defend him.

(Article 21)

Litigation is a safeguarded and guaranteed right for all people, and every citizen has the right to resort to his natural judge. The state guarantees close association of judicial apparatuses with litigants, in addition to a speedy trial of matters. The text of law forbids any action or administrative decision from being absolved of judicial oversight.

(Article 22)

The right to defend one's self in person or by proxy is guaranteed. The law guarantees those unable monetarily to defend themselves to resort to the judiciary for means to defend their rights.

(Article 23)

Anyone arrested or detained will be notified of the reason for his detestation immediately. He has the right to contact whomever he desires and inform them of the arrest and seek help, according to the law. It is necessary that accusations be announced with haste, and the detained has the right to appeal in from of the judiciary to determine the circumstances in which his personal freedom was suspended. The law organizes the right to present a grievance in order to guarantee a decision in a limited time period, or else the detainee's release is inevitably released.

(Article 24)

Laws are issued and executed in the name of people. Suspension or avoidance of their execution on the part of public employees is a crime punishable by law. The plaintiff has the right to bring the criminal case directly to a specialized court.

(Article 25)

The President of the State is the president of the republic. He shall assert the sovereignty of the people, respect for the constitution and sovereignty of the law, and defense of national unity and social justice, according to means stipulated in this Announcement and the law. He shall undertake upon assuming his position responsibilities referred to in article 56 of this announcement, except for what is stipulated in provisions 1 and 2 of the article.

(Article 26)

It is required for whoever is elected president of the republic to be an Egyptian who has never held another citizenship, born of two Egyptian parents who have never held another citizenship enjoying his political and civil rights, not married to a non-Egyptian, and not falling under the age of 40 years.

(Article 27)

The president will be elected directly by general secret ballot. To be nominated for the presidency of the republic, a candidate must be supported by 30 members at least of the elected members of the People's Assembly and Shoura Council, or the candidate may be obtain the support of at least 30,000 citizens, who have the right to vote, in at least 15 provinces whereby the number of supports in any of the provinces is at least 1,000. In all cases, it is no permissible to support more than one candidate, and the law will stipulate the procedures for this matter. Every political party with members who have won at least one seat by way of election in either of the People's Assembly or Shoura Council in the last elections may nominate one of its members of the presidency.

(Article 28)

A supreme judicial commission named the "President Elections Commission" will supervise the election of the president republic beginning with the announcement of the opening of candidate nomination and ending with the announcement of the election result. The commission will be composed of the president of the Supreme Constitutional Court as the head, and a membership made up on the president of the Cairo Appeals Court, the most senior deputies of the president of the Supreme Constitutional Court, the most senior deputies of the president of the Court of Cassation and the most senior deputies of the president of the State Council The Commission's decisions will be final and carry the force law, and will not subject to objections from any party, in the same manner as it is forbidden for the decisions to be stopped or canceled. The purview of Commission will be by law. The Commission will form committees to supervise voting and counting according to the stipulations in article 39. Draft legislation for presidential elections will be shown to the Supreme Constitutional Court before being issued to determine the extent of compliance with the constitution. The Supreme Constitutional Court will issue its decision on this matter within 15 days of receiving the draft legislation. If it decides that the text is unconstitutional, more work must be done before the law can be issued. In all cases, the decision of the Court will be obligatory for all authorities of the state, and will be published in the official gazette within three days of being releases.

(Article 29)

The period of presidency is four years beginning from the date of announcing the result of the election, and the president of the republic may no run for more than one additional presidential term.

(Article 30)

The president will take the following oath before the People's Assembly before assuming his position " I swear to God that I will faithfully preserve the republican order, that I will respect the constitution and the law, and look after the interests of the people comprehensively, and that will preserve the independence of the nation and the safety of its land"

(Article 31)

The president of the republic will appoint within a maximum of 30 days after assuming his duties at least one vice president and determine his responsibilities, so that in the case of his stepping down from the position of the president, another will be appointed on his place. The conditions that must be met by the president will apply, as will rules governing the accountability for vice presidents of the republic.

(Article 32)

The People's Assembly Council will be composed of a number of members determined by law to be at least 350, half of whom at least will be Workers and Peasants. The members of the People's Assembly Council will be elected by a direct, public and secret election. The law stipulates the definition of a Worker and Peasant, as well as the electoral districts that the state will be divided into. It is possible for the president of the republic to appoint in the People's Assembly a number of the members, not to exceed 10.

(Article 33)

Immediately upon election, the People's Assembly Council will assume the authority to legislate and determine the public policy of the state, the general plan for economic and

social development, and the public budget of the state. It will also oversee the work of the executive branch.

(Article 34)

Term of the People's Assembly Council will be five years starting from the date of its first assembly.

(Article 35)

The Shoura Council will be composed of a number of members determined by law no to be fewer than 132 members, two-thirds of whom will be elected by direct, public and secret voting (at least half workers and half peasants), and one-third of whom will be appointed by the president of the republic. The law determines the electoral districts for the Shoura Council.

(Article 36)

Term of the Shoura Council membership will be 6 years.

(Article 37)

The Shoura Council will assume its responsibilities upon election. It will study and recommend what it views as necessary to preserve support for national unity and social peace and protect the foundational elements of society and its highest values, in addition to rights, freedoms and general obligations. The Council will consider the following;

- 1. The project of general planning for economic and social development*
- 2. Draft laws referred by the president of the republic.*
- 3. Whatever the president of the republic refer to the Council on subjects related to the state's public policy or policies related to the Arab and foreign affairs. The council will notify the president and the People's Assembly Council of its opinion on these matters.*

(Article 38)

The law will govern the right of candidacy for the People's Assembly and Shoura Councils according to the determined electoral system including at a minimum the participation of women in both assemblies.

(Article 39)

The law determines the conditions that must be met for members of the People's Assembly and Shoura Councils, stipulating electoral and referenda provisions. A supreme commission made entirely of judges will assume the responsibility of supervision elections of referenda, from the determination of electoral schedules to the announcing of election results, all as regulated by law. Voting and the counting of votes will take place under their higher councils, and the decision in the process of choosing them will undertaken by the supreme commission.

(Article 40)

The Court of Cassation will be designated to determine the integrity of the membership of the People's Assembly and Shoura Councils, and objections will be presented to the court within 30 days of the announcement of elections results. The Court will rule on the objection within 90 days of receiving it. The membership is considered void on the date which the two assemblies are informed of the Court's decision.

(Article 41)

Electoral procedures will being within months of the state of this Announcement. The Shoura Council will assume its duties with elected members, upon his election, the president of the republic will appoint the final third of the Council's membership, who will serve out of the remainder of the term of the Council as regulated by the law.

(Article 42)

Every member of the People's Assembly and Shoura Councils will swear to conduct work in accordance with the following oath in front of his legislative body " I swear to God that I will faithfully preserve the safety of the nation and the republican order, that I will look after the interests of the people and respect the constitution and the law"

(Article 43)

It is not permissible for any member of the People's Assembly or Shoura Councils during his tenure to busy or rent anything using state money, or to rent out or sell anything with said money, or barter with it or enter into a contract with the state as an entrepreneur, importer, or contractor.

(Article 44)

It is not permissible to remove the membership of any members of the People's Assembly or Shoura Councils unless he has lost confidence and esteem, or any of the condition of membership, or his position as Worker or Peasant based on which he was elected, or if he has breached any of responsibilities of membership. A decision to remove membership must be issued by a two-thirds majority of the respective assembly.

(Article 45)

It is not permissible in any case except that of flagrant violation to take any criminal proceedings against a member of the People's Assembly or Shoura Councils, except with prior permission from his assembly. In the case of the assembly's recess, permission will be taken from the head of the assembly and will be subsequently presented to the assembly upon resumption of work.

(Article 46)

Judicial authority is independent and invested in courts of different varieties and degrees. Rulings will be issued according to the law

(Article 47)

Judges are independent and not subjected to removal. The law regulates disciplinary actions against them. There is no authority over them except that of the law, and its not permissible for any authority to interfere in their issues or matters of justice.

(Article 48)

The State Council is an independent judicial body that specializes in adjudication of administrative disputes and disciplinary claims. The law determines its other responsibilities.

(Article 49)

The Supreme Constitutional Court is an independent and autonomous judicial body, uniquely tasked with judicial oversight over the constitutionality of laws and regulations. It deals with the interpretations of legislative texts, all as stipulated in the law. The law also designates other responsibilities for the Court and regulates the procedures followed in front of it.

(Article 50)

The law determines judicial bodies and their responsibilities and regulates their formation, in addition to stipulating conditions and procedures for appointing their members and their transfer.

(Article 51)

The law regulates the military judicial system and stipulates its responsibilities in line with constitutional principles.

(Article 52)

Court sessions are to be public except in the case that the court decides to make them secret in the interest of public order or morals. In all cases, the verdict is announced in a public session.

(Article 53)

The armed forces are the property of the people. Their mission is the protection of the country and the safety and security of its lands. It is not permissible for anybody or group to establish military or paramilitary formations. The defense of the country and its land is sacred responsibility, and conscription is mandatory according to the law. The law stipulates the conditions for military service and promotion in the armed forces.

(Article 54)

A council entitles "The National Defense Council" will be established. It will be headed by the president of the republic and tasked with evaluating affairs concerned with means of securing the country and its safety. The law will stipulate its other responsibilities.

(Article 55)

The police are a civil order body whose responsibility is to serve the people. The police guarantee for the people tranquility and security and provide for the maintenance of order, public security and morals, according to the law.

(Article 56)

The Supreme Council of the Armed Forces deals with the administration of the affairs of the country. To achieve this, it has directly the following;

- 1. Legislation*
- 2. Issuing public policy for the state and the public budget and ensuring its implementation*
- 3. Appointing the appointed members of the People's Assembly Council*
- 4. Calling the People's Assembly and Shoura Councils to enter into normal session, adjourn, or hold an extraordinary session, and adjourn said session*
- 5. The right to promulgate laws or object to them*
- 6. Represent the state domestically and abroad, sign international treaties and agreements, and be considered a part of the legal system of the state*
- 7. Appoint the prime minister and his deputies, ministers and their deputies, as well as relieve them from their duties*
- 8. Appoint civilian and military employees and political representatives, as well as dismiss them according to the law; accredit foreign political representative*
- 9. Pardon or reduce punishment, through blanket amnesty is granted only by law*
- 10. Other authorities and responsibilities as determined by the president of the republic pursuant to laws and regulations. The Council shall have the power to delegate its head or one of its members to take on its responsibilities*

(Article 57)

The Cabinet of Ministers and the ministers shall assume executive authority in all that pertains to them, and the Cabinet in particular will be responsible for;

- 1. Participate with the Supreme Council of the Armed Forces to put in place public policies of the state and supervise their implementation, according to the laws and resolutions of the republic*
- 2. Direct, coordinate, and follow the work of the ministries and their related fronts, in addition to public institutions and bodies*

3. *Issue administrative and executive orders according to laws, regulations, and decisions, and see to their implementation*
4. *Prepare draft legislation, regulations and decrees*
5. *Prepare a draft public budget for the state*
6. *Prepare a draft public plan for the state*
7. *Contract and grant loans according to the constitutional principles*
8. *Note the implementation of laws, preservation of state security, and protection of citizen rights and state interests*

(Article 58)

It is not permissible for a minister during his tenure to engage in an independent profession, buy or rent anything using state money, rent out or sell anything with state money, or barter with state money

(Article 59)

The president of the republic, after taking into account the opinion of the cabinet, can announce a state of emergency as stipulated in law. He must present this announcement to the People's Assembly Council within the seven subsequent days to decide its view on this matter. If the state of emergency is announced in a period of recess, the Assembly must be called back to session immediately to review the matter, taking into account the time limit mentioned above. If the People's Assembly Council is dissolved, the matter will be reviewed by the new Assembly at its first meeting. A majority of the members of the People's Assembly Council must agree to the announcement of state of emergency. In all cases, the announcement of a state of emergency will be for a limited time period not exceeding 6 months. It is not permissible to extend it, except after a people's referendum on the matter and their agreement to an extension.

(Article 60)

The members of the first People's Assembly and Shoura Councils (except the appointed members) will meet in a joint session following an invitation from the Supreme Council of Armed Forces within 6 months of their election to elect a provisional assembly composed of 100 members which will prepare a new draft constitution for the country to be completed within 6 months of the formation of this assembly. The draft constitution will be presented within 15 days of its preparation to the people who will vote in a referendum on the matter. The constitution will take effect from the date on which the people approve the referendum.

(Article 61)

The Supreme Council of Armed Forces will continue directly with its limited responsibilities following this announcement, until a time at which the People's Assembly and Shoura Councils assume their responsibilities and the president of the republic is elected and assumes his position.

(Article 62)

All laws and regulations decided upon before the publication of this announcement remain valid and implemented; however, it is possible to cancel laws or amend them according to the rules and procedures adopted in this announcement.

(Article 63)

This announcement will be published in the official gazette and will be in effect the day following its publication.